

**ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN BARAT  
KABUPATEN BANGKA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota**

Oleh :

**RUSMANSYAH  
L4D005061**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2006**

**ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN BARAT  
KABUPATEN BANGKA**

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

**RUSMANSYAH  
L4D005061**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal 25 September 2006

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 25 September 2006

Pembimbing II

Pembimbing I

**M. MUKTI ALI, SE, MSi, MT**

**PM BROTONARYO, SE, MSP**

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

**Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari tesis orang lain/institusi lain, maka saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab

Semarang, 25 September 2006

RUSMANSYAH  
NIM L4D 005061

Tenggelamkan engkau dalam manisnya dunia

Tapi

Berhati-hatilah terhadap satu perkara yang  
sangat besar

Dan

Janganlah engkau mati sebelum mati

*Terima kasih istriku*

*Inilah persembahanku untuk ketabahanmu*

*Terima kasih Mak*

*Terima kasih Bak*

*Inilah tanda baktiku pada cinta yang tertanam*

*Terima kasih Mamak*

*Terima kasih Bapak*

*Inilah tanda baktiku pada asa yang terpancang*

## ABSTRAK

Kabupaten Bangka selama kurun waktu 2002-2004 mengalami kesenjangan pembangunan antar wilayah, pendapatan, dan sarana prasarana wilayah. Kawasan barat Bangka merupakan kawasan yang lebih tertinggal dibandingkan dengan kawasan selatan dan utara. Faktor jarak dan relatif rendahnya jumlah sarana prasarana hingga aktifitas masyarakatnya cenderung lebih tertarik ke Pangkal Pinang. Kebijakan pengembangan kawasan barat selama ini belum mampu mengeliminasi disparitas yang terjadi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji arahan pengembangan kawasan barat melalui identifikasi, inventarisasi, analisis, dan merumuskan ruang fisik dan ekonomi serta pengembangan kawasan.

Penetapan wilayah pengembangan, orde kecamatan dan pembangunan berbasis kewilayahan melahirkan dinamika pengembangan wilayah, kajian ruang fisik dan ekonomi, hingga pertanyaan penelitiannya adalah Bagaimanakan Arahan Pengembangan Kawasan Barat Kabupaten Bangka Guna Mengeliminasi Kesenjangan Wilayah yang terjadi?

Dengan menggunakan data 2000-2004 dilakukan Analisis Skalogram Guttman, Analisis Gravitasi, analisis LQ, SSA, dan pengembangan wilayah. Dalam pembahasannya tiap kecamatan di kawasan barat dianalisis pada tingkat kabupaten, lalu dilanjutkan dengan analisis pada tingkat kawasan barat sebagai satu kesatuan wilayah.

Analisis Skalogram terhadap fasilitas dan jumlah penduduk didapatkan hasil bahwa Kabupaten Bangka memiliki satu kecamatan berorde satu, tidak ada yang berorde dua, dan 7 kecamatan lain berorde tiga. Analisis wilayah pengaruh menghasilkan, bahwa interaksi pusat pertumbuhan dengan wilayah pelayanannya di kawasan barat lebih lemah daripada interaksi wilayah tersebut ke Pangkal Pinang ataupun antar kecamatan dalam kawasan. Analisis aktifitas ekonomi terhadap sektor/sub sektor usaha dalam PDRB ADHK tahun 2000-2004 diperoleh hasil bahwa sektor/sub sektor *leading* di kawasan barat adalah kehutanan; kimia, barang galian bukan logam, barang logam, bangunan, angkutan jalan raya, lembaga keuangan bukan bank, jasa perusahaan, jasa-jasa, swasta, dan sosial kemasyarakatan.

Arahan yang dapat digunakan dalam pengembangan kawasan barat Bangka adalah menjadikan Kecamatan Puding Besar sebagai pusat pertumbuhan baru karena didukung oleh sektor pertanian dan letak yang strategis serta mendorong pertumbuhan industri pengolahan karet di Mendo Barat dengan terus mendorong pertumbuhan sub sektor perkebunan karet serta mengaitkannya dengan isu-isu besar yang ada hingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengeliminasi disparitas wilayah.

Mengingat kebijakan terhadap kawasan barat difokuskan pada sektor pertanian, maka pengembangan teknologi pertanian untuk mendorong produktifitas subsektor perkebunan menjadi sesuatu yang sangat penting guna meningkatkan daya saing, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengeliminasi disparitas wilayah.

---

Kata Kunci : Kesenjangan, Pengembangan wilayah

## ABSTRACT

*Kabupaten Bangka in periods of 2002-2004 has experience development disparity among area, income, and area structure and infrastructure. The western area of Bangka is lag behind compared with the southern and northern area. Distance factor and relatively low of infrastructure caused community tend to do their activities to Pangkal Pinang. Western development policy currently is unable to eliminate the disparity. This study aimed to examine western area development direction by identification, documentation, analysis, and to propose physical and economic space and area development.*

*The establishment of WP, kecamatan order and area-based development have created development dynamics and physical and economic review. The research question is How Western Area of Bangka Development Direction to Eliminate Area Disparity?*

*By using 2000-2004 data, Guttman's Scalogram Analysis, Gravitation Analysis, LQ analysis, SSA, and area development analysis are conducted. In the discussion section, each kecamatan is analyzed, followed by analysis on western area as a whole.*

*The Scalogram Analysis on facilities and population numbers shows that Kabupaten Bangka has one first-order kecamatan, no second-order kecamatan, and 7 third-order kecamatan. The area influence analysis shows that growth center interaction with its service area in western area is weaker than its interaction to Pangkal Pinang or among kecamatan in that area. Economic activities analysis on business sector/sub sector in PDRB ADHK years of 2000-2004 shows that the leading sector/sub sector in western area are forestry, chemical, non metal mining goods, metal, building, highway transportation, non-bank financial institutions, services, private sector, and social sector.*

*The direction that can be used to develop western area of Bangka is create Kecamatan Puding Besar as new growth center, because this area is supported by agricultural sector and have strategic location to support rubber industrial growth and also rubber processing industry sub sector and related main issues to improve wealth and eliminate area disparity.*

*Based that western area policy is focused on agricultural sector, agricultural technology development to support plantation sub-sector productivity is essential to improve competitiveness, community wealth and to eliminate area disparity.*

*Keywords: Disparity, area development*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas selesainya tesis ini dan saya beri judul Arahan Pengembangan Kawasan Barat Kabupaten Bangka guna melengkapi tugas mata kuliah tesis pada Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.

Dengan didasari tanggung jawab moral terhadap kelangsungan perekonomian Kabupaten Bangka, maka penulis mencoba mengkaji ruang fisik dan perekonomian serta kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bangka khususnya kawasan barat Bangka yang dilalui oleh jalur transportasi utama Pangkal Pinang Mentok guna mengetahui arah pengembangan wilayah kecamatan-kecamatan di kawasan tersebut.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kesenjangan ekonomi yang semakin besar di Kabupaten Bangka dan dari tiga kawasan wilayah di Kabupaten Bangka, maka kawasan barat yang terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Bakam, Puding Besar, dan Mendo Barat merupakan kecamatan yang paling terbelakang.

Seperti yang terjadi pada beberapa kota tambang lainnya, maka sangat penting memperhatikan dan mempersiapkan perubahan struktur ekonomi sejak awal dengan memperhatikan potensi ekonomi lokal, kondisi regional dan kebijakan nasional hingga dapat dihasilkan suatu strategi pengembangan wilayah yang dapat mewadahi aktifitas perekonomian guna mengantisipasi kesenjangan wilayah.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Brotosunaryo dan Bapak M..Mukti Ali yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama proses pembimbingan. Terima kasih juga terhadap seluruh staf MPWK Univesitas Diponegoro serta seluruh dosen serta para rekan yang selalu memberikan bantuan dan dukungan. Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada pengelola terutama sekali Prof. Sugiono Soetomo yang telah memberikan ilmunya kepada kami.

Akhirnya semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada setiap orang yang membutuhkannya. Kritik serta saran atas kelemahan dan kekurangan tesis ini penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, September 2006  
Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Penelitian .....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2. Sasaran Penelitian .....	5
1.3.3. Manfaat Penelitian .....	6
1.4. Ruang Lingkup .....	6
1.4.1. Ruang Lingkup Substansial .....	6
1.4.2. Ruang Lingkup Spasial .....	7
1.5. Kerangka Pemikiran .....	10
1.6. Pendekatan dan Metoda Penelitian .....	12
1.6.1. Pendekatan Penelitian .....	12
1.6.2. Metoda Penelitian .....	14
1.6.3. Kebutuhan Data .....	15
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data .....	15
1.6.5. Metoda dan Alat Analisis .....	15
1.6.5.1. Analisis Skalogram Guttman.....	16
1.6.5.2. Analisis Wilayah Pengaruh .....	17
1.6.5.3. Location Quotient Analyse.....	18
1.6.5.4. Shift Share Analyse .....	20
BAB II. KAJIAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH .....	25
2.1. Pengembangan Wilayah .....	25
2.2. Struktur Ruang Wilayah .....	27
2.3. Sistem Hirarki Kota .....	30
2.4. Teori lokasi .....	32
2.5. Pengembangan Prasarana Wilayah .....	33
2.6. Strategi Pengembangan Ekonomi Wilayah.....	36
2.7. Strategi Pengembangan Kewilayahan .....	41
2.7.1. Paradigma Development from Above School .....	41

2.7.2.	Growth Pole .....	41
2.7.3.	Paradigma Development from Below School .....	42
2.7.4.	Teori Tempat Pusat .....	43
2.7.5.	Agropolitan .....	44
BAB III.	KAJIAN UMUM KABUPATEN BANGKA DAN KAWASAN BARAT KABUPATEN BANGKA .....	46
3.1.	Kajian Umum Kabupaten Bangka .....	46
3.1.1.	Geografi dan Luas Wilayah .....	46
3.1.2.	Keadaan Alam dan Pemerintahan .....	46
3.1.3.	Sosial dan Kependudukan .....	47
3.1.4.	Perekonomian .....	48
3.1.5.	Tata Ruang Kabupaten Bangka .....	51
3.2.	Kajian Umum Kawasan Barat Kabupaten Bangka .....	54
3.2.1.	Penduduk dan Wilayah .....	54
3.2.2.	Pemerintahan dan Sosial Budaya .....	54
3.2.3.	Perekonomian dan Kesenjangan Wilayah .....	54
3.2.4.	Fasilitas dan Infrastruktur .....	57
BAB IV.	ANALISIS DAN ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN BARAT KABUPATEN BANGKA .....	59
4.1.	Analisis Hirarki Kota dan Wilayah Pengaruh .....	59
4.1.1.	Analisis Skalogram Guttman .....	59
4.1.2.	Analisis Gravitasi .....	61
4.1.2.1.	Kecamatan Bakam .....	66
4.1.2.2.	Kecamatan Puding Besar .....	67
4.1.2.3.	Kecamatan Mendo Barat .....	68
4.2.	Analisis Aktivitas Ekonomi .....	69
4.2.1.	Analisis <i>Location Quotient</i> .....	69
4.2.2.	Analisis <i>Shift Share</i> .....	81
4.3.	Analisis Pengembangan Kawasan Barat Kab.Bangka.....	90
4.4.	Arahan Pengembangan Kawasan Barat Kab.Bangka ...	94
4.4.1.	Daya Dukung Kecamatan Dalam Pengembangan Kawasan Barat .....	94
4.4.2.	Arahan Pengembangan Sarana Prasarana Wilayah ..	99
4.4.3.	Arahan Pengembangan Sektor Usaha .....	101
4.5.	Rumusan Hasil Kajian .....	110
BAB V.	P E N U T U P.....	114
5.1.	Kesimpulan .....	114
5.2.	Rekomendasi .....	115

DAFTAR PUSTAKA.  
LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

TABEL I.1	: PDRB dan Pendapatan Perkapita Kawasan Utara, Selatan, dan Kawasan Barat tahun 2000 – 2004 .....	3
TABEL I.2	: Data Sekunder yang Dianalisis dalam Penelitian .....	15
TABEL I.3	: Kerangka Teknik Analisis.....	24
TABEL III.1	: Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk 2004 serta Jarak ke Ibukota Kabupaten .....	46
TABEL III.2	: Komposisi Penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2004 .....	47
TABEL III.3	: Fasilitas Publik di Kabupaten Bangka 2004.....	48
TABEL III.4	: Luas Tanam Komoditas Utama Perkebunan di Kab.Bangka 2004 .....	49
TABEL III.5	: PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2000 dan 2004 ADHK tahun 2000 (juta Rupiah) .....	49
TABEL III.6	: Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bangka .....	52
TABEL III.7	: Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Kecamatan Bakam Tahun 2000-2004 (%).....	55
TABEL III.8	: Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Kecamatan Puding Besar Tahun 2000-2004 (%) .....	55
TABEL III.9	: Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Kec. Mendo Barat Tahun 2000-2004 (%).....	56
TABEL III.10	: Kontribusi PDRB Kab. Bangka ADHK antar Kawasan....	56
TABEL III.11	: PDRB dan Pendapatan per Kapita Kab. Bangka 2000-2004	56
TABEL III.12	: Fasilitas Publik di Kawasan Barat Kabupaten Bangka 2004	57
TABEL III.13	: Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Barat Bangka 2004 .....	58
TABEL IV.1	: Bobot Sentralitas Kecamatan di Kabupaten Bangka 2006	59
TABEL IV.2	: Breaking Point Kota-Kota Kecamatan di Kab.Bangka (km) 2004 .....	62
TABEL IV.3	: Indek Gravitasi Antar Kecamatan di Kab. Bangka 2004 ..	63
TABEL IV.4	: Sebaran Sektor Ekonomi Basis tahun 2004 di Kabupaten Bangka .....	70
TABEL IV.5	: Sektor/Subsektor Basis di Kawasan Barat Kab.Bangka 2004 .....	75
TABEL IV.6	: Sektor/sub sektor Basis di Kecamatan Bakam (Kawasan Barat) .....	76
TABEL IV.7	: Sektor/sub sektor Basis di Kecamatan Puding Besar (Kawasan Barat) .....	77
TABEL IV.8	: Sektor/sub sektor Basis di Kecamatan Mendo Barat (Kawasan Barat).....	79
TABEL IV.9	: Lokasi Sektor/sub sektor Basis di Kawasan Barat 2004....	80
TABEL IV.10	: SSA Kab.Bangka Tahun 2000-2004 ADHK 2000 .....	83
TABEL IV.11	: SSA Kawasan Barat Kab.Bangka 2000-2004 ADHK 2000	83
TABEL IV.12	: Sektor/Subsektor Unggul Kawasan Barat 2004 .....	84
TABEL IV.13	: Sektor/Subsektor Agak Unggul Kawasan Barat 2004 .....	84

TABEL IV.14 : Sektor/Subsektor Unggul Kecamatan Bakam (Kawasan Barat) 2004 .....	86
TABEL IV.15 : Sektor/Subsektor Unggul Kecamatan Puding Besar (Kawasan Barat) 2004.....	86
TABEL IV.16 : Sektor/Subsektor Unggul Kecamatan Mendo Barat .....	87
TABEL IV.17 : Lokasi Sektor/Subsektor Unggul Kawasan Barat Tahun 2004 .....	90
TABEL IV.18 : Indeks Williamson Kabupaten Bangka Tahun 2002-2004.	91
TABEL IV.19 : Sektor <i>leading</i> di Kawasan Barat Kabupaten Bangka 2004	102
TABEL IV.20 : Sektor Potensial di Kawasan Barat Kabupaten Bangka 2004 .....	103
TABEL IV.21 : Sektor <i>leading</i> di Kecamatan Bakam (Kawasan Barat) 2004 .....	104
TABEL IV.22 : Sektor <i>leading</i> di Kecamatan Puding Besar (Kawasan Barat) 2004.....	104
TABEL IV.23 : Sektor <i>leading</i> di Kecamatan Mendo Barat (Kawasan Barat) 2004.....	104
TABEL IV.24 : Lokasi Sektor <i>leading</i> Kawasan Barat Tahun 2004.....	106

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1.	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bangka .....	8
GAMBAR 1.2.	Peta Ruang lingkup Spasial Studi Arah Pengembangan Kawasan Barat Kabupaten Bangka .....	9
GAMBAR 1.3.	Kerangka Pemikiran Arah Pengembangan Kawasan Barat Kab. Bangka .....	13
GAMBAR 1.4.	Kerangka Analisis Arah Pengembangan Kawasan Barat Kabupaten Bangka.....	23
GAMBAR 2.1.	Gambaran Ideal Satuan Wilayah Pengembangan.....	28
GAMBAR 2.2.	Pengaruh Biaya Transportasi Produk dari Berbagai Lokasi ke Pasar Terhadap <i>Land Rent</i> .....	33
GAMBAR 2.3.	Persebaran Keruangan.....	36
GAMBAR 2.4.	Tahapan Pembentukan Wilayah Pemasaran .....	43
GAMBAR 3.1.	Hutan di Kabupaten Bangka .....	52
GAMBAR 3.2.	Peta Kawasan Budidaya .....	53
GAMBAR 4.1.	Peta Orde Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Bangka .	60
GAMBAR 4.2.	Peta Wilayah Pengaruh Sungailiat dan Belinyu.....	64
GAMBAR 4.3.	Peta Interaksi Wilayah Antar Kecamatan di Kawasan Barat Kabupaten Bangka .....	65
GAMBAR 4.4.	Perkebunan Lada di Kawasan Barat .....	71
GAMBAR 4.5.	Perkebunan Sawit di Kawasan Barat .....	71
GAMBAR 4.6.	Perkebunan Karet Rakyat di Kawasan Barat .....	73
GAMBAR 4.7.	Peta Sektor Basis di Kawasan Barat Kabupaten Bangka 2004.....	82
GAMBAR 4.8.	PS - DS Kawasan Barat Tahun 2004 .....	85
GAMBAR 4.9.	Peta Sektor/Sub Sektor Unggul di Kawasan Barat Kabupaten Bangka 2004.....	89
GAMBAR 4.10.	Industri Pengolahan Getah Karet di Mendo Barat .....	107
GAMBAR 4.11.	Peta Sektor/Subsektor <i>leading</i> di Kawasan Barat Kabupaten Bangka 2004 .....	108
GAMBAR 4.12.	Peta Satuan Wilayah Pengembangan Baru Kabupaten Bangka .....	109

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	PDRB Kab.Bangka Tahun 2000 dengan Timah ADHK Tahun 2000 (juta rp) .....	123
Lampiran 2	:	PDRB Kab.Bangka Tahun 2004 dengan Timah ADHK Tahun 2000 (juta rp) .....	126
Lampiran 3	:	Scalogram Gutmann Berdasarkan Penduduk dan Fasilitas Publik di Kabupaten Bangka 2004 .....	129
Lampiran 4	:	Indeks Sentralitas Terbobot Kabupaten Bangka 2004.....	132
Lampiran 5	:	Perkembangan LQ Kab.Bangka 2000-2004 Berdasarkan PDRB dengan Timah ADHK 2000.....	135
Lampiran 6	:	Perkembangan LQ Kawasan Barat 2000-2004 Berdasarkan PDRB dengan Timah ADHK 2000 .....	137
Lampiran 7	:	Perkembangan LQ Tiga Kecamatan di Kawasan Barat 2000-2004 Berdasarkan PDRB dengan Timah ADHK 2000 .....	139
Lampiran 8	:	Analisis Prospek SS Kecamatan-Kecamatan di Kab Bangka Tahun 2000 – 2004 .....	141
Lampiran 9	:	Analisis Prospek SS Kawasan Barat di Kab Bangka Tahun 2000 – 2004 .....	143
Lampiran 10	:	PS - DS Tiga Kecamatan di Kawasan Barat Kabupaten Bangka 2004 .....	146
Lampiran 11	:	Kecamatan Shift (Regional Shift) 2000-2004 dengan Timah ADHK 2000 (juta Rp).....	149

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Glasson (1977:4) mengungkapkan tujuan perencanaan wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ghalib (2005:165) mengemukakan sasaran pembangunan ekonomi jangka panjang adalah terjadinya perubahan struktur ekonomi wilayah. Djojohadikusumo (1994:160) juga mengemukakan perkembangan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses transisi yang ditandai dengan transformasi multidimensional dan berkaitan dengan perubahan struktur ekonomi.

Salah satu dampak dari pembangunan adalah timbulnya kesenjangan-kesenjangan (Tambunan, 2003 : 84). Strategi dalam aktifitas ekonomi dan keruangan yang membagi wilayah Kabupaten Bangka menjadi 2 satuan wilayah pengembangan, yaitu SWP utara dan SWP selatan ternyata belum mampu mengeliminasi kesenjangan wilayah yang ada. Kesenjangan pembangunan di Kabupaten Bangka juga terlihat dengan ditetapkannya Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Belinyu sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang terletak di kawasan selatan dan utara Kabupaten Bangka.

Ketertinggalan kawasan tidak terlepas dari strategi pembangunan yang berdasarkan hirarki. Kawasan belakang masih merupakan kawasan yang dilayani oleh pusat pertumbuhan. Artinya kawasan belakang yang berada dalam keadaan tertinggal belum menjadi kawasan prioritas pembangunan.

Kawasan barat memiliki sumber daya alam dan sumber daya lahan yang masih cukup besar untuk dikembangkan. Kabupaten Bangka belum secara rinci menjabarkan struktur tata ruang kabupaten termasuk kawasan barat. Kelengkapan produk perencanaan tata ruang belum didukung oleh rencana rinci tata ruang serta rencana-rencana pengembangan ibukota kecamatan dan kawasan.

Perencanaan pembangunan yang hanya berorientasi pada jumlah penduduk bukan berdasarkan potensi yang dimiliki, seharusnya ditinggalkan guna mengurangi kesenjangan (Hamid. ed, 2001 : 4) kawasan barat yang jumlah penduduknya relatif masih jarang. Keteringgalan kawasan barat dibandingkan dengan kawasan utara-selatan Kabupaten Bangka, nampak dalam ketersediaan fasilitas umum dan prasarana wilayah. Keterbatasan infrastruktur ini menyebabkan perkembangan kawasan ini lebih rendah dibandingkan dengan kawasan selatan dan utara.

*Income* perkapita rata-rata kawasan barat yang mencakup kecamatan Bakam, Puding Besar, dan Mendo Barat menduduki peringkat terendah dibandingkan dengan kawasan lainnya di Kabupaten Bangka. (Tabel I.1). Kabupaten Bangka juga mengalami kesenjangan pendapatan menurut kecamatan (Tabel III.11). PDRB per kapita tahun 2004 atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa Kecamatan Mendo Barat dan Puding Besar merupakan kecamatan yang memiliki pendapatan perkapita paling rendah dan keduanya berada di kawasan barat. Rendahnya PDRB/perkapita yang diikuti dengan rendahnya sarana prasarana wilayah dibandingkan dengan kawasan utara dan selatan menunjukkan adanya kesenjangan wilayah. Pendapatan perkapita seperti ini menunjukkan kurang adanya pemerataan pendapatan yang ditunjukkan

dengan meningkatnya Indek Williamson dari 0,18 pada tahun 2002 menjadi 0,23 pada tahun 2004.

Profesor Myrdal dalam Jhingan (2004:212) mengemukakan tanpa intervensi kebijakan, maka semua aktifitas ekonomi akan mengelompok di wilayah-wilayah tertentu saja dan meninggalkan wilayah lain. Migrasi ke pusat pengembangan, perpindahan modal yang cenderung menyedot tabungan dari daerah lebih miskin, dan perdagangan cenderung meningkatkan ketimpangan.

Tabel I.1.  
PDRB dan Pendapatan Perkapita Kawasan utara, Selatan,  
dan Kawasan Barat Tahun 2000 – 2004 (juta rupiah)

TAHUN	PDRB PERKAPITA ADHK			PENDAPATAN PERKAPITA ADHK		
	K.Selatan	K.Utara	K.Barat	K.Selatan	K.Utara	K.Barat
2000	4.331.289	5.661.792	4.724.317	3.458.308	4.520.646	3.772.120
2001	4.523.149	5.897.795	4.928.495	3.589.462	4.680.349	3.911.135
2002	4.714.156	5.949.482	5.043.742	3.739.281	4.719.145	4.000.709
2003	5.295.316	5.978.382	5.081.324	4.281.113	4.833.353	4.108.107
2004	5.376.871	6.185.817	5.151.053	4.347.048	5.001.059	4.164.480

Sumber: Bapeda Bangka 2006

Aktifitas ekonomi di kawasan barat masih bertumpu pada sektor/subsektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Faktor jarak yang lebih dekat serta aksesibilitas yang lebih mudah, menyebabkan interaksi penduduk lebih mengarah ke Pangkal Pinang dibandingkan ke Sungailiat. Kawasan barat Kabupaten Bangka memiliki infrastruktur ekonomi yang masih tertinggal, serta kondisi geografis berupa sempadan sungai. Dampak dari kondisi ini adalah nilai tambah dari aktifitas tersebut lebih banyak diperoleh masyarakat Pangkal Pinang.

Penyebaran penduduk yang tidak merata serta paradigma pembangunan yang masih berdasarkan pada jumlah penduduk, akan berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia, dinamika masyarakat, keadaan ekonomi masyarakat, sarana prasarana wilayah, interaksi penduduk, pengembangan pariwisata, serta

lingkungan hidup suatu kawasan.

Berdasarkan pada fenomena yang dijelaskan di atas, maka menjadi sangat menarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam, guna mengembangkan kawasan barat Kabupaten Bangka, dengan topik arahan pengembangan ekonomi kawasan barat Kabupaten Bangka.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dengan dimekarkannya Kabupaten Bangka (UU nomor 5 tahun 2003), maka kawasan barat Bangka menjadi kawasan yang berbatasan langsung dengan kabupaten baru dan kota Pangkal Pinang. Dalam kondisi seperti ini, jika Kabupaten Bangka dibagi kedalam tiga kawasan; yaitu kawasan utara yang terdiri dari Kecamatan Belinyu dan Riau Silip; Kawasan selatan yang terdiri dari Kecamatan Sungailiat, Pemali, dan Merawang; serta kawasan barat yang terdiri dari Kecamatan Bakam, Puding Besar, dan Mendo Barat, maka Kabupaten Bangka menghadapi kesenjangan pendapatan per kapita, ketersediaan sarana prasarana wilayah, dan pengembangan perekonomian.

Permasalahan kesenjangan bukan hanya dilihat dari kesenjangan pendapatan, ekonomi dan aksesibilitas saja. Kesenjangan dapat juga dilihat dari keberadaan fasilitas sosial, umum dan fasilitas komunikasi. Kesenjangan-kesenjangan yang timbul tidak terlepas dari konsep pengembangan yang diterapkan dalam pembangunan, konsep tata ruang yang disusun, interaksi sosial ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Dari data dan informasi di atas dapat dinyatakan, bahwa Bangka menghadapi disparitas dan kawasan barat merupakan kawasan yang paling

tertinggal. Dengan kondisi potensi lahan yang masih sangat luas serta penduduk yang relatif masih sedikit dibandingkan dengan kawasan Utara dan Selatan, maka kawasan ini masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka secara spesifik dapat dirumuskan bahwa kebijakan pengembangan wilayah di Kabupaten Bangka belum mampu mengembangkan kawasan barat guna mengeliminasi disparitas wilayah dengan kawasan utara dan selatan, sementara potensi yang dimilikinya cukup besar.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian; yaitu *Bagaimanakah Arahan Pengembangan Kawasan Barat Kabupaten Bangka Guna Mengeliminasi Kesenjangan Wilayah yang terjadi?*

### **1.3. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji dan menyusun arahan pengembangan fisik, ekonomi, dan keruangan wilayah kawasan barat Kabupaten Bangka berdasarkan pada potensi wilayah guna mengeliminasi disparitas wilayah dengan kawasan utara dan selatan.

#### **1.3.2. Sasaran Penelitian**

Sasaran yang ingin dicapai guna mewujudkan tujuan studi ini adalah:

- a. Menginventarisasi struktur ruang kawasan barat Kabupaten Bangka.
- b. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang bisa dikembangkan dan menjadi stimulan perkembangan perekonomian kawasan barat Kabupten Bangka.

- c. Menganalisis, dan merumuskan ruang fisik, perekonomian, dan pengembangan wilayah kawasan barat Kabupaten Bangka.
- d. Merekomendasikan arah kebijakan pembangunan struktur ruang, perekonomian, dan pengembangan wilayah kawasan barat Kabupaten Bangka sebagai implikasi pengembangan sektor/sub sektor basis yang memiliki keuntungan kompetitif untuk dikembangkan.

### **1.3.3 Manfaat Penelitian**

1. Bagi masyarakat Bangka khususnya dan Kepulauan Bangka Belitung umumnya, dapat menambah wawasan mengenai pentingnya struktur ruang dan perekonomian ke depan sebagai arahan pengembangan wilayah suatu kawasan.
2. Bagi pemerintah, studi ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam menyusun kebijakan struktur ruang dan perekonomian.
3. Bagi ilmu pengetahuan merupakan informasi mengenai signifikansi struktur ruang sebagai wujud intervensi spasial dalam pengembangan wilayah.

## **1.4. Ruang Lingkup**

### **1.4.1. Ruang Lingkup Substansial**

Ruang lingkup substansial yang bertujuan untuk membatasi materi pembahasan yang berkaitan dengan identifikasi wilayah. Studi ini memfokuskan pada permasalahan pengembangan kawasan barat Bangka guna mengantisipasi disparitas wilayah dengan kawasan utara dan selatan Bangka. Agar didapat

pemahaman yang sama maka penulis memfokuskan pada ruang fisik dan perekonomian kawasan barat Kabupaten Bangka.

Beberapa istilah yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

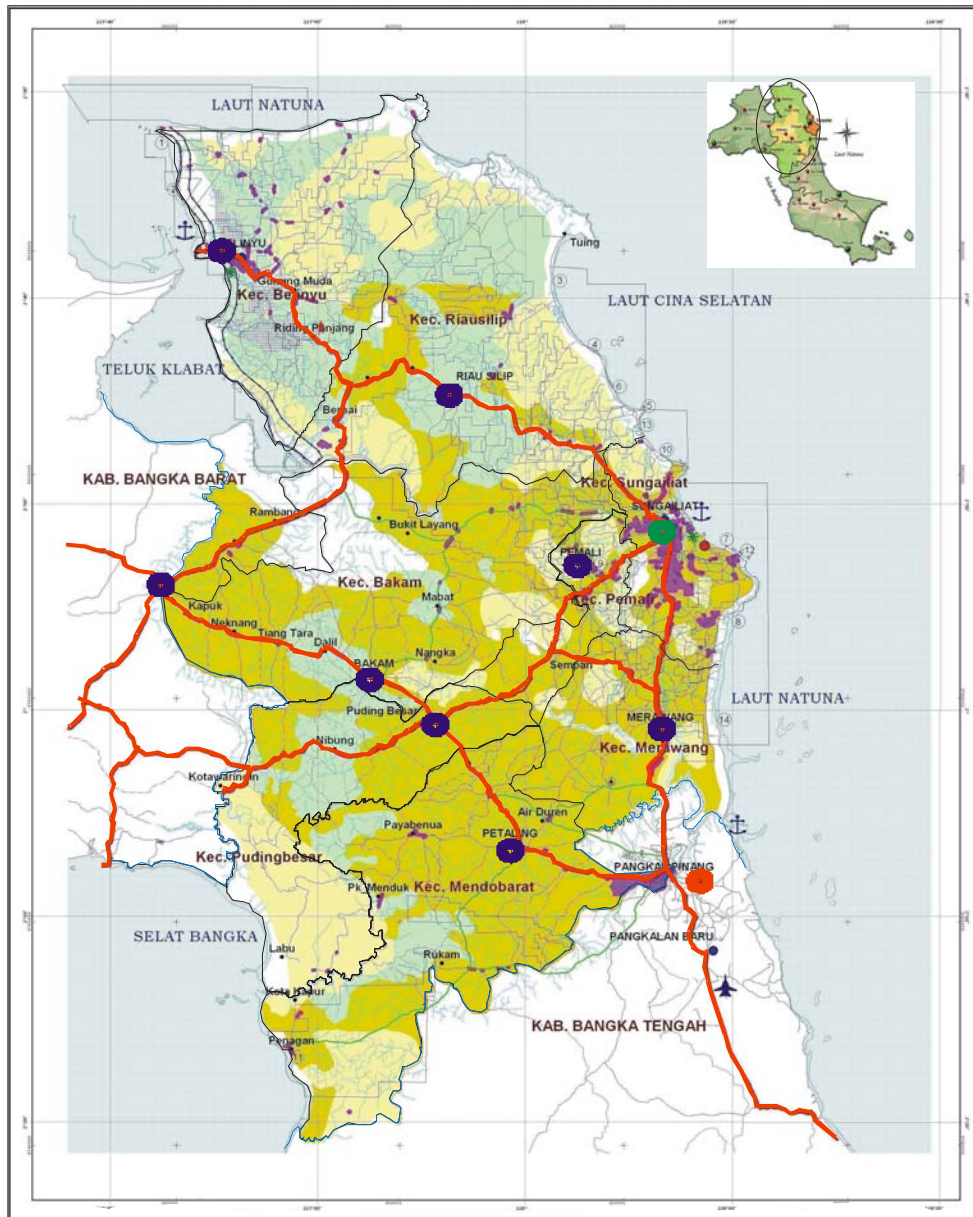
1. Arahan Pengembangan adalah pedoman dalam sikap dan perilaku berdasarkan analisis yang telah dilakukan guna mengembangkan wilayah melalui pengembangan sektoral maupun pengembangan wilayah.
2. Sektor Basis adalah sektor usaha yang nilai analisis LQnya lebih besar dari satu.
3. Sektor Unggul/agak unggul adalah sektor usaha yang dikelompokkan berdasarkan positif dan negatif nilai PS dan DS pada analisis *Shift Share*.
4. Sektor *Leading* adalah sektor usaha yang memiliki nilai LQ lebih besar dari satu dan nilai DS positif.

#### **1.4.2. Ruang Lingkup Spasial**

Studi ini dilakukan di 3 kecamatan yang terletak di kawasan barat Kabupaten Bangka, yaitu suatu kawasan yang dilalui oleh jalur transportasi darat di sebelah barat Kabupaten Bangka. Kawasan ini terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Mendo Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dipilihnya kawasan barat karena kawasan ini merupakan kawasan yang paling tertinggal dibandingkan kawasan utara dan selatan Bangka baik dari pendapatan perkapita dan prasarana wilayah.

Ruang lingkup spasial Kabupaten Bangka dan kawasan barat Kabupaten Bangka dapat dilihat pada gambar 1.1 dan 1.2.



PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG 2006

TESIS  
ARAHAN PENGEMBANGAN  
KAWASAN BARAT  
KABUPATEN BANGKA

PETA  
WILAYAH ADMINISTRASI  
KABUPATEN BANGKA

- LEGENDA
- BAWAS KE CAMATAN
  - BAWAS KABUPATEN
  - JALAN PROPINSI
  - JALAN KABUPATEN
  - PEMUKIMAN
  - IBUKOTA PROPINSI
  - IBUKOTA KABUPATEN
  - IBUKOTA KECAMATAN

UTARA



SKALA

1 : 175.000

NOMOR HALAMAN : 8

NOMOR GAMBAR : 1.1

SUMBER :  
BAFEDA BANGKA



PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SEMARANG 2006

**TESS**  
**ARAHAN PENGEMBANGAN**  
**KAWASAN BARAT KABUPATEN BANGKA**

PETA RUANG LINGKUP SPASIAL STUDI  
ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN BARAT  
KABUPATEN BANGKA

- LEGENDA**
- BATAS KECAMATAN
  - JALAN LOKAL
  - JALAN KABUPATEN
  - JALAN PROPINSI
  - FEMUKIMAN
  - IBUKOTA PROPINSI
  - IBUKOTA KABUPATEN
  - IBUKOTA KECAMATAN

**UTARA**

SKALA  
1 : 175.000

NOMOR HALAMAN : 9

NOMOR GAMBAR : 1.2

SUMBER :  
BAFEDA BANGKA

### 1.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran kajian terhadap Kabupaten Bangka yang difokuskan pada arahan pengembangan kawasan barat adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Bangka yang terdiri dari 8 kecamatan menghadapi masalah kesenjangan pembangunan antar wilayah, pendapatan antar kecamatan, dan kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antar kecamatan.
2. Memperhatikan kondisi di atas, dapat diartikan bahwa Kabupaten Bangka menghadapi disparitas wilayah dan kawasan barat merupakan kawasan yang paling tertinggal dibandingkan dengan kawasan lain di Kabupaten Bangka. Kawasan barat juga menghadapi keterbatasan sarana prasarana wilayah serta fenomena orientasi aktifitas kawasan yang cenderung lebih tertarik ke Pangkal Pinang.
3. Dapat dirumuskan bahwa kebijakan pengembangan wilayah sekarang ini belum mampu mengeliminasi kesenjangan wilayah yang terdapat di kawasan barat dibandingkan dengan perkembangan yang terjadi di kawasan utara-selatan.
4. Permasalahan di atas menjadi dasar penelitian ini, dengan tujuan untuk mengkaji arahan pengembangan kawasan barat Kabupaten Bangka. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah menginventarisasi kebijakan struktur ruang kawasan barat; mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan dan menjadi stimulan perkembangan perekonomian kawasan barat; menganalisis, dan merumuskan ruang fisik, perekonomian, dan pengembangan wilayah kawasan barat; serta

merekomendasi arah kebijakan pembangunan struktur ruang, perekonomian, dan pengembangan wilayah Kawasan Barat.

5. Kondisi kawasan barat Bangka yang mengalami ketertinggalan ini diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam bentuk penetapan pembagian Wilayah Pengembangan dan orde kota serta pembangunan yang berbasis kewilayahan.
6. Struktur ruang dan rumusan permasalahan yang telah teridentifikasi dan terinventarisasi digunakan untuk mengkaji dinamika pengembangan kawasan barat, sarana dan prasarana wilayah, serta mengkaji kinerja perekonomian daerah di kawasan barat Bangka.
7. Hasil kajian tersebut melahirkan suatu pertanyaan penelitian *Bagaimanakah Arah Pengembangan Kawasan Barat Kabupaten Bangka Guna Mengeliminasi Kesenjangan Wilayah yang terjadi ?*
8. Kajian pustaka membahas teori-teori pengembangan wilayah, teori lokasi, serta teori-teori tentang ruang fisik dan ekonomi. Selanjutnya kajian wilayah Kabupaten Bangka dan kawasan barat Bangka digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang ruang lingkup spatial untuk mendukung latar belakang permasalahan yang meliputi potensi wilayah, daya dukung lingkungan.
9. Objek yang akan dianalisis adalah ruang fisik dan perekonomian kawasan barat Kabupaten Bangka yang terdiri dari tiga kecamatan dengan menggunakan metoda analisis Skalogram Gutmann dan model gravitasi guna mengetahui sistem hirarki kota dan wilayah pengaruh dari tiap kota kecamatan. Alat lain yang digunakan adalah Analisis

*Location Quotient* dan *Analisis Shift Share* untuk menganalisis perekonomian dan mengetahui sektor/sub sektor ekonomi basis dan kinerja perekonomian wilayah.

10. Analisis pengembangan kawasan barat Bangka dilakukan untuk mengetahui arah kebijakan yang telah diambil terhadap kawasan tersebut. Hasil analisis pengembangan kawasan dan hasil analisis terhadap ruang fisik dan perekonomian kawasan barat Bangka, adalah berupa arahan pengembangan kawasan barat Kabupaten Bangka, dan dari arahan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan dan rekomendasi guna menjawab permasalahan yang dihadapi oleh kawasan barat.

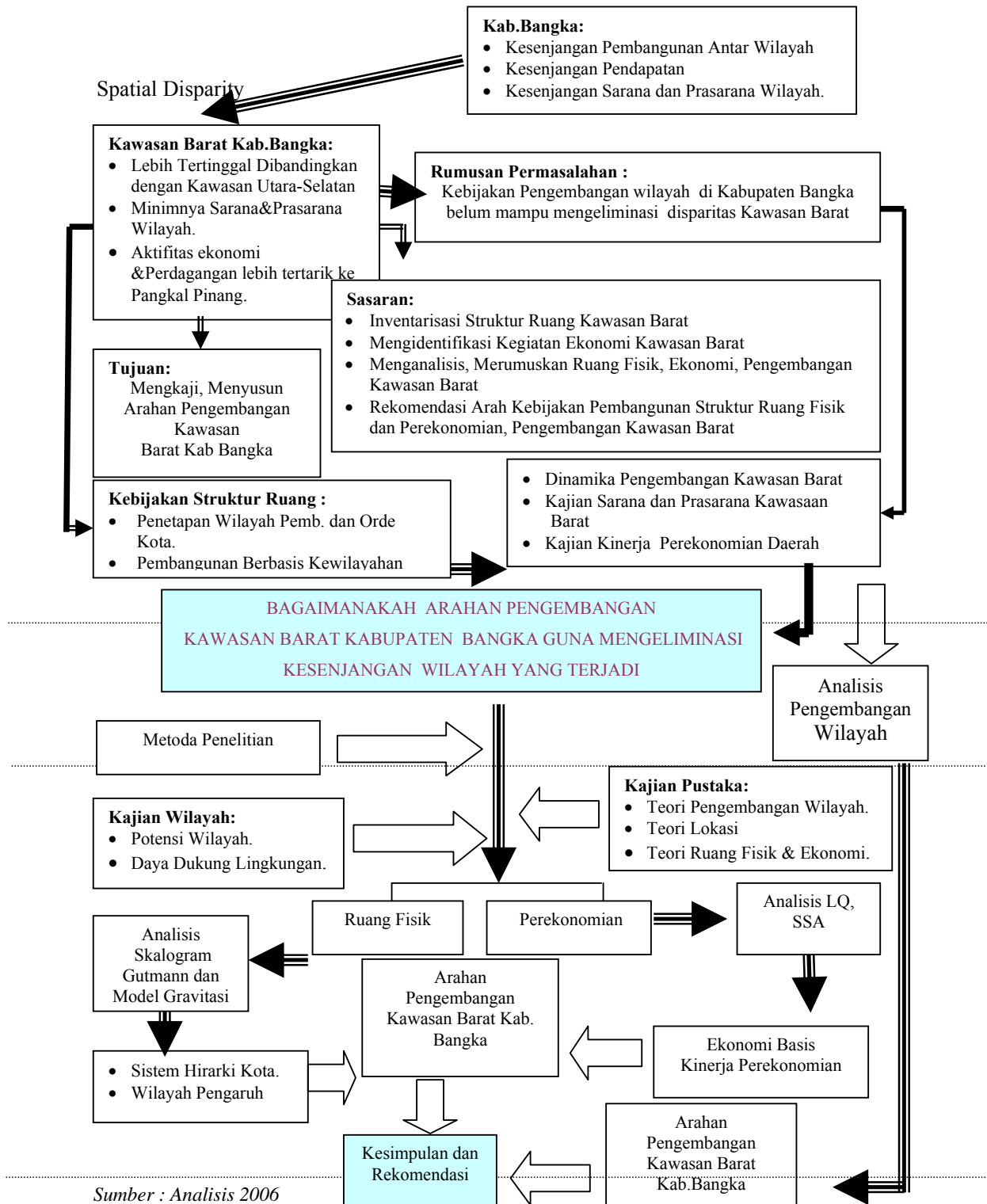
Skema kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.3

## **1.6. Pendekatan dan Metoda Penelitian**

### **1.6.1. Pendekatan Penelitian**

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda kualitatif dengan paradigma kuantitatif (terukur, empiri sensual, dan logika matematika (Noeng Muhajir, 2000:13-33)) yang mengarah kepada pendekatan positivisme logik, yaitu kevalidan yang dibangun dari empiri yang bergerak dari fenomena ke generalisasi dan dikembangkan ke dalam logika matematik dan logika induktif.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu arahan pengembangan kawasan barat Kabupaten Bangka yang berlandaskan pada pengembangan potensi wilayah dan pengembangan fasilitas. Selanjutnya variabel tersebut akan dianalisis dengan menggunakan analisis, Skalogram Gutmann, hirarki kota, dan analisis aktifitas kegiatan ekonomi, serta analisis pengembangan wilayah.



Gambar 1.3.  
Kerangka Pemikiran Arahkan Pengembangan Kawasan Barat Kab. Bangka

Berangkat dari permasalahan kesenjangan pembangunan antar wilayah, kesenjangan pendapatan, sarana prasarana di Kabupaten Bangka dan diikuti dengan tertinggalnya kawasan barat Bangka dibandingkan dengan kawasan utara-selatan, rendahnya jumlah sarana dan prasarana wilayah, serta aktifitas ekonomi dan perdagangan kawasan tersebut yang lebih tertarik ke Pangkal Pinang, maka data-data yang terkumpul diolah dengan logika matematika dan logika induktif hingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan dalam pembahasannya adalah pendekatan basis ekonomi (*economic based approach*). Pendekatan basis ekonomi adalah pendekatan yang digunakan untuk menentukan sektor maupun komoditi yang pemasarannya menjangkau luar daerah maupun luar negeri (Tambunan, 2003), sehingga sektor/komoditi ini dapat dijadikan sebagai strategi dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Bangka.

### **1.6.2. Metoda Penelitian**

Penelitian yang akan mengemukakan permasalahan pengembangan ruang fisik dan perekonomian kawasan barat Bangka ini, merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata atau lisan yang dapat diamati. Penelitian ini mengembangkan pemahaman terhadap fenomena-fenomena sosial yang dilakukan dengan menjangkau informasi dari permasalahan yang ada pada objek penelitian dan dihubungkan dengan pemecahan permasalahan yang ditinjau dari kajian teoritis maupun empiris.

Metoda kualitatif yang digunakan dilengkapi dengan metoda kuantitatif yang didapatkan dari kegiatan pengumpulan data sekunder yang bersifat instansional dan didukung oleh data primer yang didapatkan dari hasil kunjungan ke lokasi sektor/sub sektor hasil analisis.

### 1.6.3. Kebutuhan Data

Dalam penelitian ini dibutuhkan data sekunder sebagai bahan analisis utama dan data primer guna mendukung hasil analisis. (Tabel.I.2).

Tabel I.2.  
Data Sekunder yang Dianalisis Dalam Penelitian

Jenis Data	Kegunaan	Sumber	T.Analisis	Tahun
Potensi	Mengetahui potensi/kebijakan pengembangan perekonomian	Bapeda Dinas Instansi lain	Deskriptif	2004 2006
Produk Kebijakan Kabupaten Bangka	Mengetahui arah kebijakan pemda Bangka	Bapeda	Deskriptif	2006
PDRB Bangka	Analisis ekonomi basis	Bapeda	LQ/SSA	2000- 2004
Sarana dan Prasarana Wilayah	Analisis hirarki dan penyebarannya	Bapeda	Skalogram	2004
Kependudukan/jarak kota	Wilayah pengaruh	Bapeda	Gravitasi	2004/ 2006

### 1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder dalam penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber instansi Pemerintah Kabupaten Bangka. Data primer dilakukan dengan mengunjungi objek-objek yang diperlukan.

### 1.6.5. Metoda dan Alat Analisis

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini; yaitu untuk mengkaji arahan pengembangan ekonomi kawasan barat Kabupaten Bangka dengan

berdasarkan pada potensi wilayah, maka metoda dan alat analisis yang digunakan adalah :

#### **1.6.5.1. Analisis Skalogram Gutmann**

Untuk menyusun strategi perencanaan yang berdasarkan pada ketersediaan fasilitas dan utilitas kota digunakan Analisis Skalogram Gutmann yang merupakan analisis untuk menyusun kota sesuai dengan hirarkinya. Dalam analisis ini orde kota didasarkan atas faktor-faktor yang berpengaruh, yaitu jumlah penduduk masing-masing ibukota kecamatan, jumlah fasilitas yang dimiliki dan tingkat aksesibilitas kota tersebut terhadap kota terdekat yang memiliki orde lebih tinggi (Tarigan, 2004 : 157).

Data yang terkumpul dimasukkan ke dalam matriks skalogram dan dengan metoda Indeks Sentralitas Terbobot jumlah dari masing-masing data tersebut dipersentase menurut jenis dan jumlahnya dalam satu kabupaten. Persentase setiap data di tiap kecamatan dijumlahkan dan hasil dari penjumlahan tiap kecamatan tersebut dibandingkan dengan hasil yang didapat oleh kecamatan lain untuk menentukan rangking kecamatan.

Untuk menentukan orde/hirarki kecamatan, maka langkah pertama adalah menentukan jumlah kelas yang ingin ditetapkan. Selanjutnya skor tertinggi yang didapatkan oleh satu kecamatan dikurangi skor terendah yang didapatkan oleh kecamatan yang lain dibagi dengan jumlah kelas. Hasil ini merupakan interval kelas dan dengan demikian, skor setiap kecamatan dapat dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok kelas tersebut. Selanjutnya orde/hirarki kecamatan dapat diperoleh hasilnya.

### 1.6.5.2. Analisis Wilayah Pengaruh

Potensi wilayah dapat menjadi daya tarik tersendiri dan memberi pengaruh pada wilayah sekelilingnya. Teori ini untuk melihat potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut. Teori ini dapat berfungsi sebagai teori lokasi maupun sebagai alat dalam perencanaan (Tarigan, 2004 : 139)

Menurut H.W. Richardson tentang struktur tata ruang kota, aktifitas usaha perdagangan lebih tinggi di pusat kota daripada zona-zona pinggiran dan akan meningkat lagi pada lokasi dengan radius lebih dari 20 mil. Wilayah pengaruh pusat kota terhadap wilayah pinggirannya sangat dipengaruhi oleh jarak kedua kota tersebut dan jumlah penduduknya (Ghalib, 2005:110). Pendekatan yang seperti ini disebut model *gravity* yang dikenal sebagai teori *Relly's Law of Retail Gravitation*. Dengan metoda ini batas-batas pengaruh suatu kota terhadap kota lain dapat diketahui khususnya untuk kegiatan perdagangan eceran (Tarigan, 2004 : 153).

Untuk mengukur batas wilayah pengaruh suatu kota terhadap kota lain digunakan analisis *Relly's Law of Retail Gravitation* . Dengan metoda ini batas-batas pengaruh suatu kota terhadap kota lain dapat diketahui khususnya untuk kegiatan perdagangan eceran (Tarigan, 2004:53). Metoda ini dirumuskan :

$$S_{b,a} = \frac{D_{ba}}{(1 + \sqrt{P_b/P_a})}$$

$S_{b,a}$  = Wilayah pengaruh a terhadap b  
 $D_{ba}$  = Jarak kota a ke kota b  
 $P$  = Jumlah penduduk  
 ..... (1)

Analisis *Relly's Law* berguna untuk menentukan *breaking point* antara dua pusat kota. Untuk mengetahui interaksi antara dua pusat kota digunakan Indeks

Gravitasi (Warpani, 1984 : 113) dengan memanfaatkan data jumlah penduduk dan jarak antar pusat kota. Indeks Gravitasi (IG) berlaku relatif artinya jika IG suatu daerah hinterland (A) dengan pusat pertumbuhan X lebih besar dibandingkan dengan IG daerah A dengan pusat pertumbuhan Y, maka daerah A tersebut akan dikategorikan sebagai hinterland X. Posisi sebagai *hinterland* dari suatu daerah akan ditentukan berdasarkan besarnya indeks yang dihitung. IG tidak berlaku secara kardinal, misal IG yang dicapai pada kecamatan A sebesar 20% dan indeks yang dicapai B 10%. Ini tidak berarti bahwa hubungan kedekatan dari A sebesar dua kali lipat kecamatan B.

Untuk menghitung tingkat aksesibilitas suatu kota digunakan rumus :

$$T_{ij} = \frac{P_i P_j}{d_{ij}^2} \dots\dots\dots(2)$$

Sumber : Tarigan, 2004 :162  
 Ketr : T = Tingkat aksesibilitas  
 P = Penduduk  
 d = jarak

### 1.6.5.3. Analisis *Location Quotient*

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi yang menggunakan sumber daya lokal termasuk tenaga kerja, bahan baku, dan *outputnya* yang diekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita, dan penciptaan lapangan kerja (Tambunan, 2003).

Jadi LQ merupakan petunjuk untuk melihat keunggulan komparatif sektor di Kabupaten Bangka, dengan ketentuan LQ sektor i di kecamatan j akan bernilai

lebih besar dari 1 (satu) jika sektor tersebut mampu di produksi secara murah dan efisien sehingga mampu di pasarkan di luar kecamatan j, begitu juga sebaliknya jika nilai LQ kurang dari satu. Hasil perhitungan LQ akan dipergunakan sebagai dasar untuk melihat faktor-faktor penyebabnya.

*Location Quotient*(LQ) merupakan perbandingan besarnya peranan suatu sektor/industri suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional. LQ merupakan petunjuk adanya keunggulan komparatif bagi sektor-sektor yang telah lama berkembang serta untuk melihat prospektif dari suatu komoditi (Tarigan, 2004).

Analisis LQ merupakan analisis perekonomian yang digunakan untuk membandingkan peranan sektor dalam PDRB tiap kecamatan terhadap PDRB Kabupaten Bangka. Analisis LQ juga digunakan untuk menentukan sektor ekonomi potensial atau strategis.

$$LQ = \frac{\frac{X_{ij}}{PDRB_j}}{\frac{X_i}{PDRB}}$$

gai :  
 $x_{ij}$  = nilai tambah sektor i di kecamatan j  
 $PDRB_j$  = PDRB kecamatan j  
 $X_i$  = nilai tambah sektor i di Kabupaten  
 Bangka  
 $PDRB$  = PDRB Bangka  
 ..... (3)

#### 1.6.5.4. Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift Share* (Tambunan, 2003 dan Tarigan, 2004) merupakan analisis perekonomian untuk mengetahui kinerja sektor ekonomi wilayah dengan membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor i di wilayah j terhadap sektor i di wilayah yang lebih besar. Data yang digunakan dalam

analisis ini berupa data PDRB berdasarkan harga konstan dengan timah tahun 2000 -2004. Komponen *share* merupakan besarnya nilai tambah kecamatan i seandainya proporsi perubahannya sama dengan laju pertumbuhan Kabupaten Bangka selama kurun waktu 2000 hingga 2004.

Komponen *Shift* merupakan penyimpangan dari nilai *national share* yang akan bernilai positif di wilayah yang tumbuh lebih cepat dan negatif di wilayah yang tumbuh lebih lambat. Komponen ini terbagi dua; yaitu *Proportional shift (PS)* (= komponen struktural, *industrial mix*), mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di kecamatan i. Komponen ini bernilai positif di kecamatan yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara kabupaten tumbuh cepat dan negatif di kecamatan-kecamatan yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara kabupaten tumbuh dengan lambat atau bahkan sedang merosot. *Proporsional shift* dipengaruhi oleh faktor eksternal regional dan bekerja pada level *national*.

*Differential shift component* merupakan sisa kelebihan. Komponen ini mengukur *shift regional netto* karena pengaruh lokasional intern karena pengaruh tersedianya sumber daya.

*National Share* dirumuskan sebagai :

$$Ns = q_{ijt-1} \left( \frac{\Delta Q_n}{Q_{nt-1}} \right) \dots\dots\dots (4)$$

$\Delta Q = Q_{nt} - Q_{nt-1}$  maka :

$$\begin{aligned}
 Ns &= q_{ijt-1} \left( \frac{Q_{nt} - Q_{nt-1}}{Q_{nt-1}} \right) = q_{ijt-1} \left( \frac{Q_{nt}}{Q_{nt-1}} - \frac{Q_{nt-1}}{Q_{nt-1}} \right) \\
 &= q_{ijt-1} \left( \frac{Q_{nt}}{Q_{nt-1}} - 1 \right) = q_{ijt-1} \left( \frac{Q_{nt}}{Q_{nt-1}} \right) - q_{ijt-1} \dots\dots\dots (5)
 \end{aligned}$$

*Proportional Shift* digunakan untuk mengukur perubahan relatif pertumbuhan di suatu kecamatan dibandingkan dengan kabupaten dirumuskan sebagai :

$$\begin{aligned}
 Ps &= q_{ijt-1} \left( \left( \frac{\Delta Q_{in}}{Q_{int-1}} \right) - \left( \frac{\Delta Q_n}{Q_{nt-1}} \right) \right) \\
 &= q_{ijt-1} \left( \left( \frac{Q_{int} - Q_{int-1}}{Q_{int-1}} \right) - \left( \frac{Q_{nt}}{Q_{nt-1}} - 1 \right) \right) \\
 &= q_{ijt-1} \left( \frac{Q_{int}}{Q_{int-1}} - \frac{Q_{nt}}{Q_{nt-1}} \right) \dots\dots\dots (6)
 \end{aligned}$$

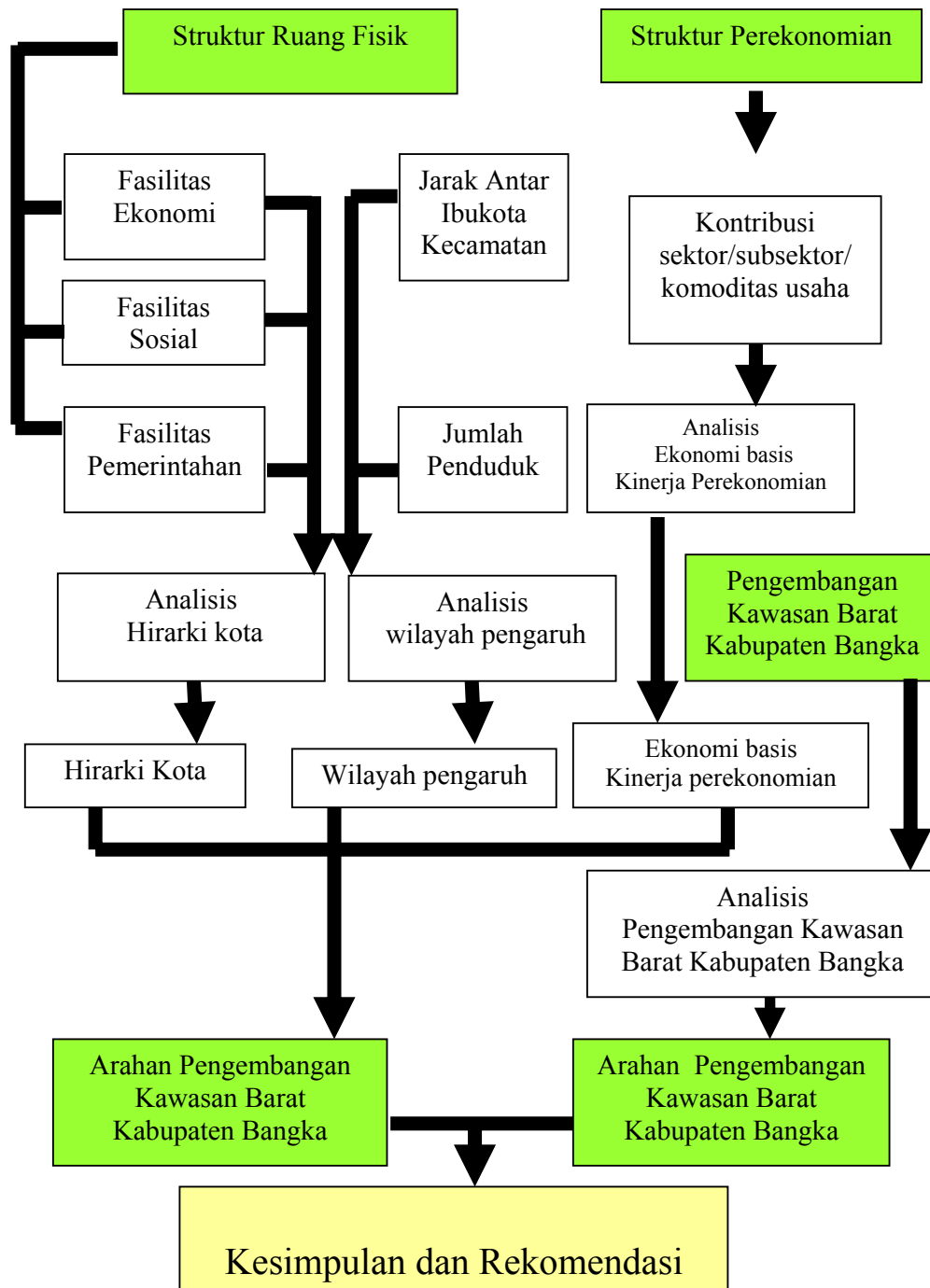
*Differential Shift* digunakan untuk mengukur seberapa jauh daya saing dari suatu sektor di suatu kecamatan dibandingkan dengan sektor yang sama di kabupaten dan dirumuskan sebagai :

$$\begin{aligned}
 Ds &= q_{ijt-1} \left( \left( \frac{\Delta q_{ij}}{q_{ijt-1}} \right) - \left( \frac{\Delta Q_{in}}{Q_{int-1}} \right) \right) \\
 Ds &= q_{ijt-1} \left( \frac{q_{ijt}}{q_{ijt-1}} - \frac{Q_{int}}{Q_{int-1}} \right) \dots\dots\dots (7)
 \end{aligned}$$

Ketr:

$N_s$	= <i>National Share</i> (Kabupaten Bangka)
$\Delta Q_n$	= Perubahan PDRB kabupaten Bangka
$Q_{nt}$	= PDRB Bangka tahun t
$Q_{nt-1}$	= PDRB Bangka sebelum tahun t
$q_{ijt-1}$	= PDRB sektor i kecamatan j sebelum tahun t
$\Delta Q_{in}$	= Perubahan PDRB kabupaten disektor i
$Q_{int}$	= PDRB kabupaten sektor i tahun t
$Q_{int-1}$	= PDRB kabupaten sektor i sebelum tahun t
$\Delta q_{ij}$	= Perubahan PDRB sektor i kecamatan j
$q_{ijt}$	= PDRB sektor i kecamatan j tahun t
$q_{ijt-1}$	= PDRB sektor i kecamatan j sebelum tahun t

Kerangka analisis arahan pengembangan Kawasan barat Kabupaten Bangka dapat dilihat pada gambar 1.4.



Gambar 1.4.  
Kerangka Analisis Kajian Arahan Pengembangan Kawasan Barat Kab. Bangkang

Kerangka teknik analisis studi ini yang meliputi input dan teknik analisis yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dapat dilihat pada tabel I.3.

Tabel I.3.  
Kerangka Teknik Analisis

<b>INPUT</b>	<b>TEKNIK ANALISIS</b>	<b>KELUARAN</b>
1. Fasilitas ekonomi 2. Fasilitas sosial 3. Fasilitas pemerintahan	Skalogram Gutmann	Hirarki kota
1. Penduduk 2. Aksesibilitas	Model gravitasi	Wilayah pengaruh
PDRB	<i>Location quotient</i> <i>Shift share</i>	Ekonomi basis Kinerja perekonomian
Analisis pengembangan wilayah kawasan barat	Dekriptif kualitatif	Arahan pengembangan kawasan barat Bangka

## **BAB II**

### **KAJIAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH**

#### **2.1. Pengembangan Wilayah**

Wilayah menurut kamus didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsionalnya (UU no. 24 tahun 1992 pasal 1). Jayadinata (2000:13) mengemukakan wilayah dari sudut geografi merupakan kesatuan alam yang homogen dengan masyarakat serta kebudayaannya yang serba sama serta mempunyai ciri yang khas.

Wilayah nodal atau wilayah polarisasi secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat dan wilayah belakangnya sedangkan wilayah perencanaan dibuat atas dasar kedekatan, saling terkait secara logis, dan merupakan kesatuan pengambilan keputusan ekonomi. (Ghalib, 2005)

Pengembangan Wilayah menurut Syarifuddin Akil (2003) adalah rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pengembangan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pengembangan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan berkelanjutan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengembangan kawasan bertujuan menjembatani dan memperkecil

ketimpangan di suatu kawasan. Zona-zona pengembangan, kawasan konservasi, dan wilayah-wilayah di sekitar perbatasan dengan kota perlu divisikan sesuai dengan karakteristik lingkungannya (Hamid, 2001 : 101). Hal ini diperlukan karena kondisi sosial ekonomi dan budaya yang berbeda dan harus disesuaikan dengan kondisi, potensi dan permasalahan wilayah (Ambardi, 2002:47).

Pengembangan wilayah merupakan upaya memadukan secara harmonis sumber daya alam, manusia, dan teknologi dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan yang semuanya disebut memberdayakan masyarakat. Pengembangan harus diartikan sebagai keinginan mendapatkan perbaikan, serta kemampuan untuk merealisasikannya dan lebih merupakan motivasi dan pengetahuan dari pada kekayaan. (Alkadri, 2001:4). Sasarannya adalah peningkatan kualitas hidup dan memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya (Suharto, 2005 :38). Eksploitasi SDA perlu diiringi dengan penataan kawasan lindung dan ekologi. (Hamid.ed. 2001).

Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah (Nurzaman, 2002:17). Pengembangan wilayah sangat berorientasi pada *issues* (permasalahan) pokok wilayah secara saling terkait, sementara pengembangan sektoral bertujuan untuk mengembangkan sektor tanpa terlalu memperhatikan kaitannya dengan sektor-sektor lain.( Ambardi, 2002 : 47). Konsep dasar pengembangan wilayah ke depan adalah konsep untuk menciptakan sinkronisasi perkembangan antar wilayah yang melihat kota dan *hinterlandnya* dalam mekanisme pengembangan wilayah guna menjembatani kesenjangan antar kota, kota desa, pusat pertumbuhan dan

*hinterlandnya*, serta bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan sumber daya wilayah.

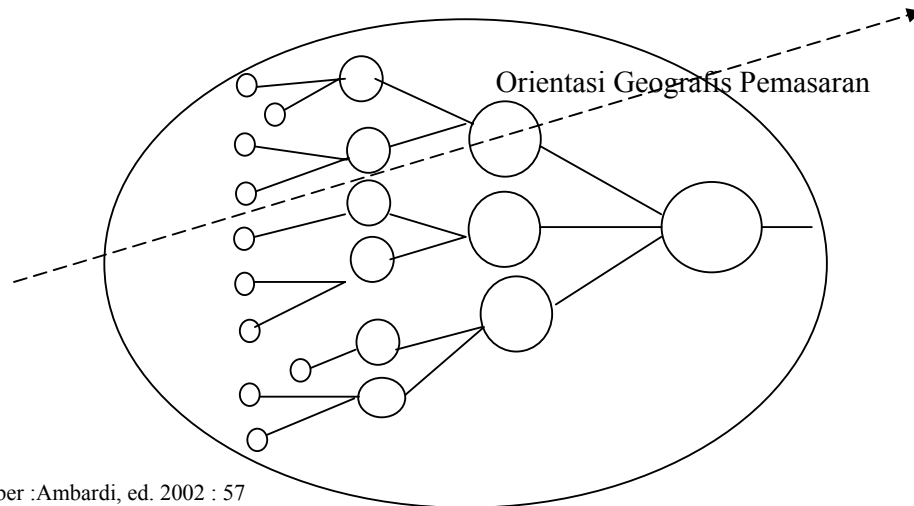
Pengembangan wilayah juga mengalami perkembangan, mulai dari konsep *top down*, *bottom up*, konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dan akhirnya melahirkan konsep yang menekankan pada keterpaduan analisis-analisis wilayah yang disebut *regional science* (Teori Isard) dan karena cenderung dipengaruhi oleh sistem yang berlaku, maka di Indonesia berkembang konsep Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yang bertumpu pada teori *market area* dari Losch, dan suatu wilayah mengalami perkembangan jika terdapat aliran investasi, barang, dan jasa (Ambardi ed., 2002 :56).

Pengembangan wilayah yang dikemukakan oleh Poernomosidi Hadjisarosa adalah menggunakan pendekatan satuan wilayah pengembangan (SWP). Pendekatan ini mensyaratkan bahwa setiap SWP harus didukung oleh kota-kota yang berhirarki pada satu satuan wilayah. Penentuan SWP didasarkan pada beberapa hal (Ambardi, ed. 2002 : 55) antara lain adanya kegiatan perdagangan antar wilayah yang intensif, spesialisasi wilayah, adanya aliran masuk investasi, barang, dan jasa, sumber daya alam dan manusia, jangkauan aliran barang dan jasa, prasarana angkutan, simpul (node) jasa distribusi. (Gambar 2.1).

## **2.2. Struktur Ruang Wilayah**

Menurut Hanafiah (1982) dalam Tarigan (2005:112) suatu ruang harus memiliki unsur jarak, lokasi, bentuk, dan ukuran atau skala sedangkan wilayah menurut konsep relatif memperhatikan faktor fisik dan fungsi sosial ekonomi dari

ruang tersebut. Walter Isard dalam Ambardi (2002) mengemukakan faktor-faktor utama pembentuk ruang wilayah adalah fisik, sosial, budaya, dan ekonomi. Wilayah juga dapat dibedakan dari kondisinya dan dikelompokkan atas dasar keseragaman isinya (homogeneity) dan menurut fungsinya.



Sumber : Ambardi, ed. 2002 : 57

Gambar 2.1.  
Gambaran Ideal Satuan Wilayah Pengembangan

Struktur ruang merupakan suatu organisasi keruangan yang hirarkies fungsional sebagai arahan pengembangan ekonomi wilayah. Dimensi spasial dalam pengembangan daerah dapat memberikan watak dan ciri tersendiri serta memiliki spirit sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimilikinya ( Usman dalam Hamid, 2002 : 217). Bilivson (2004) mengemukakan dalam konteks pengembangan ekonomi wilayah, struktur ruang adalah suatu intervensi manusia terhadap ruang wilayah, baik fisik maupun ekonomi. Kebijakan struktur ruang merupakan matra spasial dari kebijakan pengembangan ekonomi wilayah, sehingga merupakan hasil proses alokasi objek fisik dan aktivitas ekonomi ke dalam tatanan ruang yang memperhatikan potensi dan permasalahan wilayah.

Struktur ruang secara fisik adalah susunan ruang yang terbentuk secara utuh dan menunjukkan keterkaitan antar bagian dari seluruh komponen fisik yang membentuk hirarki pelayanan berdasarkan fasilitas kota dan wilayah pengaruhnya.

Struktur ruang secara ekonomi adalah susunan ruang yang terbentuk secara utuh dan menunjukkan keterkaitan antar bagian dari seluruh komponen aktifitas ekonomi yang membentuk hirarki ekonomi wilayah dan terdiri dari sektor/sub sektor ekonomi unggulan dalam setiap unit spasial.

UU nomor 24/1992 menjelaskan bahwa pendekatan wilayah merupakan suatu cara untuk memahami kondisi, ciri, dan hubungan sebab akibat (*phenomena*) dari unsur-unsur pembentuk wilayah (penduduk, sumber daya alam, sumber daya buatan, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan fisik) serta untuk merumuskan tujuan, sasaran, dan target pengembangan wilayah. Hasil analisis kondisi wilayah bukan hanya berupa identifikasi kondisi, potensi, dan permasalahan suatu wilayah, tetapi juga pemahaman dan perumusan tentang bagaimana mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan investasi, mengelola sumber daya alam, melestarikan lingkungan hidup, mengembangkan permukiman, dan infrastruktur (Ambardi, 2002).

Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 menggariskan bahwa Tujuan pemanfaatan ruang adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Susunan tata ruang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi yang terlihat saat membicarakan faktor minimalisasi biaya dan aksesibilitas (Ghalib, 2005:105). Minimalisasi biaya ruang yang pertama dikemukakan oleh Haig (1920-an)

merupakan upaya untuk mengendalikan struktur tata ruang.

Perencanaan tata ruang umumnya disusun berdasarkan pertimbangan pengembangan kegiatan ekonomi wilayah yang dijabarkan dalam *spatial planning* terutama dalam penentuan lokasi (Tjahyati, 1997 : 396)

### **2.3. Sistem Hirarki Kota**

Sistem transpor yang efisien memungkinkan masyarakat mengatasi masalah jarak serta struktur kegiatan yang terpusat. Kota merupakan pusat pertumbuhan dan secara fungsional merupakan tempat terkonsentrasinya manusia dengan segala aktifitasnya serta sarana dan prasarana penunjang sehingga mampu mendorong berkembangnya aktifitas perekonomian baik untuk diri sendiri maupun ke daerah *hinterland*.

Menurut Tarigan (2004) pusat pertumbuhan bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya. Proses perkembangan dan perluasan kota yang disertai dengan perubahan struktur tata guna lahan sebagian besar disebabkan oleh adanya gaya sentrifugal dan gaya sentripetal.

Wilayah pengaruh pusat kota terhadap wilayah pinggirannya sangat dipengaruhi oleh jarak kedua kota tersebut dan jumlah penduduknya. Pendekatan yang seperti ini disebut model *gravity* yang dikenal sebagai teori *Rielly*. Sebagai pusat pertumbuhan, kota memiliki wilayah pengaruh bagi daerah belakangnya. Banyaknya fasilitas perkotaan cenderung berkaitan dengan besarnya kota tersebut. Wilayah pengaruh bagi aktifitas perdagangan eceran dapat dilakukan dengan menggunakan *Breaking Point Theory*.

Kota juga memiliki faktor-faktor pembeda jika ditinjau dari jumlah penduduk, fasilitas prasarana, dan tingkat aksesibilitas kota tersebut ke kota terdekat dan hal ini dapat dijadikan dasar bagi penilaian penentuan orde kota (Tarigan, 2004 :158). Dengan mengetahui rangking kota, banyak keuntungan yang dapat diperoleh dalam perencanaan penyediaan fasilitas kota yang berguna dalam penyusunan struktur ruang wilayah. Analisis yang mengaitkannya dengan sistem transportasi (jaringan dan mode) serta lokasi dalam kegiatan besar yang terkonsentrasi dapat menciptakan arus pergerakan orang, barang, dan jasa.

Dalam penyusunan program yang berkaitan dengan jenis dan besarnya fasilitas yang dibutuhkan, orde kota sangat dibutuhkan agar terdapat keselarasan antara ketersediaan dan kebutuhan termasuk di dalamnya peramalan, monitoring serta bahan masukan dalam perencanaan kota.

Rondinelli (1983 :120-170) mengungkapkan hirarki atau tingkatan kota akan mempengaruhi fungsi suatu kota. Kota-kota menengah dan kecil mempunyai fungsi yang dapat digolongkan ke dalam 8 bagian, yaitu : (1). Pusat pelayanan umum dan sosial; (2). Pusat komersial dan pelayanan jasa; (3) Pusat pemasaran dan perdagangan regional; (4) Pusat penyediaan dan pemrosesan produk-produk pertanian; (5). Pusat industri kecil; (6) Pusat transportasi dan komunikasi regional; (7) Pusat penarik migrasi dari perdesaan dan menjadi sumber pendapatan bagi daerah perdesaan; (8) Pusat transformasi sosial.

Secara fungsional kota memiliki dua fungsi; yaitu pertama dalam lingkup internal kota berfungsi melayani kegiatan sosial ekonomi bagi penduduknya (lapangan kerja, prasarana dan sarana kota); kedua, dalam lingkup eksternal

sebuah kota berfungsi melayani wilayah-wilayah disekitarnya (Ambardi, 2002).

Menurut John Freedman dan Cleyde Wever dalam Ghalib (2005) mengungkapkan faktor *scale economics* yang dapat menerapkan skala besar dan optimal merupakan faktor yang dapat menyebabkan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi ke wilayah perkotaan

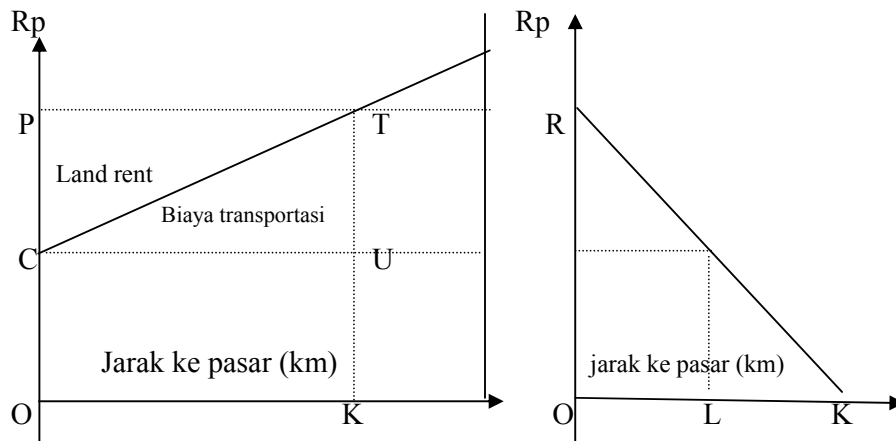
#### **2.4. Teori Lokasi**

Von Thünen sebagai pioner teori pemanfaatan tanah membicarakan bagaimana menentukan lokasi tempat menanam yang paling efisien berbagai tanaman serta pemanfaatan tanah yang dimilikinya. Dalam teori ini kegiatan yang lebih menghasilkan daripada kegiatan yang lain ditempatkan di lokasi yang lebih dekat dengan pasar dan seterusnya berurutan membentuk lingkaran. Teori Von Thünen yang didukung oleh teori Ricardo dapat diubah sesuai dengan manfaat tanah perkotaan/wilayah yang ternyata variatif (Reksohadiprojo, 1994: 26).

Analisis David Ricardo mendasarkan teorinya pada daerah yang berupa pemukiman baru, dimana terdapat sumber daya tanah yang subur dan berlimpah. Hanya tanah yang subur yang digunakan untuk bercocok tanam dan tidak ada pembayaran sewa sehubungan dengan penggunaan tanah tersebut karena penduduk masih sedikit jumlahnya. Sewa tanah akan muncul hanya apabila penduduk bertambah jumlahnya, sehingga permintaan akan tanah menghendaki digunakannya tanah yang kurang subur oleh masyarakat. Jadi teori sewa model Ricardo ditentukan berdasarkan perbedaan dalam kualitas tanah yang hanya melihat faktor kemampuan tanah untuk membayar sewa tanpa memperhatikan faktor lokasi tanah, tetapi menurut Tarigan (2004 :131), tetap terikat pada jarak.

Sewa tanah (economic rent) merupakan surplus pendapatan diatas pengeluaran biaya untuk tanah yang memungkinkan faktor produksi tanah dapat dimanfaatkan dalam proses produksi tidak termasuk pajak, royalti.

Untuk lebih jelasnya teori ini dapat dilihat pada gambar berikut (Suparmoko, 1997:177).



Gambar 2.2

Pengaruh Biaya Transportasi Produk dari Berbagai Lokasi ke Pasar Terhadap Land Rent

Ketr. O = Pusat pasar  
 OK = Jarak ke Pasar  
 OP = Harga  
 OR = Land Rent

## 2.5. Pengembangan Prasarana Wilayah

Menurut Kamus Tata Ruang Dirjend Cipta Karya, komponen prasarana wilayah terbagi 3 golongan; yaitu prasarana transportasi, prasarana kesehatan, prasarana energi dan komunikasi. Tujuan dari penyediaan prasarana wilayah adalah untuk memenuhi kebutuhan penduduk terhadap prasarana wilayah serta untuk mengarahkan perkembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Menurut Diwiryo (1996) terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyediaan prasarana, yaitu kebutuhan pelayanan, kebutuhan

untuk mendorong perkembangan wilayah, tingkat pelayanan yang dilihat dari aspek ekonomis dan psikologis penduduk dengan memperhatikan efisiensi pengadaan dan biaya yang dibutuhkan.

Sistem infrastruktur menurut Grigg (2000) dalam Kodoatie (2005) dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dalam hal ini Grigg dan Fontane (2000) dalam Kodoatie (2005) menyebutkan 7 kelompok infrastruktur; antara lain transportasi seperti jalan raya, jalan, dan jembatan; komunikasi; serta bangunan yang semuanya dapat menjadi variabel-variabel yang digunakan dalam perhitungan *rating* kualitas infrastruktur (Kompas, 22 Sept.2002). Dalam hal ini kualitas infrastruktur berbanding lurus dengan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Pengembangan prasarana wilayah adalah pengembangan yang memberi *input* bagi penduduk dan jika dilihat dari *input output* bagi penduduk, maka komponen tersebut terbagi tiga, yaitu (1). Komponen yang memberikan *input* kepada penduduk seperti listrik, air bersih; (2) Komponen yang mengambil *output* dari penduduk seperti drainase, pembuangan sampah dan (3) Komponen yang dapat dipakai untuk memberikan *input* maupun *output* seperti jalan dan telepon. Pengembangan prasarana wilayah biasanya dikaitkan dengan faktor-faktor sosial ekonomi suatu wilayah.

Strategi pengembangan prasarana wilayah menekankan pada tersedianya prasarana yang handal, efisien, adaptif, dan antisipatif dalam mendukung

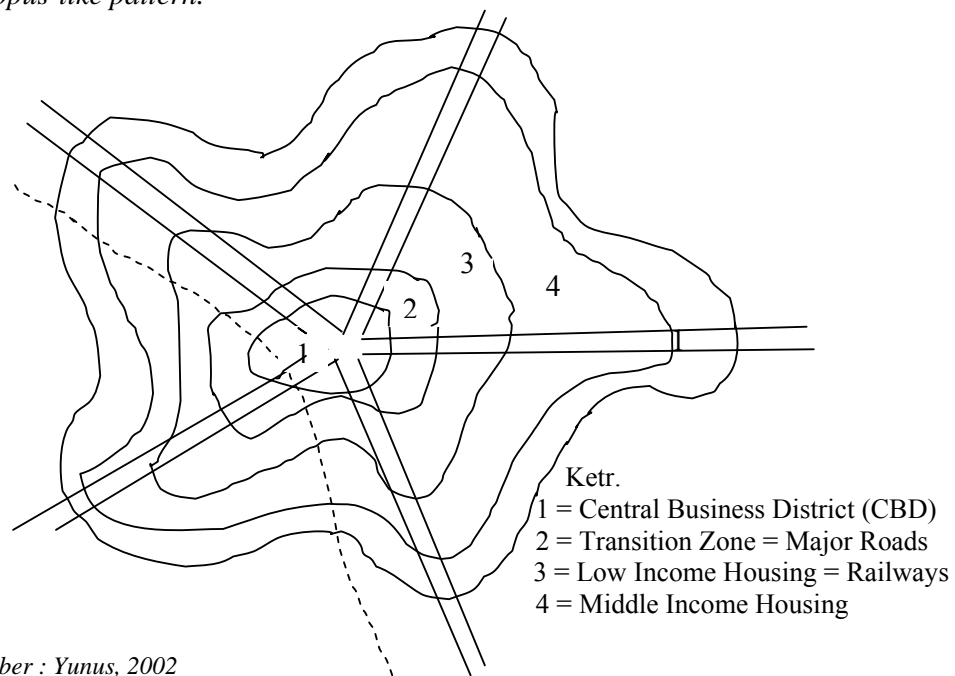
perekonomian daerah dan peranannya, sehingga dalam program pengembangannya didapatkan tujuan dan sasaran yang jelas. Prasarana wilayah diharapkan mampu berperan dan berfungsi dalam pengembangan dan peningkatan daya saing wilayah. (Ambardi, 2002 : 279).

John Friedmann dalam Ghalib (2005 : 90) mengemukakan usaha skala kecil yang tersebar akan membentuk kegiatan ekonomi yang berskala besar dan terpusat di suatu lokasi jika dibangun jalur transportasi yang baik. Hal ini muncul sebagai akibat adanya daya tarik kota terhadap kegiatan tersebut yang merupakan faktor ekonomis. Myrdal dalam Jhingan (2004:214) mengungkapkan seharusnya pemerintah menerapkan kebijakan yang adil guna memperkuat dampak sebar dan menjembatani kesenjangan wilayah.

Dalam ekonomi regional, keterkaitan wilayah menjadi faktor yang sangat penting dan infrastruktur jalan merupakan pengikat ke wilayah luar (*Interregional Connections*) maupun antar sub wilayah (*Intraregional Connections*), guna memecahkan masalah surplus dan defisit produksi diantara wilayah (Ghalib, 2005 : 99). Pembangunan ekonomi berkorelasi dengan dampak sebar karena disertai dengan pembangunan transportasi. Korelasi ini akan berdampak pada kesenjangan (Myrdal dalam Jhingan 2004:214).

Sebagai penyempurna teori konsentris, Babcock (1932) menekankan peranan transportasi dalam mempengaruhi struktur keruangan yang mengasumsikan bahwa mobilitas fungsi-fungsi dan penduduk mempunyai intensitas yang sama dalam konfigurasi relief kota yang seragam. Faktor utama yang mempengaruhi mobilitas adalah poros transportasi yang menghubungkan

*Central Business District (CBD)* dengan daerah bagian luarnya. Menurut Babcock, keberadaan poros transportasi akan mengakibatkan distorsi pola konsentris, karena sepanjang rute transportasi tersebut berasosiasi dengan mobilitas yang tinggi. Daerah yang dilalui oleh poros transportasi akan mengalami perkembangan yang berbeda dengan daerah-daerah diantara jalur transportasi tersebut, sehingga terbentuk persebaran keruangan yang disebut *octopus-like pattern*.



Sumber : Yunus, 2002

Gambar 2.3.  
Persebaran Keruangan

## 2.6. Strategi Pengembangan Ekonomi Wilayah

Ambardi (2002:130) mengemukakan strategi merupakan rangkaian kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi pengembangan ekonomi wilayah dapat ditempuh dari sisi penawaran yang ditujukan untuk meningkatkan penawaran komoditas tertentu

yang diproses dari sumber daya lokal. Strategi ini berupaya meningkatkan ekspor keluar wilayah yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan lokal. Strategi pengembangan wilayah ini bersandar pada pengembangan sumber daya alam.

Strategi yang lain adalah strategi pengembangan area pelayanan yang membutuhkan subsidi pemerintah untuk meningkatkan *location rent* yang dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana wilayah sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah terhadap pusat-pusat pertumbuhan.

Agar perekonomian wilayah lebih kuat terhadap pengaruh dari luar, maka Douglass dalam Nurzaman (2002:14) menyarankan adanya strategi yang mengembangkan kekuatan perekonomian lokal yang dapat mengimbangi perkembangan perekonomian global. *Local economic Development* lebih menekankan pada kepentingan rakyat dan aspirasinya serta berdasarkan pada *suistainable* (Nurzaman, 2002:16). Dalam pengembangan ekonomi lokal (PEL) dilakukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta lokal guna menciptakan lapangan pekerjaan dan tumbuhnya perekonomian di zona ekonomi tertentu. Pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses yang melibatkan pembentukan kelembagaan baru, perkembangan industri baru, pengembangan kapasitas pekerja untuk menghasilkan produk yang lebih bermutu, identifikasi pasar baru serta pendirian usaha-usaha baru (Nurzaman, 2002:39).

Teori ekonomi dasar menekankan pada perkembangan sektoral, tetapi pengembangan ekonomi lokal lebih menekankan pada perkembangan kelembagaan yang dapat menghidupkan dasar ekonomi yang tepat bagi suatu wilayah. Teori lokasi menyatakan sumber daya dan jarak pasar berperan dalam

perkembangan industri, tetapi PEL lebih menekankan bagaimana menarik para ilmuwan, LSM, serta berbagai lembaga penelitian.

Menurut Hakim (2002), daerah yang belum maju mempunyai karakteristik dan menghadapi kendala-kendala seperti standar hidup yang rendah. Hal ini disebabkan antara lain oleh tingkat pendapatan yang rendah dan ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi.

Tambunan (2003:143) mengungkapkan tujuan pengembangan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan umum diukur dengan menggunakan pendapatan rata-rata perkapita. Kunarjo (2002 :12) mengungkapkan untuk mencapai kesejahteraan dapat dilakukan dengan menciptakan peningkatan produksi riil. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai perubahan yang meningkat pada kapasitas produksi. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui sektor industri yang tidak melupakan sektor pertanian.

Ekonomi regional membahas ekonomi mikro seperti teori sewa lahan, teori lokasi dan juga ekonomi makro seperti PDRB kota, PDRB per kapita kota, konsumsi dan lainnya. Rondinelli (1985 : 1-2) dalam Hanif (2003) mengemukakan dalam upaya pengembangan wilayah, strategi harus diarahkan guna mengintegrasikan seluruh sistem ekonomi dengan memberikan akses seluas-luasnya bagi pertumbuhan perekonomian wilayah agar tercipta peningkatan produktifitas, kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan wilayah belakang. Pernyataan di atas diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

Pengembangan ekonomi wilayah merupakan suatu usaha mengembangkan dan meningkatkan hubungan interdependen dan interaksi antar sistem ekonomi, sistem masyarakat, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Pengembangan ekonomi wilayah harus bersandar pada potensi dan kondisi serta struktur masyarakat yang ada di wilayah bersangkutan. (Ambardi, 2002 :123).

Menurut Tarigan (2004:60) kebijakan pertumbuhan sebaiknya diarahkan pada pengembangan sektor basis dari pada sektor pelayanan, sebab akan menimbulkan efek pengganda jangka panjang dan beberapa unit usaha pelayanan akan berkembang serta tidak ada unit usaha yang dirugikan. Boediono (1985) dalam Tarigan (2004:44) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang dan beberapa ahli lain menambahkan harus bersumber dari proses intern perekonomian tersebut.

Glasson (1977:86) mengemukakan pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam seperti distribusi faktor-faktor produksi antara lain tanah, tenaga kerja, modal, sedangkan faktor ekstern yang penting adalah tingkat permintaan dari daerah-daerah lain.

Dalam teori pertumbuhan atau yang disebut Teori Sektor yang dikemukakan oleh Clark dan Fisher, dinyatakan bahwa kenaikan pendapatan perkapita di berbagai daerah pada berbagai waktu pada umumnya diiringi oleh relokasi sumber daya dengan penurunan proporsi angkatan kerja yang dipekerjakan dalam kegiatan-kegiatan primer (pertanian) dan kenaikan proporsi dalam kegiatan-kegiatan sekunder (manufaktur) dan kemudian disusul dengan kenaikan di kegiatan jasa.

Pengembangan wilayah berupaya mendorong desentralisasi investasi yang selama ini terpusat di kota utama ke wilayah-wilayah yang mampu berfungsi sebagai pusat-pusat fasilitas pelayanan, pemasaran, distribusi dan transportasi bagi penduduk sekitarnya.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor-faktor (1). *supply side influence*, yaitu kemampuan produk dalam menumbuhkan potensi yang ada. (2). Kemampuan faktor produksi, yaitu ketersediaan lahan sebagai tempat untuk industri; (3). ketersediaan tenaga kerja baik kualitas maupun kuantitasnya; (4). Ketersediaan modal. (5). Investasi. (Djojohadikusumo, 1994).

Simon Kuznets dalam Kuncoro (1997:105) mengemukakan pada awal pembangunan distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu distribusi makin merata. Dalam teori lingkaran kemiskinan, keterbelakangan, ketidakmampuan pasar, dan kurangnya modal menjadi penyebab rendahnya produktifitas, hingga pendapatan yang diterima menjadi rendah dan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi.

Untuk menumbuhkan minat investor Mochamad Najib, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM (Kompas, 7 Juli 2006 :18) mengungkapkan, dibutuhkan insentif seperti kemudahan pelayanan, ketersediaan pasar dan kemudahan mendapatkan bahan baku. Sementara itu Iman Sugema, Direktur Inter-CAFE IPB (Kompas, 7 Juli 2006 : 21) menyarankan sebaiknya pemerintah fokus pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran dan menjadikan keduanya sebagai indikator perkembangan perekonomian.

## **2.7. Strategi Pengembangan Kewilayahan**

### **2.7.1. Paradigma Development from Above School**

*Development from Above* memandang pengembangan wilayah sebagai suatu yang sangat penting yang dimulai dari *Core* dan *growth Centers* dan diharapkan menetes ke daerah *periphere* dan *hinterland*. Konsep ini bertujuan untuk mencapai integrasi fungsional dimana wilayah maju diperluas kepada wilayah tertinggal dan sumber daya wilayah tertinggal dibuat lebih aksesibel terhadap wilayah maju. Myrdal dalam Jhingan (2004:214) mengungkapkan pembangunan yang lebih tinggi akan semakin memperkuat dampak sebar dan cenderung menghambat arus ketimpangan wilayah.

Sejarah pengembangan ekonomi Indonesia hingga akhir 1997, *trickle down effect* tidak seperti yang diharapkan. Tingkat kesenjangan dalam pembagian Pendapatan Nasional serta kemiskinan semakin meningkat (Tambunan, 2003 :82). Myrdal dalam Jhingan (2004:212) mengungkapkan sebab utama ketimpangan regional adalah kuatnya *backwash effects* dan lemahnya *spread effects*.

### **2.7.2. Growth Pole**

Secara fungsional pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentris kelompok usaha yang sifat hubungannya, memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun keluar. Secara geografis pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang memiliki fasilitas dan kemudahan hingga menjadi pusat daya tarik usaha dan masyarakat guna memanfaatkan fasilitas tersebut. Pusat pertumbuhan dicirikan dengan adanya hubungan intern antar berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi,

*multiplier effect*, konsentrasi geografis, dan mendorong pertumbuhan daerah belakangnya (Tarigan, 2004 :151). *Growth Pole* adalah konsep yang menekankan pembangunan industri *leading*, apresiasi terhadap lingkungan rendah, tumbuhnya kesenjangan antar wilayah, dan wilayah terpinggirkan (Nurzaman, 2002 : 3). Konsep *growth pole* sangat menekankan investasi pada industri-industri padat modal di pusat-pusat urban utama (Hadi.ed., 2004).

Ambardi (2002 : 50) mengemukakan konsep pusat pertumbuhan wilayah kurang memberikan perhatian pada pemerataan dan rasa keadilan bagi daerah yang terbelakang. Tambunan (2003) juga mengemukakan efek menetes ke bawah sulit untuk diharapkan akan terjadi pada konsep *Growth Pole*, tetapi Myrdal dalam Jhingan (2004:213) mengungkapkan wilayah di sekitar pusat perkembangan akan memperoleh keuntungan dari meningkatnya pasar produk pertanian dan bersamaan dengan itu kemajuan teknik akan tumbuh.

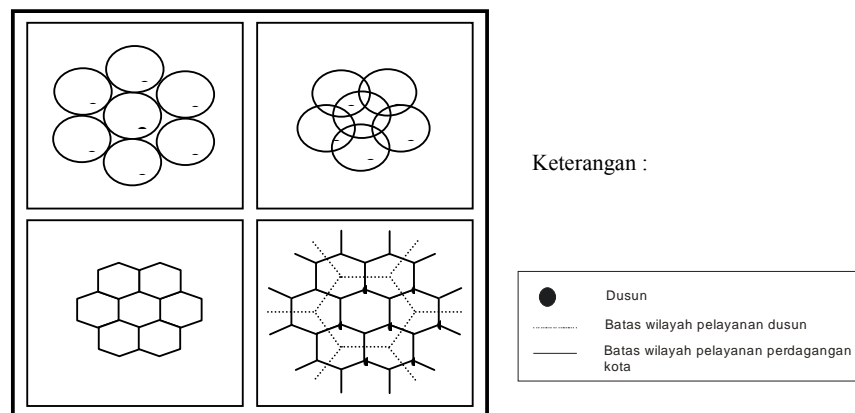
### **2.7.3. Paradigma Development from Below School**

*Development from Below School* merupakan pengembangan dari bawah, dimana masyarakat mengambil kendali atas institusi mereka guna menciptakan gaya hidup mereka sendiri. Paradigma ini merupakan kebalikan dari paradigma *Development from Above School* dan esensinya adalah bagaimana melihat pengembangan sebagai proses mobilisasi sumber daya daerah secara maksimum guna menciptakan otonomi wilayah melalui integrasi semua aspek kehidupan suatu wilayah baik sumber daya, lanskap, kultur maupun iklim (Weaver dalam Bingham, 1993 : 52). J.H. Boeke dalam Jhingan (2004:203) mengungkapkan bahwa desakan untuk membangun seharusnya datang dari rakyat sendiri.

#### 2.7.4. Teori Tempat Pusat

Dikembangkan oleh Christaller dan August Losch yang membahas susunan *urban centre* dan didasari keinginan meminimalkan biaya dan juga memperhatikan penyebaran permukiman, desa, dan kota yang ukurannya berbeda. Perbedaan ini membentuk suatu pusat pelayanan bagi wilayah disekitarnya yang disebut daerah komplementer dan membentuk suatu hirarki (Daljoeni, 1992).

Menurut teori Christaller tahapan pembentukan daerah pemasaran dimulai dari terbentuknya daerah penawaran dan pemasaran karena adanya jarak ekonomi dan berupa lingkaran dengan radius tertentu. Selanjutnya timbul lingkungan pemasaran lain dan persaingan secara spasial.



Sumber : Christaller dalam Tarigan, 2004

Gambar 2.4.  
Tahapan Pembentukan Wilayah Pemasaran

Usaha untuk memperluas daerah pemasaran dilakukan setelah ada perbaikan sarana dan prasarana serta adanya perbaikan proses produksi. Perkembangan radius wilayah penawaran dan pemasaran menimbulkan *overlapping* yang menguntungkan konsumen. Adanya pilihan terhadap jarak

tempuh yang terdekat membentuk daerah pemasaran segi enam yang merupakan bentuk yang paling efisien.

#### **2.7.5. Agropolitan**

Agropolitan adalah konsep pengembangan agribisnis yang memanfaatkan fasilitas perkotaan. Pusat memiliki kemampuan tinggi untuk membangkitkan dan melakukan perubahan inovatif, sedangkan lingkungan merupakan daerah pelengkap yang tergantung pada pusat wilayah dan sebagian pengembangannya ditentukan institusi pemerintah pada pusat wilayah. Konsep ini lebih menekankan kepentingan rakyat banyak dan aspek lingkungan serta *sustainable*.

Agropolitan adalah suatu wilayah yang dapat didefinisikan sebagai areal pedesaan yang mempunyai populasi efektif paling tidak 200 jiwa/km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk berkisar 50.000 sampai dengan 200.000 jiwa. Wilayah agropolitan ini dapat berupa suatu pusat kota atau pedesaan yang mempunyai populasi yang menyebar (Friedmann dan douglass, 1975; Rondinelli, 1985 :9).

Kunci keberhasilan pengembangan agropolitan adalah dengan memposisikan wilayah ini dalam suatu unit pemerintahan yang mempunyai otonomi sendiri dan mampu merencanakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Pemerintahan pusat lebih berperan sebagai pendorong melalui dukungan material, keuangan, dan sumber daya teknis terhadap inisiatif pengembangan (Hadi, ed. 2004)

Komponen-komponen pokok dari pendekatan agropolitan adalah kondisi dasar bagi realisasinya, kerangka kerja wilayah, perluasan wilayah, peranan pemerintah. Menurut Friedmann dan Dauglass (1976: 38-40).

Hadi. ed. (2004:12) mengemukakan, bahwa pengembangan kawasan agropolitan menekankan pada hubungan antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan secara berjenjang. Pengembangan kota-kota kecil dan sedang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, sebab dengan tumbuhnya kota-kota tersebut kebutuhan fasilitas-fasilitas dasar dapat terpenuhi dan pasar untuk produk-produk perdesaan dapat dikembangkan.

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan agropolitan menurut hadi.ed (2004) adalah terletak pada *empowerment* terhadap masyarakat yang sering tidak dilakukan terlebih dahulu dan belum diantisipasi kemungkinan percepatan konversi lahan pertanian ke penggunaan lain dalam bentuk penataan ruang agropolitan.

**BAB III**

**KAJIAN UMUM KABUPATEN BANGKA**

**DAN KAWASAN BARAT KABUPATEN BANGKA**

**3.1. Kajian Umum Kabupaten Bangka**

**3.1.1. Geografi dan Luas Wilayah**

Kabupaten Bangka merupakan satu dari 7 kabupaten/kota di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibatasi oleh Laut Natuna di sebelah utara dan timur, Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Tengah di selatan, serta Kabupaten Bangka Barat, Selat Bangka, dan Teluk Kelabat di sebelah barat.

Kondisi lebih rinci Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel III.1.

Tabel.III.1.  
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk 2004, serta Jarak ke Ibukota Kabupaten,

No	Kecamatan	Luas Wilayah(km <sup>2</sup> )	ke Sungailiat (km)	Penduduk
1	Belinyu	546,5	54	14.951
2	Merawang	164,4	21	37.468
3	M.Barat (via P.Pinang)	570,46	48/42(B.Ijuk)	21.826
4	Puding Besar	383,29	22	19.734
5	Bakam	488,10	30	15.032
6	Riau Silip	523,68	37	36.661
7	Pemali	127,87	7	19.771
8	Sungailiat	146,68	-	64.334
9	Jumlah	2.950,68	-	229.707

*Sumber: Bapeda Bangka 2006*

**3.1.2. Keadaan Alam dan Pemerintahan**

Keadaan tanah di Kabupaten Bangka mempunyai pH rata-rata dibawah 5, dan mengandung mineral biji timah sserta bahan galian lainnya. Bentuk dan keadaan tanahnya adalah 4% berbukit, 51 % berombak dan bergelombang, 20 %

lembah/datar sampai berombak, 25 % rawa dan bencah/datar. (Bangka Dalam Angka, 2004).

Ibukota Kabupaten Bangka terletak di Sungailiat. Secara administrasi terdiri dari 8 kecamatan, 9 kelurahan, 60 desa dan 199 dusun/lingkungan. Menurut klasifikasinya 5 desa merupakan desa swakarya dan 64 desa merupakan desa swadaya. Klasifikasi LKMD termasuk dalam kategori II untuk 52 desa dan kategori 3 untuk 17 desa.

### 3.1.3. Sosial Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Bangka pada tahun 2004 sebanyak 229.707 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 118.687 jiwa (51.67 %) dan penduduk perempuan sebanyak 111.020 jiwa (48.33 %). Kepadatan penduduk di Kabupaten Bangka adalah sebesar 78 orang per km<sup>2</sup>.

Komposisi penduduk Kabupaten Bangka yang dibagi menurut usianya dapat dilihat pada tabel III.2.

Tabel III.2.  
Komposisi Penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2004

LAKI-LAKI	JUMLAH	%	Jenis Sekolah	JUMLAH	APK (%)	APM (%)
0 – 14	38.748	16.868	TK	2.159		
15 – 64	75.920	33.051	SD/MI	30.094	116.7	81.02
65 +	4.019	1.750	SMP/MTS	10.857	74.25	52.9
<b>PEREMPUAN</b>			SMA/SMK/MA	8.16	54.71	36.8
0 – 14	34.820	15.158	<b>Agama</b>			
15 – 64	71.271	31.027	Islam	184.054	80.13	
65 +	4.929	2.146	Protestan	5.529	2.41	
Jumlah	229.707		Katolik	3.223	1.40	
			Budha	31.176	13.57	
			Kepercayaan	5.725	2.49	

Sumber : Kabupaten Bangka dalam Angka. 2006

Pembangunan bidang sosial di Kabupaten Bangka meliputi pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, agama, dan sosial lainnya. Fasilitas publik yang ada di Kabupaten Bangka disajikan pada tabel III.3.

Tabel III.3.  
Fasilitas Publik di Kabupaten Bangka 2004

FASILITAS	Jumlah	FASILITAS	Jumlah
TK	39	Industri :	
SD/MI	182	Besar	11
SMP/MTS	48	Sedang	11
SMA/SMK/MA	41	Kecil	267
PT	5	Rumah Tangga	2960
Perpustakaan umum	1	Bank	7
Diklat/BLK	3	SPBU	6
RS	2	Koperasi	128
Puskesmas	10	Restoran	44
Pustu	26	PT/CV	68
Pusling	10	Hotel/Penginapan	27
Polindes	42	PDAM	5
Posyandu	166	PLN	3
Sarana OR	3425	Wartel	47
Masjid	127	Kantor pos	4
Musola/langgar	118	Polres	1
Gereja Katolik	9	Polsek	8
Gereja Protestan	22	Koramil	2
Vihara	19	Stasiun radio	2
Pura	4	Pengadilan	1
Kelenteng	29	Setwilda	1
Pasar		DPRD	1
Kabupaten	1	Kantor kecamatan	8
Kecamatan	6	Jembatan	1017
Mingguan	2	Objek wisata	40
TPI/PPI	4	BPPK	8
RPH/TPH	10	Pelabuhan Perikanan	2
BBI/BBU/BBT/TPI	9	Terminal	1

Sumber: Bapeda Bangka 2006

### 3.1.4. Perekonomian

Sektor pertambangan terutama komoditi timah dan potensi bahan galian C merupakan andalan Kabupaten Bangka. Komoditi utama sub sektor perkebunan di Kabupaten Bangka disajikan pada tabel III.4.

Tabel III.4.  
Luas Tanam Komoditas Utama Perkebunan di Kab.Bangka 2004

NO	KECAMATAN	LUAS TANAM		
		SAWIT	KARET	LADA
1	Sungailiat	-	162	378
2	Belinyu	202	239	505
3	Merawang	77,85	2.162	2.413,75
4	Mendo Barat	113	7.787	2.258,25
5	Pemali	50	1.390	893
6	Puding Besar	4.803,5	4.381	2.137
7	Riau Silip	123	1.420	2.497
8	Bakam	14.250,4	792	1.815
	Jumlah	19.619,75	18.333	12.897

Sumber : Bapeda dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Bangka 2006

Peran sektor usaha di Kabupaten Bangka berdasarkan harga konstan tahun 2000 disajikan pada tabel III.5.

Tabel III.5.  
PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2000 dan 2004 ADHK Tahun 2000 (juta upiah)

NO	SEKTOR EKONOMI	PDRB			
		2000	Peran(%)	2004	Peran (%)
1	Pertanian	330.691	36,1	383.074	32,4
2	Pertambangan dan Galian	201.004	21,9	253.639	21,5
3	Industri Pengolahan	81.819	8,9	157.434	13,3
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	7.517	0,8	10.885	0,9
5	Bangunan	75.268	8,2	94.802	8,0
6	Perd., hotel, Restoran	107.275	11,7	134.844	11,4
7	Pengangkutan & komunikasi	18.391	2,0	22.529	1,9
8	Keuangan, Penyewaan, Jasa	41.284	4,5	47.683	4,0
9	Jasa-Jasa	53.070	5,8	77.312	6,5
	TOTAL	916.539	100,0	1.182.202	100

Sumber : Bapeda Bangka 2006

Kabupaten Bangka memiliki lahan pertanian yang baik bagi pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan industri perikanan tangkap. Orientasi pada pembangunan pertanian di Kabupaten Bangka disebabkan

kontribusi sektor pertanian yang cukup tinggi, yaitu sebesar 32,4% pada tahun 2004 meskipun sebelumnya mencapai 36,1% pada tahun 2000 (tabel III.5).

Industri yang dapat dikembangkan di Kabupaten Bangka adalah industri kecil dan rumah tangga yang bahan bakunya berasal dari sumber daya lokal. Industri pengolahan karet yang terdapat di Mendo Barat didukung oleh kebun karet yang luasnya 18.333 ha. Hingga saat ini ekspor karet Bangka Belitung adalah 1.904 ton atau 0,094 % dari total ekspor Indonesia sebesar 2,02 juta ton.

Industri prioritas dari pemerintah Bangka karena Bangka meliputi industri maritim seperti perkapalan, *coldstorage*, tambak, rumput laut, keramik, bahan bangunan, non logam dengan potensi tambang non logam seperti kaolin (224 juta ton), pasir kuarsa (500 juta m<sup>3</sup>) dan areal untuk industri ini telah ditetapkan di Belinyu seluas 1.442 ha.

Penyediaan listrik, gas, dan air bersih menjadi perhatian di Bangka karena perannya untuk mendukung aktifitas pariwisata dan industri. Pertambahan penduduk, perubahan status menjadi propinsi serta pemekaran kabupaten telah mendorong peningkatan kontribusi sektor bangunan dari 75 milyar pada tahun 2000 rupiah menjadi 94 milyar rupiah pada tahun 2004. Sektor perdagangan, hotel, restoran mengalami pertumbuhan dari 107 milyar pada tahun 2000 menjadi 134 milyar rupiah pada tahun 2004. Sumbangan terbesar berasal dari perdagangan besar dan eceran yang menunjukkan peningkatan tingkat konsumsi .

Pengembangan pengangkutan dan komunikasi didukung oleh tersedianya prasarana perhubungan darat dan laut serta dukungan yang kuat dari bandar udara yang jaraknya hanya lebih kurang 35 km dari Sungailiat.

Jasa perbankan, asuransi, dan penyewaan bangunan, berpotensi untuk dikembangkan menjadi usaha yang menguntungkan investor sebab menunjukkan peningkatan dari 53 milyar rupiah (2000) menjadi 77 milyar pada tahun 2004.

Bangka memiliki potensi wisata pegunungan dan pantai. Dukungan pemerintah Bangka sangat tinggi dengan ditetapkannya pariwisata sebagai sektor unggulan. Potensi agrowisata di perkebunan lada, nanas, dan sawit serta keunikan budaya, atraksi, olah raga air dengan keindahan terumbu karang, dan sejarah.

### **3.1.5. Tata Ruang Kabupaten Bangka**

Tata ruang Kabupaten Bangka membagi kawasan barat menjadi 2 wilayah pengembangan (WP), yaitu WP Sungailiat (Puding Besar dan Mendo Barat) dan WP Belinyu (Bakam).

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka (Tabel III.6) dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti perubahan arah geografis pemasaran, adanya paradigma baru pembangunan, kebijakan menuju perluasan otonomi, serta pesatnya kemajuan teknologi dan faktor-faktor internal seperti perubahan batas administrasi, ketidakseimbangan pertumbuhan antar wilayah di kabupaten Bangka, serta pelestarian lingkungan hidup.

Kabupaten Bangka memiliki sumber daya berupa hutan, air, mineral, pesisir dan kelautan, wisata. Kawasan budidaya pertanian dan non pertanian yang dibatasi oleh kawasan lindung masih tersebar di seluruh wilayah. Kegiatan ekonomi masih bertumpu pada sektor primer pertanian dan pertambangan serta sektor sekunder khususnya sektor industri.

Tabel III.6.  
Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bangka

No	Kecamatan	Kebijakan Pemanfaatan Ruang
1	Sungailiat	Kota Pariwisata, Pendidikan
2	Belinyu	Kota Pariwisata, Industri, Perikanan
3	Merawang	Pariwisata berbasis agribisnis
4	Pemali	Pariwisata dan Pendidikan
5	Riau Silip	Perkebunan sawit rakyat
6	Mendo Barat	Daerah berbasis agribisnis
7	Puding Besar	Perkebunan sawit rakyat
8	Bakam	Perkebunan sawit rakyat

Sumber: Bapeda Bangka 2006

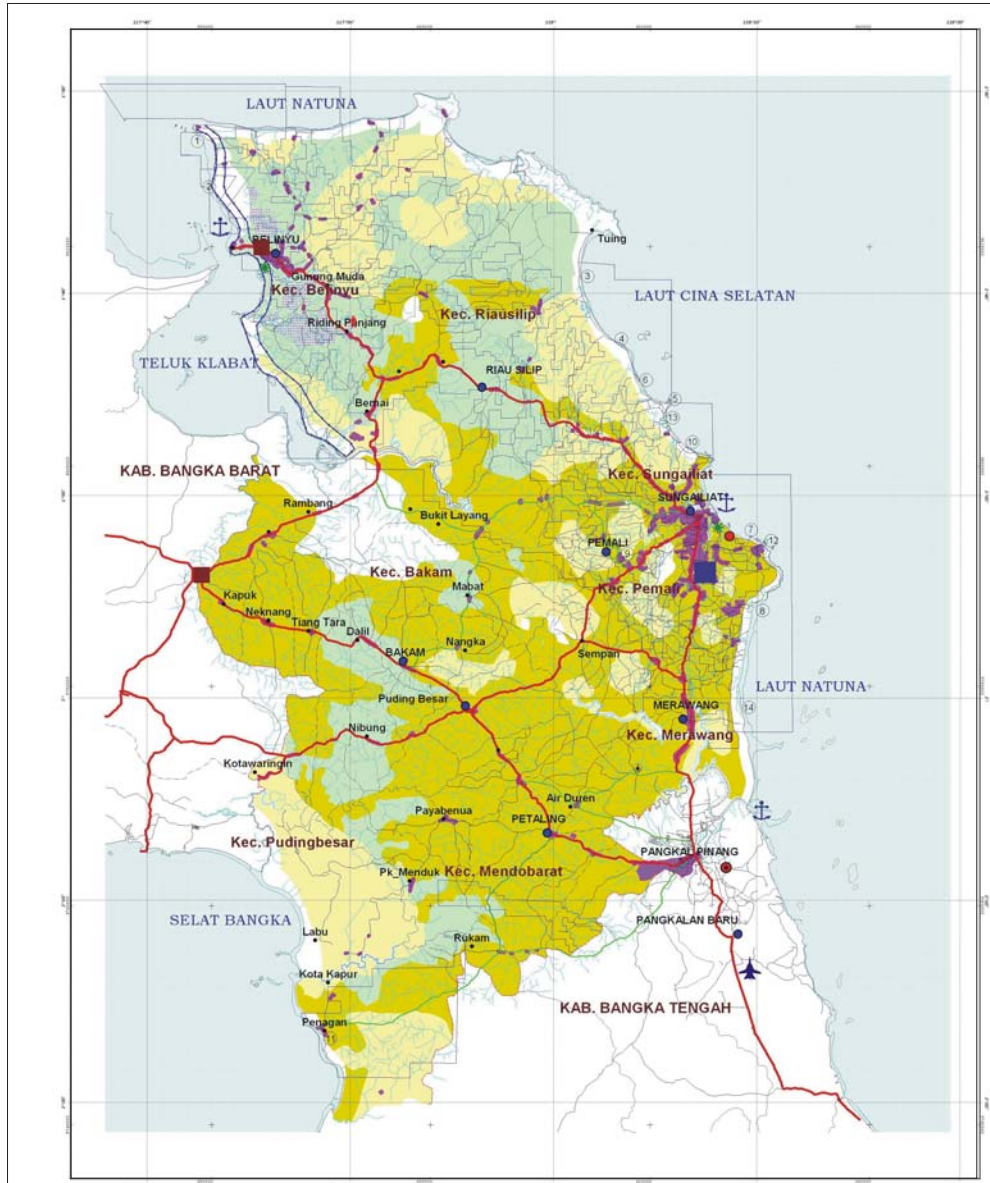
Strategi pengembangan tata ruang Kabupaten Bangka meliputi strategi pengembangan pusat pelayanan kota Sungailiat dan Belinyu serta pusat pertumbuhan sekunder; pemanfaatan ruang untuk aktifitas kawasan lindung dan budidaya; prasarana wilayah; kawasan prioritas berdasarkan kondisi, potensi dan kepentingan wilayah.



Sumber : Pemda Bangka 2006

Gambar 3.1.  
Hutan di Kabupaten Bangka  
Kawasan budidaya Kabupaten Bangka disajikan dalam gambar 3.2

berikut:



PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG 2006

TESIS  
ARAHAN PENGEMBANGAN  
KAWASAN BARAT  
KABUPATEN BANGKA

PETA KAWASAN BUDIDAYA

LEGENDA

- |   |                            |   |                      |
|---|----------------------------|---|----------------------|
| ● | Bukota Propinsi            | ■ | Kawasan Wisata       |
| ● | Bukota Kecamatan           | ■ | 1. Tj. Penyauk       |
| ● | Hutan Produksi             | ■ | 2. Pt. Remodong      |
| ■ | Pertanian Lahan Basah      | ■ | 3. Pantai Tuing      |
| ■ | Pertanian Lahan Kering     | ■ | 4. Pantai Pedsokang  |
| ■ | Perkebunan                 | ■ | 5. Pt. Para Tengagai |
| ■ | Industri Perikanan Terpadu | ■ | 6. Pantai Matras     |
| ■ | Pemukiman                  | ■ | 7. Pt. Teluk Uber    |
| ■ | Kawasan Potambungan        | ■ | 8. Pantai Rebo       |
| ■ | Pembangkit Energi          | ■ | 9. Air Panas Pemali  |
| ■ | Kawasan Industri Jetink    | ■ | 10. Pt. Tj. Belayar  |
| ■ | Kawasan Perguruan Tinggi   | ■ | 11. Situs Kota Kapur |
| ■ | Lapangan Terbang           | ■ | 12. Pt. Tj. Pesona   |
| ■ | Terminal Utama             | ■ | 13. Pt. Batu Beduan  |
| ■ | Sub Terminal               | ■ | 14. Pt. Air Anyir    |

UTARA



SKALA  
1 : 175.000

NO. HALAMAN : 53

NO. GAMBAR : 3.2

SUMBER :  
BAFEDA BANGKA

## **3.2. Kajian Umum Kawasan Barat Kabupaten Bangka**

### **3.2.1. Penduduk dan Wilayah**

Kabupaten Bangka dilalui oleh dua jalur utama transportasi darat, yaitu jalur timur yang menghubungkan Pangkal Pinang-Belinyu dan jalur barat yang menghubungkan Pangkal Pinang-Mentok. Kawasan Barat merupakan kawasan yang dilalui oleh jalur transportasi barat terdiri dari 3 kecamatan dengan luas wilayah 1.441,85 km<sup>2</sup> atau 48,8% dari luas Kabupaten Bangka. Penduduk kawasan ini berjumlah 61.294 (2006) jiwa atau 26,6% dari total penduduk Bangka (14.404 KK). Rincian jumlah kepala keluarga di kawasan barat adalah sebagai berikut : Kecamatan Bakam 3.356 KK, Puding Besar 3.795 KK, dan Mendo Barat 7.253 KK (KKBD Bangka, 2006).

### **3.2.2. Pemerintahan dan Sosial Budaya**

Kawasan Barat Kabupaten Bangka terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Bakam, Puding Besar, dan Mendo Barat serta memiliki 29 desa.

Aktifitas sosial budaya di kawasan barat Bangka memanfaatkan fasilitas-fasilitas baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. (Tabel III.12).

### **3.2.3. Perekonomian dan Kesenjangan Wilayah**

Kecamatan-kecamatan di kawasan barat difungsikan sebagai kawasan agropolitan, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian. Kawasan ini memiliki kawasan pertanian dan lahan belum terbangun yang cukup luas serta terletak di tengah wilayah perencanaan. Kawasan ini memproduksi komoditas tanaman bahan makanan serta sub-sektor lainnya pada sektor pertanian yang memiliki kontribusi dalam pertumbuhan wilayah.

Kondisi riil pertumbuhan sektor-sektor ekonomi kecamatan di Kawasan Barat dapat dilihat pada tabel III.7 hingga III 9.

Tabel. III.7.  
Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Kec. Bakam Tahun 2001-2004 (%)

<b>N O</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>RATA- RATA</b>
1	4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0,81	22,66	16,83	1,13	10,36
2	3. INDUSTRI PENGOLAHAN	15,61	6,33	6,98	7,34	9,07
3	8. KEUANGAN, PERSEWAAN, &	4,56	9,47	6,13	6,57	6,68
4	6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	9,63	6,36	3,62	4,57	6,04
5	7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	5,61	5,50	6,33	6,18	5,91
6	2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	3,95	7,75	4,92	5,58	5,55
7	5. BANGUNAN	2,59	4,75	5,77	5,11	4,56
8	9. JASA-JASA	4,12	4,14	3,40	3,73	3,85
9	1. PERTANIAN	4,53	4,50	3,48	1,43	3,48
<b>PDRB DENGAN MIGAS</b>		<b>5,53</b>	<b>6,24</b>	<b>4,86</b>	<b>3,37</b>	<b>5,00</b>
<b>PDRB TANPA MIGAS</b>		<b>5,53</b>	<b>6,24</b>	<b>4,86</b>	<b>3,37</b>	<b>5,00</b>

Sumber : Bapeda Bangka 2006

Tabel. III.8.  
Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Kec. Puding Besar Tahun 2001-2004 (%)

<b>N O</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>RATA- RATA</b>
1	2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	7,72	14,32	12,74	14,54	12,33
2	9. JASA-JASA	0,87	21,99	16,45	1,19	10,13
3	4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	15,61	6,33	6,98	7,34	9,07
4	6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	5,61	5,50	6,33	6,18	5,91
5	3. INDUSTRI PENGOLAHAN	4,16	5,51	5,80	5,09	5,14
6	1. PERTANIAN	5,09	4,72	4,24	1,58	3,91
7	8. KEUANGAN, PERSEWAAN, &	2,00	3,09	3,36	3,79	3,06
8	5. BANGUNAN	-6,13	4,04	5,93	6,77	2,65
9	7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	-3,97	3,83	4,87	5,72	2,61
<b>PDRB DENGAN MIGAS</b>		<b>3,65</b>	<b>6,01</b>	<b>5,84</b>	<b>3,50</b>	<b>4,75</b>
<b>PDRB TANPA MIGAS</b>		<b>3,65</b>	<b>6,01</b>	<b>5,84</b>	<b>3,50</b>	<b>4,75</b>

Sumber : Bapeda Bangka 2006

Tabel III.9.  
Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Kec. Mendo Barat Tahun 2001-2004 ( % )

SEKTOR		2001	2002	2003	2004	RATA-RATA
1	9. JASA-JASA	0,80	22,80	16,91	1,11	10,41
2	4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	15,61	6,33	6,98	7,34	9,07
3	5. BANGUNAN	11,79	6,21	6,09	6,60	7,67
4	3. INDUSTRI PENGOLAHAN	5,73	6,48	8,11	7,73	7,01
5	7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	9,21	5,74	5,06	5,73	6,43
6	6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	5,60	5,50	6,32	6,17	5,90
7	2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	2,36	6,13	5,35	7,66	5,37
8	8. KEUANGAN, PERSEWAAN, &	5,55	3,51	3,39	3,73	4,05
9	1. PERTANIAN	4,95	4,30	3,00	1,71	3,49
<b>PDRB DENGAN MIGAS</b>		<b>5,49</b>	<b>5,90</b>	<b>5,19</b>	<b>3,58</b>	<b>5,04</b>
<b>PDRB TANPA MIGAS</b>		<b>5,49</b>	<b>5,90</b>	<b>5,19</b>	<b>3,58</b>	<b>5,04</b>

Sumber : Bapeda Bangka 2006

Perbandingan kontribusi kawasan terhadap PDRB Kabupaten Bangka tahun 2004 berdasarkan harga konstan dapat dilihat pada tabel III.10.

Tabel III.10.  
Kontribusi PDRB Kab. Bangka 2004 ADHK antar Kawasan

No	Kecamatan	Kontribusi Kabupaten (%)	Jumlah Penduduk (%)	Luas Wilayah (%)
1	Kawasan Selatan	48,42	52,92	14,87
2	Kawasan Utara	26,27	22,46	36,57
3	Kawasan Barat	25,31	24,63	48,86

Sumber : Bapeda Bangka

Tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bangka berdasarkan PDRB tahun 2000 – 2004 dapat dilihat pada tabel III.11.

Tabel III.11.  
PDRB dan Pendapatan Perkapita Kab. Bangka 2000 - 2004

No	Kecamatan	PDRB/Kapita			Pendapatan/Kapita		
		2000		2004	2000		2004
		Berlaku	Berlaku	Konstan	Berlaku	Berlaku	Konstan
1	Sungailiat	3,474,760	6,130,324	4,154,544	2,774,431	4,956,194	3,358,831
2	Belinyu	4,312,715	6,879,475	4,990,471	3,443,478	5,561,861	4,034,655
3	Merawang	4,459,762	10,451,317	6,752,390	3,560,887	8,449,595	5,459,116

Lanjutan tabel III.11

4	Pemali	5,059,325	7,022,939	5,223,680	4,039,607	5,667,847	4,223,198
5	M.Barat	4,694,284	5,996,506	4,783,021	3,748,141	4,848,006	3,866,937
6	P.Besar	3,934,097	5,881,524	4,819,436	3,141,171	4,755,046	3,896,378
7	Riau Silip	7,010,869	9,868,073	7,381,163	5,597,813	7,978,058	5,967,462
8	Bakam	5,544,569	7,457,010	5,850,701	4,427,049	6,028,782	4,730,126

Sumber : Bapeda Bangka 2006

### 3.2.4. Fasilitas dan Infrastruktur

Sebagai suatu kawasan yang terletak di sebelah barat Kabupaten Bangka, kawasan ini dilalui jalur transportasi utama yang menghubungkan Pangkal Pinang sebagai ibukota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Mentok sebagai ibukota Bangka Barat yang memiliki pelabuhan penyeberangan ke Palembang. Dengan dukungan jalur transportasi serta letak yang relatif lebih dekat ke Pangkal Pinang, aktifitas masyarakat kawasan barat lebih tertarik ke Pangkal Pinang daripada ke Sungailiat. Dalam hal pemanfaatan fasilitas yang ada, tingkat partisipasi penduduk pada tingkat pendidikan SD cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh Angka Partisipasi Murni sebesar 81,02 % sedangkan untuk tingkat SMP 52,9 % dan tingkat SLTA 36,8 %. (Tabel III.12).

Tabel III.12.  
Fasilitas Publik di Kawasan Barat Kabupaten Bangka 2004

Fasilitas	Jumlah	Fasilitas	Jumlah
TK	2	Masjid	35
SD/MI	51	Musola/langgar	30
SMP/MTS	14	Gereja Katolik	1
SMA/SMK/MA	6	Vihara	1
Puskesmas	3	Jln Prop.Pkp – Kelapa	29,89
Pustu	11	Jln.Prop. P.Besar – P.Gebak	29,1
Pusling	3	<b>Industri :</b>	0
Polindes	25	Besar	3
Posyandu	52	Sedang	3
Sarana OR	743	Rumah Tangga	739

Lanjutan tabel III.12

Pura	1	Koperasi	19
Kelenteng	2	Restoran	6
BBI/BBU/BBT/TPI	2	PT/CV	8
BPPK	3	Polsek	3
Jembatan	140	Kantor kecamatan	3
Objek wisata	5		

Sumber : Pemda Bangka 2006

Rencana pola pemanfaatan lahan di kawasan barat Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel III.13.

Tabel III.13.

## Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Barat Bangka 2004

No	Pemanfaatan Ruang	Bakam	Puding Besar	Mendo Barat
<b>Kawasan Lindung</b>				
1	Hutan Konservasi	6.060,17	-	-
2	Hutan Lindung	66,16	89,23	83,41
3	Sempadan Pantai	-	-	265,20
4	Sempadan Sungai	218,97	400,38	165,48
<b>Budidaya Pertanian</b>				
1	Hutan produksi	5.965,77	14.670,58	8.612,57
2	Perkebunan	30.026	15.385,37	38.344,25
3	Lahan basah	50	2.700	1.443
4	Lahan kering	5.612,93	3.765,51	6.868,82
5	Perikanan	280	1.000	795
<b>Budidaya Non Pertanian</b>				
1	Permukiman	530	317,93	733,47
2	Pariwisata	-	-	-
3	Kawasan industri	-	-	-
4	Kawasan Hankamneg	-	-	-
<b>Kuasa Penambangan (KP)</b>				
1	Daratan	9.246,33	-	12,924,88
2	Laut	-	-	-
<b>Kawasan Tumpang Tindih</b>				
1	KP dengan Hutan Produksi	772,50	-	4.444,69
2	KP dengan Perkebunan	7.858,46	-	7.289,62
3	KP dengan Permukiman	42,17	-	24,36
4	KP dengan Lahan Basah	-	-	-
5	KP dengan Lahan Kering	573,20	-	1.166,21

Sumber : Bapeda Bangka 2006

**BAB IV**  
**ANALISIS DAN ARAHAN PENGEMBANGAN**  
**KAWASAN BARAT KABUPATEN BANGKA**

**4.1. Analisis Hirarki Kota dan Wilayah Pengaruh**

**4.1.1. Analisis Skalogram Guttman**

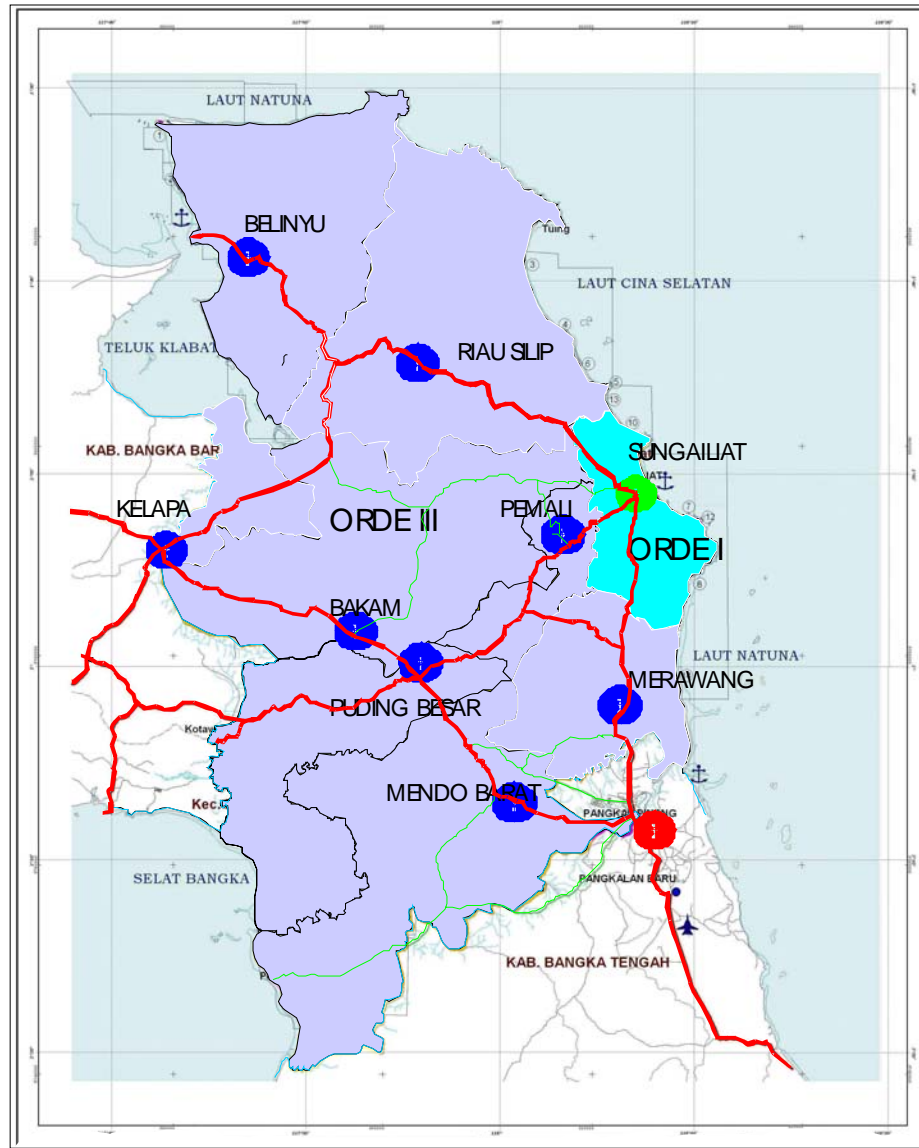
Analisis ini digunakan untuk menentukan orde kota dan dalam penelitian ini, dasar penentuannya adalah ketersediaan fasilitas pelayanan yang meliputi fasilitas ekonomi, pemerintahan, sosial. Analisis ini menggunakan metoda Skalogram Gutmann yang dikombinasikan dengan Indeks Sentralitas Terbobot, artinya disamping melihat ketersediaan fasilitas di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka, jumlah fasilitas tersebut ikut menentukan hirarki kecamatan tersebut. Sistem hirarki ini berguna untuk menentukan peran sentralitas. Sistem hirarki Bangka menempatkan Sungailiat sebagai pusat pelayanan Kabupaten (Gambar 4.1).

Tabel IV.1 menunjukkan hasil perhitungan Skalogram (Lampiran 3 dan 4) kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bangka.

Tabel IV.1.  
Bobot Sentralitas Kecamatan di Kabupaten Bangka 2006

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Bobot</b>
1	SUNGAILIAT	2821
2	BELINYU	855
3	MERAWANG	472
4	PEMALI	368
5	M.BARAT	289
6	R.SILIP	256
7	BAKAM	240
8	P.BESAR	198

*Sumber : Analisis 2006*



	<p>PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2006</p>	<p>PETA ORDE KECAMATAN-KECAMATAN DI KABUPATEN BANGKA</p>	<p>UTARA</p>
<p>TESIS ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN BARAT KABUPATEN BANGKA</p>		<p>LEGENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— BATAS KECAMATAN</li> <li>— BATAS KABUPATEN</li> <li>— JALAN PROPINSI</li> <li>— JALAN KABUPATEN</li> <li>ORDE III</li> <li>ORDE I</li> <li>● IBUKOTA PROPINSI</li> <li>● IBUKOTA KABUPATEN</li> <li>● IBUKOTA KECAMATAN</li> </ul>	<p>SKALA 1 : 175.000</p> <p>NO.MOR.HALAMAN : 60</p> <p>NO.MOR.GAMBAR : 4.1</p> <p>SUMBER: ANALISIS 2006</p>

Kota Sungailiat merupakan kota yang sangat dominan jika dilihat dari ketersediaan fasilitas. Kondisi ini mencerminkan terjadinya kesenjangan, terlebih jika melihat ketersediaan fasilitas di wilayah kawasan barat, dimana kecamatan Puding Besar dan Bakam merupakan kecamatan yang paling terbelakang.

Untuk menentukan orde atau hirarki kota, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$(2.821 - 198) : 3 = 874,3$  sehingga interval kelasnya :

1. Kota orde III :  $198 < X < 1.072,3$
2. Kota orde II :  $1.072,3 < X < 1.946,6$
3. Kota orde I :  $1.946,6 < X < 2.821$

Dengan mengacu pada tabel IV.1, maka sistem hirarki kecamatan di Kabupaten Bangka menempatkan Sungailiat sebagai kota berorde satu, tidak ada yang berorde dua, sedangkan 7 kota kecamatan berorde tiga.

Tabel IV.1 menunjukkan peran Kota Sungailiat sebagai ibukota kabupaten sangat dominan (2.821 poin). Pembangunan di Kabupaten Bangka masih terkonsentrasi di sepanjang jalur timur, yaitu kawasan utara dan selatan. Sistem perwilayahan seperti ini menyebabkan kawasan barat Kabupaten Bangka semakin tertinggal, sebab berdasarkan indeks sentralitas terbobot, Sungailiat merupakan satu-satunya kota yang berorde satu sementara 7 kecamatan yang lain berada dalam orde III tanpa ada kota yang berorde II.

#### **4.1.2. Analisis Gravitasi**

Luas wilayah kawasan barat adalah 48,8 % dari luas Kabupaten Bangka dan penduduknya hanya 26,6 % dari penduduk Kabupaten Bangka. Analisis

wilayah pengaruh dilakukan terhadap dua kota, yaitu kota Belinyu dan Sungailiat menggunakan *The Rielly's Law of Retail Gravitation Model* dengan memanfaatkan data jarak antar ibukota kecamatan dan jumlah penduduk kota. Berdasarkan jumlah penduduk dan jarak antar ibukota kecamatan, maka interaksi penduduk antar kecamatan dapat diketahui dan titik temu tersebut disebut *breaking point (BP)*. *Breaking point* merupakan titik dimana penduduk di titik tersebut memiliki kecenderungan yang sama untuk pergi ke salah satu kecamatan.

$$S_{b,a} = \frac{D_{ba}}{(1 + \sqrt{P_b/P_a})}$$

$S_{b,a}$  = Wilayah pengaruh a terhadap b  
 $D_{ba}$  = Jarak kota a ke kota b  
 $P$  = Jumlah penduduk

Tabel IV.2.  
Breaking Point Kota-Kota Kecamatan di Kab.Bangka (km) 2004

<b>141.556</b>									
<b>P.Pinang</b>	<b>17147</b>								
24,5/33	<b>S.LIAT</b>	<b>14416</b>							
45/87	28/54	<b>BLNYU</b>	<b>5716</b>						
12,4/15	26,6/42	81/132	<b>M.BARAT</b>	<b>4109</b>					
21,3/25	14,7/22	79,5/122	5,4/10	<b>P.BESAR</b>	<b>3323</b>				
34,6/40	4,8/7	45,2/67	27,8/49	7,8/15	<b>PEMALI</b>	<b>2960</b>			
10,4/12	14,8/21	51,6/75	27,8/49	23,7/44	14,9/29	<b>MRWANG</b>	<b>2368</b>		
61,9/70	26,9/37	12/17	44,4/73	33,5/59	23,8/44	31,1/59	<b>R.SILIP</b>	<b>1689</b>	
29,7/33	20,1/30	67/90	11,6/18	4,8/8	13,4/23	29,6/52	36,3/67	<b>BAKAM</b>	

Sumber : Analisis 2006

Ketr . baca : Pengaruh Y (↕) terhadap X (↔).

A = Jumlah penduduk kota/ ibukota kecamatan

Analisis Model gravitasi ini digunakan untuk: (1). Mengukur kekuatan keterkaitan antar sentra komoditas dengan pusat pengembangan wilayah; (2). Menentukan kekuatan tempat kedudukan setiap pusat kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi (sentra komoditas) dalam sistem jaringan jasa, distribusi, transportasi dan hasil perhitungan *breaking pointnya* ditampilkan pada tabel 4.2.

Kelemahan model ini adalah karena kenyataannya, bobot dan jarak tidak dapat berfungsi utuh sebagai faktor determinan besarnya interaksi. Jika muncul perubahan pada bobot atau jarak, daya tarik antara dua kota akan berubah (Daljoeni, N, 1997 :204).

Jadi dalam hal ini, penentuan wilayah pengaruh hanya untuk memberikan suatu indikasi yang ditindaklanjuti dengan analisis interaksi wilayah menggunakan formulasi Indek Gravitasi (Warpani, 1984:113) sebagai berikut :

$$I_{12} = \frac{P_1 P_2}{d_{12}^2}$$

Ketr. :  
 $I_{12}$  = Interaksi antara kecamatan 1  
 $P_1$  = Jumlah penduduk pada wilayah pertama (000 jiwa)  
 $P_2$  = Jumlah penduduk pada wilayah kedua (000 jiwa)  
 $D_{12}$  = Jarak ibukota kecamatan 1 dengan kecamatan 2 (km)

Indeks Gravitasi kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bangka disajikan pada tabel IV.3 dan kota Pangkal Pinang sebagai perbandingan guna melihat besarnya daya tariknya terhadap kecamatan di kawasan barat Kabupaten Bangka.

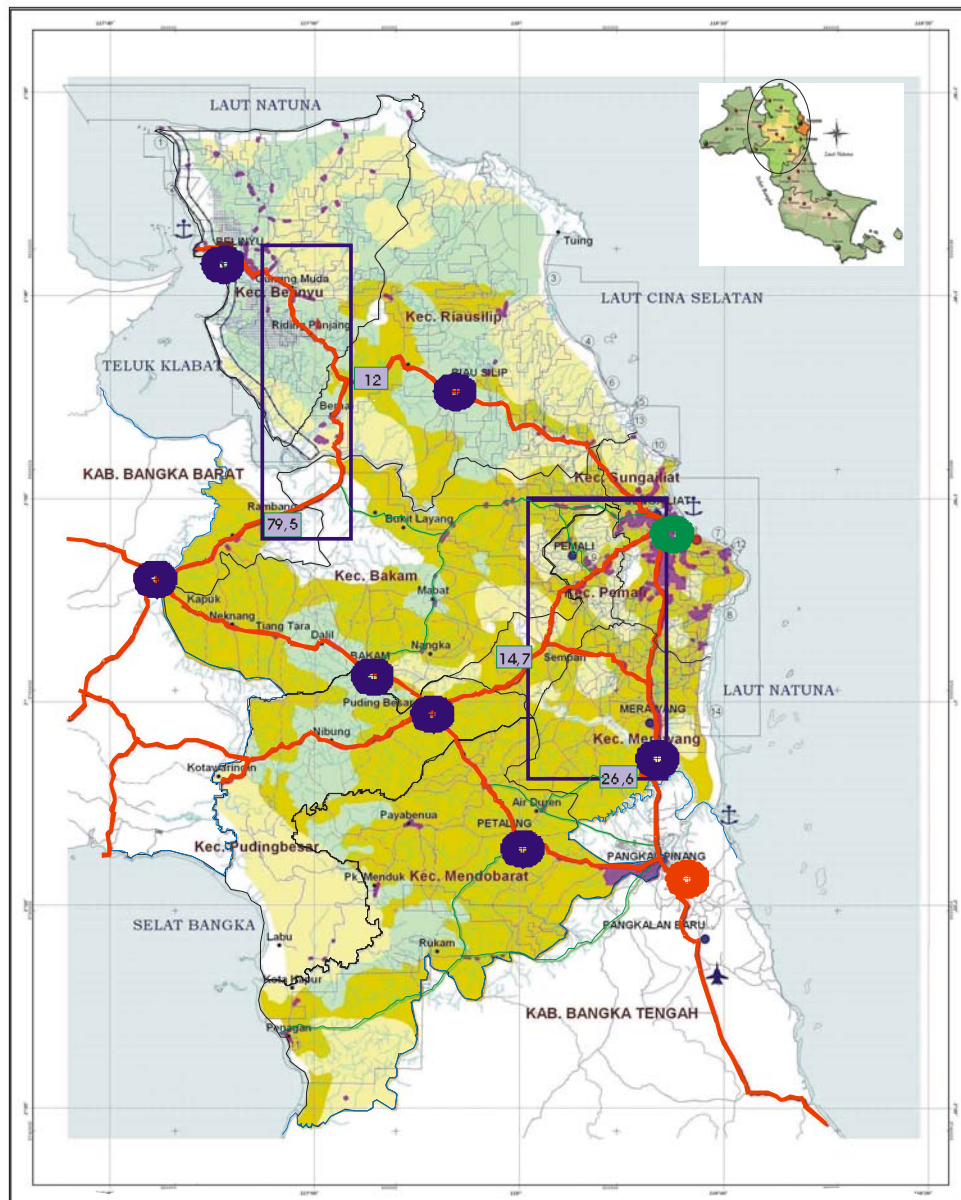
Tabel IV.3.  
Indeks Gravitasi Antar Kecamatan di Kabupaten Bangka 2004

<b>141.556</b>									
<b>P.Pinang</b>	<b>17.147</b>								
2,23	<b>S.Liat</b>	<b>14.416</b>	Ketr. A = Jumlah penduduk kota/ ibukota kecamatan						
0,27	0,08	<b>Belinyu</b>	<b>5.716</b>						
3,60	0,06	0,005	<b>M.Barat</b>	<b>2.960</b>					
2,91	0,12	0,01	0,04	<b>Merawang</b>	<b>2.368</b>				
0,07	0,03	0,06	0,003	0,002	<b>R.Silip</b>	<b>3.323</b>			
0,29	1,16	0,01	0,01	0,01	0,004	<b>Pemali</b>	<b>1.689</b>		
0,22	0,03	0,003	0,03	0,002	0,001	0,01	<b>Bakam</b>	<b>4.109</b>	
0,93	0,15	0,01	0,23	0,01	0,003	0,06	0,11	<b>P.Besar</b>	

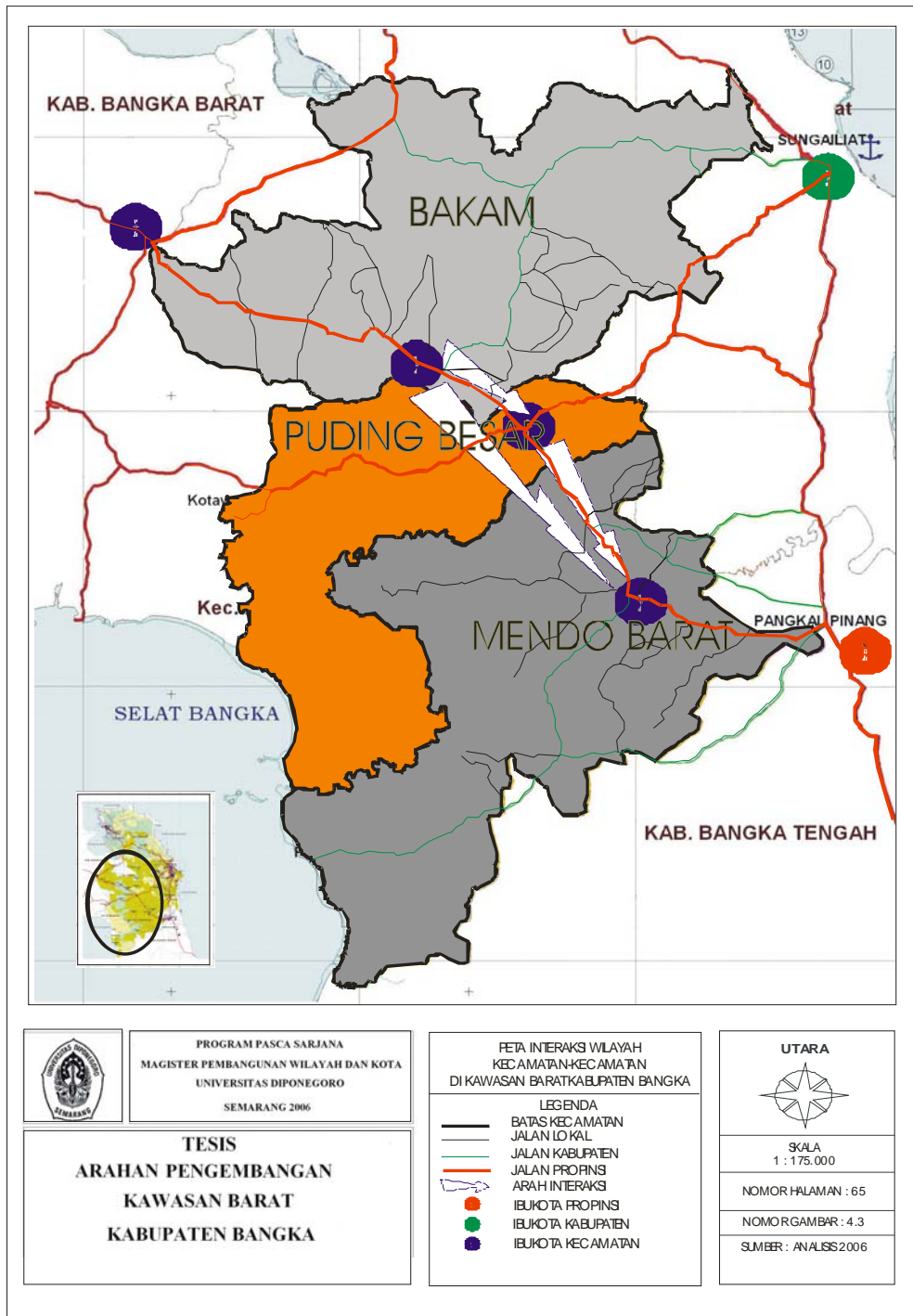
Sumber : Analisis 2006

Berdasarkan tabel IV.2 dan IV.3, maka wilayah pengaruh Belinyu dan Sungailiat dapat dilihat secara lebih jelas pada gambar 4.2 berikut:

Interaksi wilayah di kawasan barat Kabupaten Bangka berdasarkan tabel IV.3 dapat dilihat secara lebih jelas pada gambar 4.3 berikut.



	<p>PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2006</p>	<p>PETA WILAYAH PENGARUH SUNGAILIAT DAN BELINYU</p> <p>LEGENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— BATAS KECAMATAN</li> <li>— BATAS KABUPATEN</li> <li>— JALAN PROPINSI</li> <li>— JALAN KABUPATEN</li> <li>■ PEMUKIMAN</li> <li>■ BREAKING POINT</li> <li>■ IBUKOTA PROPINSI</li> <li>■ IBUKOTA KABUPATEN</li> <li>■ IBUKOTA KECAMATAN</li> </ul>	<p>UTARA</p> <p>SKALA 1 : 175.000</p> <p>NOMOR HALAMAN : 64</p> <p>NOMOR GAMBAR : 4.2</p> <p>SUMBER : ANALISIS 2006</p>
<p>TESIS ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN BARAT KABUPATEN BANGKA</p>			



#### 4.1.2.1. Kecamatan Bakam

Dari tabel IV.2 dan IV.3, interaksi Bakam dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pengaruh Belinyu sebagai wilayah pengembangan kawasan utara terhadap Bakam relatif kecil ( $IG = 0,003$ ) dengan BP pada kilometer 67 dan titik ini merupakan perbatasan antara Bakam dengan Kecamatan Kelapa. Interaksi Bakam lebih besar ke Puding besar ( $IG = 0,11$ ). Lemahnya interaksi Bakam dengan Belinyu, disamping perbedaan jumlah penduduk yang cukup besar juga disebabkan jarak yang relatif jauh, yaitu 90 km . Secara eksisting interaksi penduduk Bakam jika dibandingkan ke Belinyu, cenderung ke Pangkal Pinang (33 km,  $IG = 0,22$ ), Sungailiat (30 km,  $IG = 0,03$ ), ataupun ke Kecamatan Kelapa (36 km). Secara geografis desa-desa di Bakam cenderung berada disekitar Kecamatan Sungailiat dan Kelapa, maka menempatkan Bakam sebagai bagian dari wilayah pengembangan Belinyu kurang tepat.
2. Jarak Kecamatan Bakam ke Sungailiat adalah 30 km sementara jarak Puding Besar ke Sungailiat adalah 22 km dan BP Sungailiat terhadap Bakam berada di kilometer 20,1. Jadi Interaksi Bakam ke Sungailiat cenderung lebih lemah ( $IG = 0,03$ ) dibandingkan dengan interaksi ke Puding Besar ( $IG = 0,11$ ), sebab disamping penduduknya relatif kecil (1.689), Kecamatan Bakam juga cenderung berinteraksi ke Pangkal Pinang yang jaraknya hanya 33 km ( $IG = 0,22$ ) ataupun sebagian penduduknya yang bertempat tinggal di perbatasan dengan Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat akan 2004 cenderung ke Kecamatan

Kelapa. Hal ini disebabkan arus transportasi relatif lebih ramai dan lancar karena terletak di jalur jalan utama yang menghubungkan Bangka Barat dengan Pangkal Pinang. Penduduk Bakam yang bertempat tinggal disekitar Sungailiat cenderung berinteraksi ke Sungailiat daripada ke Belinyu.

#### 4.1.2.2. Kecamatan Puding Besar

1. Pengaruh Sungailiat sebagai pusat wilayah pengembangan kawasan selatan terhadap kecamatan Puding Besar berada di titik *Breaking Point (BP)* kilometer 14, sementara jarak Puding Besar ke Sungailiat adalah 22 km dan ke Pangkal Pinang sebagai ibukota propinsi 25 kilometer. BP 14 merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pemali dan secara geografis desa-desa yang termasuk kecamatan Puding Besar terletak di wilayah sebelah barat Puding Besar. Kondisi ini semakin melemahkan interaksi antara penduduk di desa-desa tersebut dengan Sungailiat.
2. Menurut Indeks Gravitasi, interaksi Kecamatan Puding Besar dan Sungailiat relatif lemah (0,15). Puding Besar lebih cenderung berinteraksi ke Pangkal Pinang sebab jaraknya hanya 25 kilometer (IG = 0,93). Desa-desa di kawasan barat Puding Besar jika dilihat dari jarak memiliki kesempatan yang sama untuk berinteraksi ke Sungailiat maupun ke Pangkal Pinang, tetapi sebagai kota dengan penduduk yang berjumlah 141.556 jiwa dan kedudukannya sebagai ibukota propinsi, maka aktifitas ekonominya lebih mengarah ke Pangkal Pinang karena memiliki fasilitas yang jauh lebih lengkap.

3. Kecamatan Puding secara geografis berada di lokasi yang strategis, jika dibandingkan dengan Mendo Barat, memiliki jarak yang relatif lebih baik. Jarak ke Sungailiat (22 km) dan Pangkal Pinang (25 km), memungkinkan kecamatan Puding Besar berkembang sebagai pusat pengembangan kawasan. Kondisi ini membuat interaksinya dengan kecamatan Mendo Barat ( $IG = 0,23$ ) dan Bakam ( $IG = 0,11$ ) menjadi lebih kuat dibandingkan dengan interaksi kedua kecamatan tersebut dengan Sungailiat ( $IG = 0,15$ ). Posisinya yang berada di persimpangan ke arah Sungailiat dan Pangkal Pinang menjadikan Kecamatan Puding Besar sebagai kecamatan yang memiliki aksesibilitas yang relatif lebih tinggi.

#### **4.1.2.3. Kecamatan Mendo Barat**

1. Sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk pusat kota paling besar setelah Sungailiat dan Belinyu, Mendo Barat (5.716 jiwa) lebih berinteraksi dengan kecamatan disekitarnya yang meliputi Merawang (0,04), Puding Besar (0,23) dan Bakam (0,03) dibandingkan dengan Sungailiat ( $IG = 0,06$ ).
2. Pengaruh Sungailiat sebagai wilayah pengembangan kawasan selatan terhadap kecamatan Mendo Barat relatif kecil (0,06). Hal ini karena perbedaan jumlah penduduk dan jarak kecamatan tersebut terhadap Sungailiat. Penduduk Sungailiat berjumlah 17.147 jiwa, sementara penduduk Petaling sebagai ibukota Mendo Barat hanya 5.716 jiwa.

3. Pengaruh Sungailiat sebagai wilayah pengembangan terhadap kecamatan Mendo Barat sampai pada titik *Breaking Point (BP)* kilometer 24, sementara jarak Petaling sebagai ibukota Kecamatan Mendo Barat ke Pangkal Pinang sebagai ibukota propinsi hanya 15 kilometer. BP 24 masih terletak di kecamatan Merawang atau jika melalui Puding Besar masih bagian dari Kecamatan Puding Besar. Jadi menurut perhitungan berdasarkan *The Rielly's Law of Retail Gravitation Model*, interaksi Kecamatan Mendo Barat terhadap Sungailiat relatif lemah. Penduduk Mendo Barat lebih cenderung berinteraksi ke Pangkal Pinang sebab jarak dari ibukota hanya 15 kilometer ( $IG = 3,6$ ) sedangkan desa-desa di sebelah barat Mendo Barat hampir dipastikan aktifitas ekonominya mengarah ke Pangkal Pinang karena letak geografisnya berada di sebelah barat Pangkal Pinang.

#### **4.2. Analisis Aktifitas Ekonomi**

Analisis aktifitas ekonomi dilakukan guna mendapatkan gambaran dan mengidentifikasi peran sektor-sektor ekonomi wilayah dengan menganalisis sektor ekonomi basis, prospek ekonomi, dan mengidentifikasi struktur ruang ekonomi.

##### **4.2.1. Analisis Location Quotient**

Guna mengetahui sektor usaha basis digunakan metoda analisis *Location Quotient (LQ)* terhadap PDRB Kabupaten Bangka tahun 2000 dan 2004. Tabel IV.4 memperlihatkan Sungailiat sebagai ibukota kabupaten memiliki 7 sektor

basis, Belinyu memiliki 6 sektor basis, Merawang 2 sektor, Riau Silip 2 sektor, Mendo Barat 3 sektor, Pemali 1 sektor, Puding Besar 6 sektor, Bakam 2 sektor. Analisis LQ digunakan untuk mengetahui peran suatu sektor  $i$  di kecamatan  $j$  jika dibandingkan terhadap besarnya peranan sektor  $i$  tersebut pada tingkat kabupaten. Sektor-sektor usaha sangat berkembang di Sungailiat diikuti oleh Belinyu, Merawang, dan Riau Silip yang berada pada satu jalur, yaitu jalur timur Kabupaten Bangka, sedangkan Mendo Barat, Puding Besar, dan Bakam berada pada jalur lain, yaitu berada di Kawasan Barat Kabupaten Bangka sementara Pemali merupakan kecamatan yang menghubungkan kedua jalur tersebut.

Jadi sektor maupun subsektor ekonomi kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka untuk tahun 2004, berkembang di kawasan utara dan selatan, sementara di kawasan barat menunjukkan kondisi yang kurang berkembang. LQ dapat juga digunakan sebagai petunjuk adanya keunggulan komparatif suatu kecamatan. Artinya kecamatan di kawasan barat masih mendominasi sektor pertanian

Tabel IV.4.  
Sebaran Sektor Ekonomi Basis tahun 2004 di Kabupaten Bangka

No	Sektor	Kecamatan
1	Pertanian	M.Barat, P.Besar, R.Silip, Bakam
2	Pertambangan dan Galian	Belinyu, Merawang, Pemali, R.Silip, Bakam
3	Industri dan Pengolahan	S.Liat, Merawang,
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	S.Liat, Belinyu, P.Besar.
5	Bangunan	S.Liat, Belinyu, M.Barat, P.Besar.
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	S.Liat, Belinyu, M.Barat, P.Besar.
7	Pengangkutan dan Komunikasi	S.Liat, Belinyu
8	Keuangan, Prswaan dan Jasa Perusahaan	S.Liat, Belinyu, P.Besar
9	Jasa-jasa	SiLiat, Belinyu, M.Barat, P. Besar,

Sumber : Analisis 2006.

Untuk melihat kawasan barat Kabupaten Bangka secara utuh, maka sektor/sub sektor basisnya dibandingkan dengan PDRB Kabupaten Bangka.



*Sumber : Pemerintah Kab.Bangka*

Gambar 4.4.  
Perkebunan Lada di Kawasan Barat Kabupaten Bangka



*Sumber : Pemerintah Kab. Bangka*

Gambar 4.5.  
Perkebunan Sawit di Kawasan Barat

Sektor pertanian di kawasan barat masih merupakan sektor basis dan sejak tahun 2000 mengalami penurunan peran termasuk sub sektornya. Untuk sektor/sub sektor sekunder terjadi peningkatan peran, jika sebelumnya bukan merupakan sektor basis telah mampu menjadi sektor basis pada tahun 2004. Hal ini dapat diartikan perekonomian kawasan barat telah mengalami peningkatan dimana telah mampu mencukupi kebutuhan sendiri dan mengirim produknya keluar kawasan. Kemampuan ini dapat diartikan, bahwa produk ini telah dihasilkan secara efisien dengan memanfaatkan keunggulan komparatif yang terdapat di kawasan tersebut.

Untuk sektor tersier selain sektor pengangkutan, termasuk sektor basis dan terdapat beberapa peningkatan pada sektor perdagangan dan jasa-jasa serta penurunan peran pada sektor keuangan dan beberapa sub sektor lainnya.

Bagi pemerintah kondisi seperti ini harus direspon dengan mendorong perubahan struktur perekonomian kawasan ke arah sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif ini. Sering kali tekanan mekanisme pasar berjalan lambat, tetapi disinilah peran pemerintah melaksanakan pembangunan disektor ini. David Ricardo (1917) menyebutkan keunggulan komparatif suatu sektor ekonomi akan menguntungkan pengembangan wilayah.

Kondisi seperti ini perlu disikapi dengan mendorong pertumbuhan sektor sekunder, karena beberapa pengalaman empiris membuktikan cara berfikir yang jauh ke depan dan meninggalkan pola berfikir serta teori ekonomi konvensional mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi ke suatu wilayah.

Ghalib (2005 : 78) mengungkapkan, kegiatan produksi di sektor pertanian dapat membentuk pusat pelayanan kota dan kawasan barat Bangka memiliki hal tersebut (Tabel IV.9), yaitu sebagai lokasi penyaluran hasil produksi pertanian, tempat mendapatkan kebutuhan-kebutuhan konsumsi dan input-input produksi pertanian. Teori ini juga menyebutkan bahwa lokasi-lokasi persimpangan merupakan salah satu tempat yang ideal untuk terbentuknya suatu kota.



*Sumber : Dokumen Analisis 2006*

Gambar 4.6.  
Perkebunan Karet di Kawasan Barat

Jika mengacu pada teori dan potensi di atas, maka ditinjau secara kabupaten dari 3 kecamatan yang ada di kawasan barat, Kecamatan Puding Besar memiliki potensi dan memenuhi teori tersebut untuk ditetapkan sebagai pusat pelayanan baru, sebab disamping memiliki sektor/sub sektor basis yang hampir sama dengan Mendo Barat serta didukung oleh letak geografis yang strategis.

Sektor pertanian dan 3 sub sektornya berkembang dan menjadi sektor basis di Kawasan Barat Bangka. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor alam seperti tanah dan cuaca yang cocok bagi pertumbuhan dan perkembangan sektor/sub sektor tersebut. Pengembangan sub sektor perkebunan di kawasan ini terutama difokuskan pada perkebunan lada, karet, dan sawit. Kawasan barat juga masih memiliki kekayaan pada sub sektor kehutanan dan faktor kekayaan alam ini mampu menyumbangkan pendapatan bagi kawasan ini.

Faktor jarak sangat mempengaruhi aksesibilitas penduduk dan kawasan ini merupakan kawasan yang menjadi jalur transportasi utama. Kondisi ini didukung oleh konsentrasi masyarakat pada sektor pertanian dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka yang memfokuskan aktifitas ekonomi pertanian.

Kawasan Barat jika dilihat sebagai satu wilayah yang utuh telah berkembang menjadi bagian dari pengembangan kota Pangkal Pinang. Hal ini ditunjukkan berkembangnya sub sektor sekunder, yaitu industri makanan, minuman, tembakau; kayu, bambu, rotan, dan perabot rumah tangga; listrik dan lainnya. Pada tahun 2000 perkembangan usaha masih didominasi oleh sektor pertanian, tetapi pada tahun 2004 telah didominasi oleh sektor tersier, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa. Berkembangnya sektor tersier menunjukkan kawasan ini telah menjadi bagian dari suatu kota. Dilihat secara geografis, maka desa-desa yang berbatasan langsung dengan Pangkal Pinang merupakan kawasan yang aktifitasnya telah tertarik ke aktifitas kota.

Tabel IV.5.  
 Sektor/Subsektor Basis di Kawasan Barat Kab.Bangka 2000 – 2004

No	Sektor/Sub-Sektor	Kawasan Barat	
		2000	2004
1	PERTANIAN	1,61	1,53
	Tanaman Bahan Makanan	1,73	1,41
	Tanaman Perkebunan	1,83	1,78
	Kehutanan	2,11	1,73
2	INDUSTRI PENGOLAHAN		
	makanan, minuman & tembakau	0,96	1,02
	Kayu, bambu, rotan & perabot RT	1,20	1,02
	kimia, karet, plastik, m.bumi, batubara	0,93	1,18
	barang galian bukan logam	0,96	1,03
	barang logam, mesin & peralatannya	1,06	1,03
3	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH		
	Listrik	0,87	1,02
4	BANGUNAN	0,98	1,03
5	PERDAG, HOTEL DAN RESTORAN	0,97	1,00
	Perdagangan Besar dan Eceran	0,98	1,02
	Restoran	1,01	1,02
6	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI		
	Angkutan jalan raya	1,03	1,03
	pos & telekomunikasi	0,97	1,02
7	KEU, PERSEWAAN DAN JASA PERUSHAN	1,04	0,99
	Lembaga Keuangan Bukan Bank	1,09	1,02
	Sewa Bangunan	1,06	1,02
	Jasa Perusahaan	1,03	1,03
8	JASA-JASA	0,85	1,02
	PEMERINTAHAN UMUM	0,79	1,03
	Adm Pemerintahan dan Pertahanan	0,79	1,03
	SWASTA	1,05	1,01
	Sosial kemasyarakatan	1,03	1,03
	Perorangan dan Rumah Tangga	1,09	1,02

Sumber : Analisis 2006

Untuk mengetahui lokasi sektor basis secara kawasan, dapat dilihat pada tabel IV.6, IV.7, dan IV.8. Tabel IV.6 menunjukkan bahwa kontribusi untuk sektor/sub sektor kehutanan, sektor pertambangan, sub sektor pertambangan tanpa migas dan penggalian disumbangkan oleh Kecamatan Bakam.

Dari 4 sektor/sub sektor basis yang terdapat di Kecamatan Bakam secara kawasan, hanya sub sektor kehutanan yang merupakan subsektor basis di kawasan barat. Untuk lebih rinci melihat lokasi sektor basis tersebut berada, maka dapat dilihat tabel IV.6.

Tabel IV.6.  
Sektor/Subsektor Basis di Kecamatan Bakam (Kawasan Barat)

No	Sektor/Sub-Sektor	2000	2004
1	<b>PERTANIAN</b>		
	Kehutanan	1,29	1,29
2	<b>PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN</b>	2,78	2,74
	Pertambangan Tanpa Migas	3,73	3,73
	Penggalian	1,06	1,00

Sumber : Analisis 2006

Perekonomian Bakam masih didukung oleh sektor primer, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, kehutanan, pertambangan tanpa migas, penggalian merupakan sub sektor basis yang memberikan kontribusi bagi Kecamatan Bakam. produk ke empat sektor/sub sektor ini telah di kirim keluar wilayah dan secara tidak langsung memberi petunjuk bahwa sub sektor ini memiliki keunggulan komparatif (Tarigan, 2003 :78), meskipun menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Melambatnya pertumbuhan sektor/sub sektor tersebut dibandingkan dengan sektor/sub sektor di Kabupaten Bangka selama kurun waktu 2000-2004, disebabkan oleh berkembangnya penambangan timah rakyat di Kabupaten Bangka sehingga banyak petani lada dan karet yang beralih usaha (Pemprop. Bangka Belitung dalam Kompas 22 Juli 2006), disamping faktor harga kedua komoditas tersebut. Subsektor yang terus didorong pertumbuhannya adalah perkebunan kelapa sawit yang luasnya untuk tahun 2004 telah mencapai 14.250,41 ha.

Pertumbuhan sub sektor kehutanan dipengaruhi oleh pemekaran Kabupaten Bangka menjadi tiga kabupaten baru hingga jumlah hutan produksi semakin berkurang serta semakin berkembangnya perkebunan sawit rakyat yang mengubah kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan sawit. Pertumbuhan sub sektor kehutanan masih mengandalkan upaya pemanfaatan hasil hutan dan belum ada upaya budidaya di kecamatan Bakam.

Dilihat secara kecamatan di kawasan barat, yaitu perbandingan antara sektor/sub sektor kecamatan Puding Besar dengan sektor/sub sektor kawasan barat, Kecamatan Puding Besar memiliki cukup banyak sektor basis. Terdapat 7 sektor yang cukup besar perannya dari 9 sektor yang ada. Dari tabel IV.7 sektor pertanian merupakan sektor basis, tetapi Puding Besar tidak memiliki sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan belum berkembang. Kecamatan Puding Besar memiliki sektor-sektor sekunder dan tersier yang telah berkembang yang menunjukkan perekonomiannya telah mengarah ke perekonomian kota.

Tabel IV.7.  
Sektor/Subsektor Basis di Kecamatan Puding Besar (Kawasan Barat)

No	Sektor/Sub-Sektor	2000	2004
1	PERTANIAN	1,03	1,05
	Tanaman Perkebunan	1,13	1,14
	Kehutanan	1,23	1,24
	Perikanan	1,32	1,33
2	PERTAMBANGAN		
	Penggalian		1,13
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	-	-
	makanan, minuman & tembakau	1,02	1,03
	Kayu, bambu, rotan & perabot RT	1,02	1,03
	barang galian bukan logam	1,02	1,05
	barang logam, mesin & peralatannya	1,02	1,05
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	1,19	1,20
	Listrik	1,19	1,20
5	BANGUNAN	1,19	1,04
6	PERDAG, HOTEL DAN RESTORAN	1,19	1,20

Lanjutan tabel IV.7

	Perdagangan Besar dan Eceran	1,19	1,20
	Restoran	1,19	1,20
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	1,12	1,01
	PENGANGKUTAN	1,10	0,95
	Angkutan jalan raya	1,19	1,04
	KOMUNIKASI	1,19	1,20
	pos & telekomunikasi	1,19	1,20
	Jasa penunjang komunikasi	1,09	1,17
8	KEU, PERSEWAAN DAN JASA PERUSHAN	1,19	1,17
	Bank	1,19	1,04
	Lembaga Keuangan Bukan Bank	1,19	1,04
	Sewa Bangunan	1,19	1,20
	Jasa Perusahaan	1,19	1,04
9	JASA-JASA	1,07	1,07
	PEMERINTAHAN UMUM	1,03	1,04
	Adm Pemerintahan dan Pertahanan	1,03	1,04
	SWASTA	1,14	1,15
	Sosial kemasyarakatan	1,03	1,04
	Perorangan dan Rumah Tangga	1,19	1,20

Sumber : Analisis 2006

Sektor basis di Puding Besar (kawasan) yang juga basis secara kawasan terdiri dari pertanian, tanaman perkebunan, kehutanan makanan, minuman & tembakau, kayu, bambu, rotan & perabot RT, galian bukan logam, barang logam, mesin & peralatannya, listrik, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, perdagangan besar dan eceran, restoran, angkutan jalan raya, pos & telekomunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, lembaga keuangan bukan bank, sewa bangunan jasa perusahaan, jasa-jasa, pemerintahan umum, administrasi pemerintahan dan pertahanan, swasta, sosial kemasyarakatan, perorangan dan rumah tangga. kondisi sub sektor ekonomi di Kecamatan Puding Besar tidak ditunjang oleh sub sektor pertambangan tanpa migas. Peran sub sektor basis di Kecamatan Puding Besar juga mengalami perlambatan seperti yang dialami oleh kecamatan Bakam. Puding Besar masih mengandalkan sub sektor perkebunan dan kehutanan sebagai sektor basis, meskipun perannya telah

mengalami penurunan. Sama seperti Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding juga sedang menggiatkan tanaman perkebunan kelapa sawit dimana sampai tahun 2004 telah mencapai 4.803,5 ha. Lebih jelasnya sektor/subsektor basis di Puding Besar disajikan pada tabel IV.7. Disamping sektor primer, sektor/sub sektor sekunder di Kecamatan Puding menunjukkan aktifitas yang baik. Industri pengolahan, listrik dan bangunan perannya cukup menonjol. Sektor tersier yang telah berkembang meliputi sektor perdagangan, keuangan dan jasa. Jadi, kecuali pengangkutan semua sektor tersier telah menjadi sektor basis.

Perkembangan sektor usaha Kecamatan Mendo Barat lebih maju dibandingkan dengan 2 kecamatan lain di Kawasan Barat Bangka. Sektor pertanian berkembang dengan baik kecuali sub sektor kehutanan, tetapi peternakannya merupakan subsektor basis, karena di sini berkembang usaha peternakan ayam potong. Kecuali sektor pertambangan, sektor/sub sektor usaha di Mendo Barat memberikan sumbangan bagi kemajuan kawasan. (Tabel IV.8).

Tabel IV.8.  
Sektor/Subsektor Basis di Kecamatan MendoBarat (Kawasan Barat)

No	Sektor/Sub-Sektor	2000	2004
1	PERTANIAN	1,07	1,06
	Tanaman Bahan Makanan	1,38	1,37
	Tanaman Perkebunan	1,00	1,00
	Peternakan dan Hasil-hasilnya	1,45	1,45
	Perikanan	1,33	1,32
2	PERTAMBANGAN		
	Penggalian	1,00	
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	1,14	1,18
	INDUSTRI NON MIGAS	1,14	1,18
	makanan, minuman & tembakau	1,00	1,00
	Kayu, bambu, rotan & perabot RT	1,00	1,00
	kimia, karet, plastik, m bumi dan m batubara	1,92	1,91
	barang galian bukan logam	1,00	1,05
	barang logam, mesin & peralatannya	1,00	1,05
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	1,00	1,00

Lanjutan tabel IV.8

	Listrik	1,00	1,00
5	BANGUNAN	1,00	1,05
6	PERDAG, HOTEL DAN RESTORAN	1,00	1,00
	Perdagangan Besar dan Eceran	1,00	1,00
	Hotel.	1,92	1,91
	Restoran	1,00	1,00
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	1,05	1,09
	PENGANGKUTAN	1,07	1,13
	Angkutan jalan raya	1,00	1,05
	Jasa penunjang angkutan	1,92	1,91
	pos & telekomunikasi	1,00	1,00
8	KEU, PERSEWAAN DAN JASA PERUSHAN	1,00	1,01
	Bank	1,00	1,05
	Lembaga Keuangan Bukan Bank	1,00	1,05
	Sewa Bangunan	1,00	1,00
	Jasa Perusahaan	1,00	1,05
9	JASA-JASA	1,04	1,04
	PEMERINTAHAN UMUM	1,06	1,05
	Adm Pemerintahan dan Pertahanan	1,06	1,05
	SWASTA	1,02	1,01
	Sosial kemasyarakatan	1,06	1,05
	Perorangan dan Rumah Tangga	1,00	1,00

Sumber : Analisis 2006

Mendo Barat memiliki industri pengolahan getah karet yang menyerap getah karet dari seluruh Pulau Bangka. Untuk perkebunan kelapa sawit, Kecamatan Mendo Barat sampai tahun 2004 ini luas arealnya baru mencapai 113 ha. Hal ini disebabkan usaha ini masih berskala usaha rakyat.

Tabel IV.9 berisi sektor basis di kawasan barat sebagai satu kesatuan wilayah.

Tabel IV.9.  
Lokasi Sektor/sub Sektor Basis di Kawasan Barat 2004

No	Sektor/subsektor	Bakam	P.Besar	M.Barat
1	PERTANIAN	0	1	1
	Tanaman Bahan Makanan	0	0	1
	Tanaman Perkebunan	0	1	1
	Kehutanan	1	1	0
2	INDUSTRI PENGOLAHAN (NON MIGAS)	-	-	-
	Makanan, minuman, tembakau	0	1	1
	Kayu, bambu, rotan & perabot RT	0	1	1
	kimia, karet, plastik, m.bumi, batubara	0	0	1
	Barang galian bukan logam	0	1	1
3	Listrik	0	1	1

Lanjutan tabel IV.9

4	PERDAG,HOTEL DAN RESTORAN	0	1	1
	Perdagangan Besar dan Eceran	0	1	1
	Restoran	0	1	1
5	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	-	-	-
	Angkutan jalan raya	0	1	1
	pos & telekomunikasi	0	1	1
6	KEU, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	-	-	-
	Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	1	1
	Sewa Bangunan	0	1	1
	Jasa perusahaan	0	1	1
7	JASA-JASA	0	1	1
	PEMERINTAHAN UMUM	0	1	1
	Adm.Pemerintahan dan Pertahanan	0	1	1
	SWASTA	0	1	1
	Sosial kemasyarakatan	0	1	1
	Perorangan dan Rumah Tangga	0	1	1

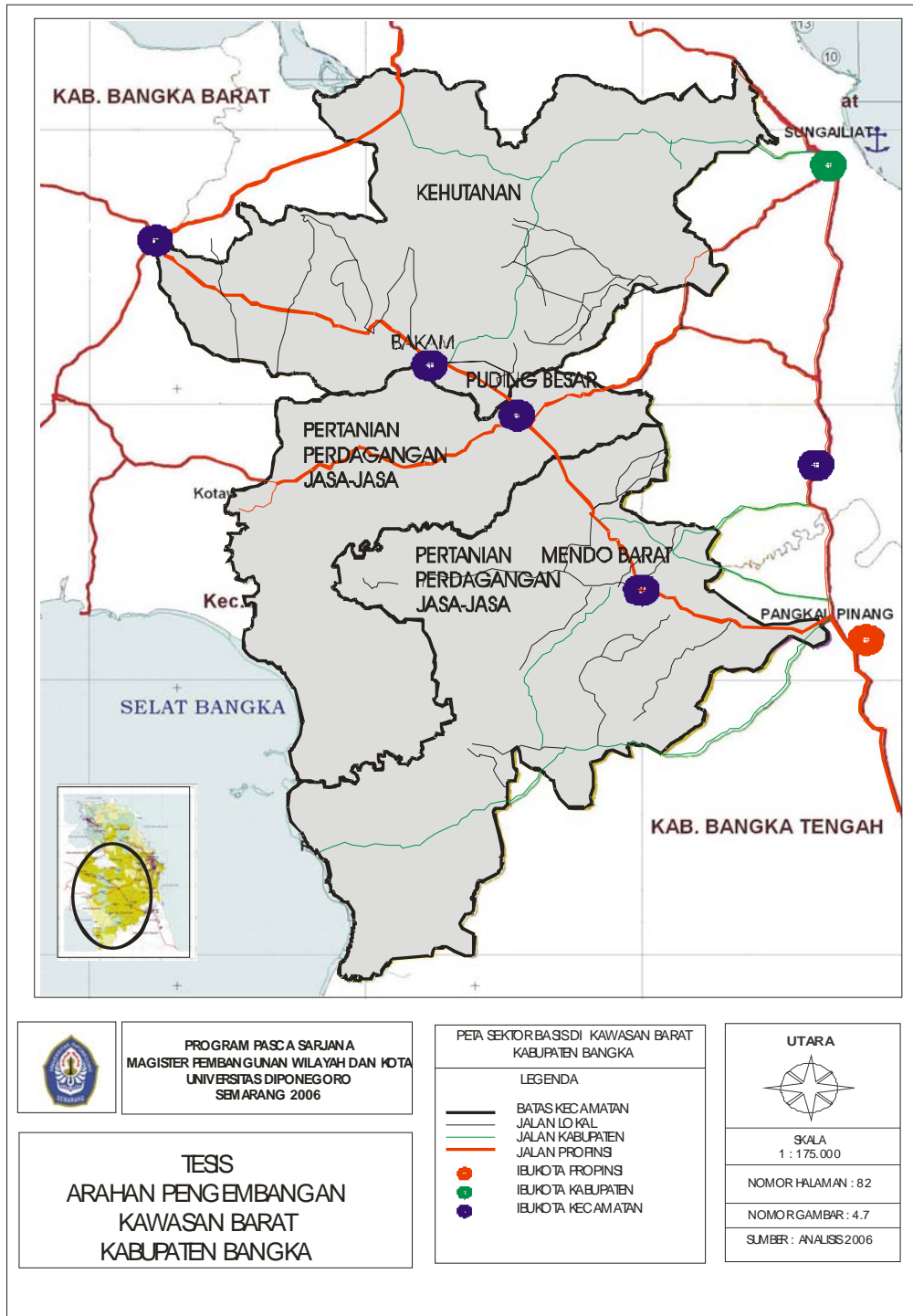
Sumber : Analisis 2006

Ketr. 0 = tidak basis, 1 = basis

#### 4.2.2. Analisis Shift Share

Dari tabel IV.10 dan tabel IV.11 terlihat bahwa kawasan barat Kabupaten Bangka mengalami pertumbuhan total yang cukup besar, yaitu Rp 58.901 juta. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh *nasional share* atau komponen pertumbuhan nasional, *proporsional shift*, dan *differential shift*. Tabel IV.10 dan IV.11 menunjukkan, 6 kecamatan dari 8 kecamatan mengalami pergeseran negatif. Nilai ini berasal dari *differential shift* maupun *proporsional shift*.

Jadi kawasan barat berdasarkan kondisi ini, pertumbuhannya secara umum belum didukung oleh faktor-faktor lokasional intern yang menguntungkan atau faktor-faktor yang bekerja secara khusus di kawasan tersebut (DS negatif). Pengaruh dari unsur-unsur luar yang bekerja secara nasional di kawasan barat bernilai negatif (PS negatif) (Tarigan, 2004 :80) atau belum memiliki daya saing yang kuat.



*Differential Shift* berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh daya saing (keunggulan kompetitif) suatu wilayah dibandingkan sektor yang sama secara nasional (Tambunan, 2003 : 186). Jadi pertumbuhan kawasan barat Kabupaten Bangka ditopang oleh unsur *Nasional Share* yang berjumlah Rp 79.867 juta.

Tabel IV.10.  
SSA Kab.Bangka Tahun 2000-2004 ADHK 2000(juta rp)

No	Uraian	S.liat	Bnyu	Mrwng	M.Brat	Pmli	P.Bsar	R.Slip	Bkam	Total
1	Nilai Tambah PDRB 2000-2004	72059	36510	48151	31236	20140	12138	29904	15527	265665
2	Pertumbuhan Total (NS+PS+DS)	72059	36510	48151	31236	20140	12138	29904	15527	265665
3	National Share	56311	43434	28650	41694	23974	17271	33429	20902	265665
4	Proportional Shift	3279	4156	1753	-1826	-590	-1662	-3654	-1456	0
5	Differential Shift	12469	-11080	17748	-8632	-3244	-3471	129	-3919	0
6	Pergeseran total	15748	-6924	19501	-10458	-3834	-5133	-3525	-5375	0

Sumber :Analisis 2006.

Tabel IV.11.  
SSA Kawasan Barat Kab.Bangka Tahun 2000-2004 ADHK 2000 (juta rupiah)

No	Uraian	S.liat	Bnyu	Mrwng	Pemali	R.Silip	K.Barat	Total
1	Nilai Tambah PDRB 2000-2004	72059	36509	48151	20180	29864	58901	265664
2	Pertumbuhan Total (NS+PS+DS)	72059	36509	48151	20180	29864	58901	265664
3	National Share	56311	43434	28650	23974	33429	79867	265664
4	Proportional Shift	3278	4156	1753	-590	-3654	-4944	0
5	Differential Shift	12470	-11081	17748	-3204	89	-16022	0
6	Pergeseran total (4+5)	15748	-6925	19501	-3794	-3565	-20966	0

Sumber :Analisis 2006.

*Proporsional shift* (PS, pergeseran proporsional, pergeseran industri-mix) dan *differential shift* (DS, komponen daya saing) dikombinasikan menjadi 4 kategori diantaranya, yaitu unggul jika DS dan PS bernilai positif dan agak unggul jika DS bernilai positif, tetapi PS bernilai negatif.

Kombinasi ini dilakukan untuk mendapatkan sektor-sektor yang memiliki prospek untuk dikembangkan. *Proporsional Shift* menunjukkan pertumbuhan yang dipengaruhi oleh unsur-unsur ekstern, sedangkan *Differential Shift* menunjukkan pertumbuhan yang dipengaruhi oleh unsur-unsur intern.

Tiga kecamatan di kawasan barat sebagai satu kesatuan wilayah, kombinasi antara DS dan PS membagi sektor-sektor menjadi 4 kelompok dan dalam pembahasan ini hanya menampilkan sektor/sub sektor unggul saja.

Tabel IV.12.  
Sektor/Subsektor Unggul Kawasan Barat 2004

KRITERIA	SEKTOR/SUBSEKTOR	DS(X)	PS(Y)
UNGGUL	kimia, karet, plastik, m.bumi, batubara	0,0001	0,247
X+;Y+	LISTRİK, GAS DAN AIR BERSIH	0,0048	0,1170
	Jasa penunjang komunikasi	0,0597	0,062
	JASA-JASA	0,0029	0,1670

Sumber : Analisis 2006

Meskipun kawasan barat memiliki banyak sektor basis, tetapi jika dilihat pertumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal kawasan barat hanya memiliki 2 sektor dan 2 sub sektor saja yang berkembang (Tabel IV.12).

Keberadaan sektor unggul di kawasan barat (kombinasi PS dan DS) di analisis menurut perbandingan antara kecamatan di kawasan dengan 3 kecamatan di kawasan. Sektor/sub sektor agak unggul dapat dilihat secara rinci pada tabel IV.13.

Tabel IV.13.  
Sektor/Subsektor Agak Unggul Kawasan Barat 2004

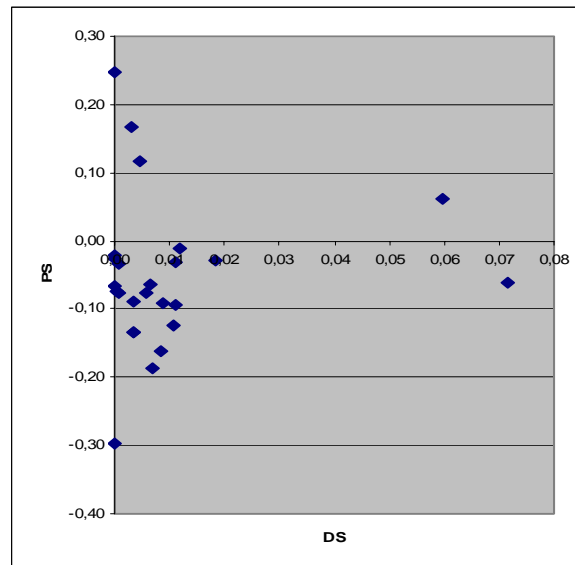
KRITERIA	SEKTOR/SUBSEKTOR	DS(X)	PS(Y)
A.UNGGUL	Peternakan dan Hasil-hasilnya	0,0003	-0,0735
X+;Y-	Kehutanan	0,0001	-0,2960
	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	0,0018	-0,0279
	Pertambangan Tanpa Migas	0,00004	-0,0210
	Penggalian	0,0717	-0,0608
	Barang galian bukan logam	0,0120	-0,0114
	barang logam, mesin & peralatannya	0,0108	-0,1245
	BANGUNAN	0,0112	-0,0303
	PERDAG,HOTEL DAN RESTORAN	0,0008	-0,0328
	Perdagangan Besar dan Eceran	0,00003	-0,0256
	Hotel	0,0033	-0,886
	Restoran	0,0001	-0,0672
	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	0,0064	-0,0649

Lanjutan Tabel IV.13.

	PENGANGKUTAN	0,0056	-0,0767
	Angkutan jalan raya	0,011	-0,0929
	KEU, PERSEWAAN DAN JASA PERUSHAN	0,0033	-0,1348
	Bank	0,0071	-0,1877
	Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,0083	-0,1619
	Jasa Perusahaan	0,0089	-0,0914
	SWASTA	0,0035	-0,1337
	Sosial kemasyarakatan	0,0007	-0,0758

Sumber : Analisis 2006

Komposisi hasil perhitungan SSA kawasan barat disajikan dalam gambar 4.11.



Gambar 4.8.  
PS - DS Kawasan Barat Tahun 2004

Sektor/sub sektor Kecamatan Bakam yang termasuk unggul pada tingkat kawasan dapat dilihat pada tabel IV.14. Perubahan relatif pertumbuhan Bakam ditunjukkan oleh nilai PS yang positif artinya dibandingkan dengan Kabupaten Bangka, tumbuh lebih cepat dan perekonomian Bakam terkonsentrasi pada sektor/sub sektor tersebut. PDRB Bakam ADHK dengan timah mencatat kenaikan nilai total dari 72.113 juta rupiah pada tahun 2000 menjadi 87.640 juta rupiah pada tahun 2004. Sub sektor perikanan naik dari 135 juta di tahun 2000

menjadi 175 juta rupiah tahun 2004. Sektor listrik naik dari 478 juta menjadi 675 juta rupiah. Sektor Jasa-jasa naik dari 3.438 juta rupiah menjadi 5.023 juta rupiah. Administrasi pemerintahan dan pertahanan naik dari 2.459 juta rupiah menjadi 3.888 juta rupiah.

Tabel IV.14.  
Sektor/Sub Sektor Unggul di Kec. Bakam (Kawasan Barat) 2004

No	Sektor/Sub-Sektor	PS	DS
1	PERTANIAN		
	Peternakan dan Hasil-hasilnya	0,002936	0,001040
	Perikanan	0,078003	0,004527
2	JASA-JASA	0,245953	0,001305
	PEMERINTAHAN UMUM	0,367016	0,000349
	Adm Pemerintahan dan Pertahanan	0,367016	0,000349

Sumber : Analisis 2006

Sektor-sektor hasil kombinasi PS dan DS di Puding Besar yang dikelompokkan kedalam sektor/sub sektor *unggul* terdiri dari sektor listrik, gas, dan air bersih serta jasa penunjang komunikasi (Tabel IV.15). Perubahan relatif pertumbuhan Puding Besar ditunjukkan oleh nilai PS yang positif artinya dibandingkan dengan Kabupaten Bangka, sektor listrik, dan jasa penunjang komunikasi tumbuh lebih cepat dan perekonomian Puding Besar terkonsentrasi pada dua sektor tersebut.

Tabel IV.15.  
Sektor/Sub Sektor Unggul di Kecamatan Puding Besar (Kawasan Barat) 2004

No	Sektor/Sub-Sektor	PS	DS
1	PERTANIAN		
	Peternakan dan Hasil-hasilnya	0,002936	0,002811
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	0,066479	0,310011
	Penggalian	0,087080	0,289411
	makanan, minuman & tembakau	0,070614	0,000097
	barang galian bukan logam	0,076744	0,026245
	barang logam, mesin & peralatannya		0,023079
3	PERDAG,HOTEL DAN RESTORAN	0,044061	0,000113
	KOMUNIKASI	0,058512	0,000800
	Jasa penunjang komunikasi	0,197999	0,088235
	Sosial kemasyarakatan	0,001020	0,001242

Sumber : Analisis 2006

PDRB Puding Besar ADHK dengan timah mencatat kenaikan nilai total dari 59.585 juta rupiah pada tahun 2000 menjadi 71.723 juta rupiah pada tahun 2004. Sektor listrik, gas, dan air bersih naik dari 557 juta menjadi 786 juta rupiah. Sub sektor jasa penunjang komunikasi naik dari 4 juta menjadi 9 juta. Secara umum perubahan relatif pertumbuhan Puding Besar dari sektor/subsektor usaha dibandingkan dengan Kabupaten Bangka adalah rendah. Perekonomian Puding Besar terkonsentrasi pada sektor/sub sektor yang nilai PS positif (Tambunan,2003 : 186). (lampiran 11). Meskipun Kecamatan Puding Besar prioritas pembangunannya pada sektor pertanian (subsektor perkebunan), tetapi sampai tahun 2004 sektor pertanian tidak termasuk ke dalam kelompok *unggul*.

Sektor/sub sektor di Mendo Barat (kawasan) yang termasuk unggul pada tingkat kawasan dapat dilihat pada tabel IV.16.

Tabel IV.16.  
Sektor/Subsektor Unggul di Kec. Mendo Barat (K. Barat) 2004

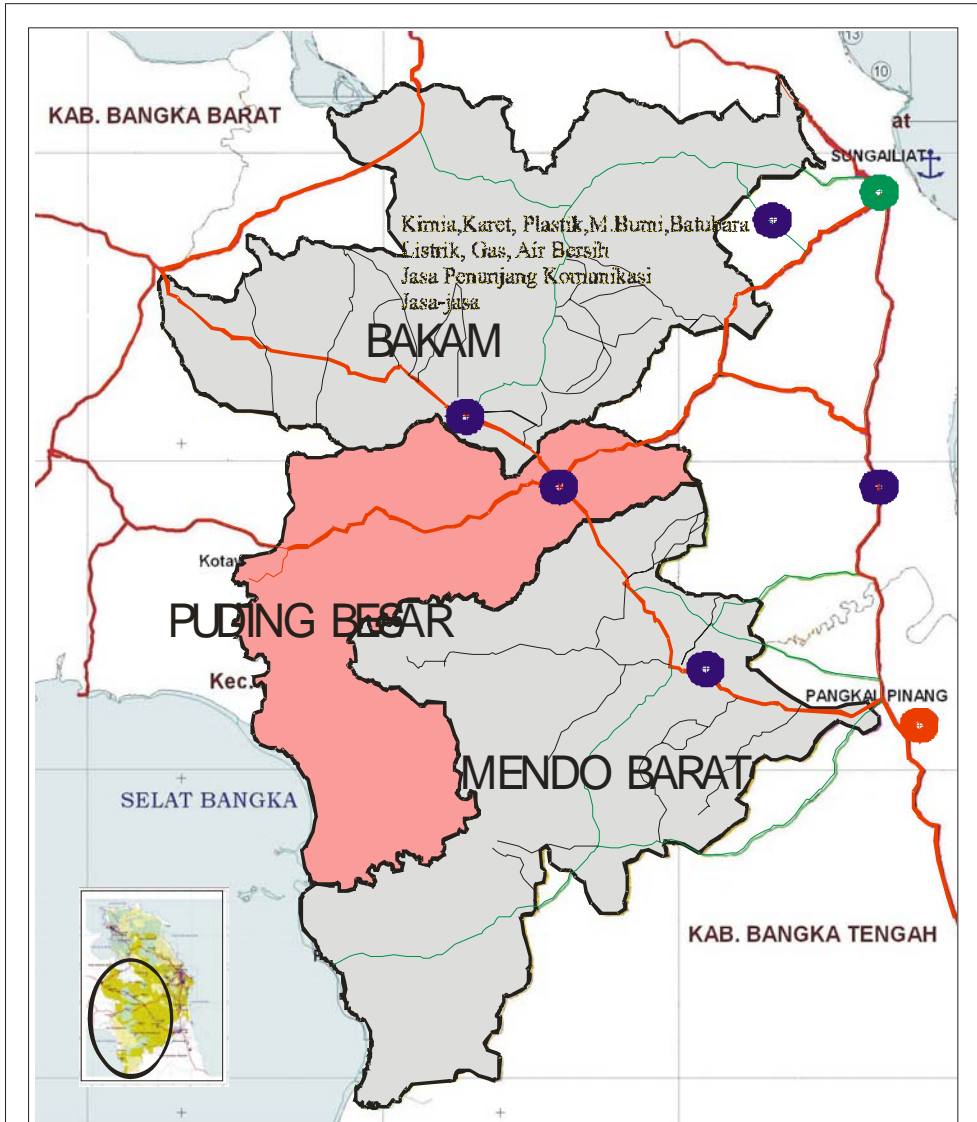
No	Sektor/Sub-Sektor	PS	DS
1	Pertambangan Tanpa Migas	0,055068	0,000961
	INDUSTRI PENGOLAHAN	0,055606	0,041701
2	INDUSTRI NON MIGAS	0,055606	0,041701
	makanan, minuman & tembakau	0,070614	0,000021
	kimia, karet, plastik, m bumi dan m batubara	0,323271	0,000000
	barang galian bukan logam	0,076744	0,072421
3	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	0,197890	0,000057
	Listrik	0,197890	0,000057
4	BANGUNAN	0,056963	0,072000
	Perdagangan Besar dan Eceran	0,050444	0,000008
5	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	0,017616	0,051774
	PENGANGKUTAN	0,004946	0,067395
	Jasa penunjang angkutan	0,131332	0,000000
	KOMUNIKASI	0,058512	0,000624
	pos & telekomunikasi	0,056124	0,000904
	Jasa penunjang komunikasi	0,197999	0,016807
9	JASA-JASA	0,245953	0,003526
	PEMERINTAHAN UMUM	0,367016	-0,000056
	Adm Pemerintahan dan Pertahanan	0,367016	-0,000056

Sumber : Analisis 2006

Dari 4 sektor/sub sektor yang ada pada tabel IV.17, maka Kecamatan Mendo Barat merupakan kecamatan yang perkembangannya paling baik dibandingkan dengan 3 kecamatan yang lain. Kecamatan ini memiliki industri pengolahan getah karet yang bahan bakunya berasal dari seluruh pulau Bangka.

Lokasi sektor/sub sektor unggul (Tabel IV. 12), dapat dilihat pada tabel IV.17. Sektor-sektor hasil kombinasi PS dan DS yang positif di Mendo Barat yang dikelompokkan ke dalam sektor/subsektor *unggul* terdiri dari sektor listrik, gas dan air bersih; jasa-jasa; subsektor kimia, karet, plastik, m.bumi, batubara; dan jasa penunjang komunikasi. Perubahan relatif pertumbuhan Mendo Barat ditunjukkan oleh nilai PS yang positif artinya dibandingkan dengan pertumbuhan pada tingkat Kabupaten Bangka, sektor listrik, gas dan air bersih dan jasa-jasa serta sub sektor kimia, karet, plastik, minyak bumi, batubara dan jasa penunjang komunikasi, tumbuh lebih cepat dan terkonsentrasi pada sektor/subsektor tersebut.

PDRB Mendo Barat ADHK tahun 2000 dengan timah mencatat kenaikan nilai total dari 143.842 juta rupiah pada tahun 2000 menjadi 175.078 juta rupiah pada tahun 2004. Sektor listrik, gas, dan air bersih naik dari 1.127 juta menjadi 1.591 juta rupiah sedangkan jasa-jasa dari 8.339 juta menjadi 12.202 juta. Sub sektor kimia, karet, plastik, minyak bumi, batubara dari 3.834 juta pada tahun 2000 menjadi 5.893 juta tahun 2004, sedangkan subsektor jasa penunjang komunikasi naik dari 7 juta menjadi 10. Secara umum perubahan relatif pertumbuhan Kecamatan Mendo Barat dari sektor/subsektor usaha dibandingkan dengan Kabupaten Bangka adalah rendah yang ditunjukkan dengan nilai Proporsional Shift -1.826 serta pergeseran totalnya -10.458 (Tabel IV.10 dan IV.11).



PROGRAM PASCA SARJANA  
 MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 SEMARANG 2006

**TESIS**  
**ARAHAN PENGEMBANGAN**  
**KAWASAN BARAT**  
**KABUPATEN BANGKA**

**PETA SEKTOR/SUB SEKTOR UNGGUL**  
**DI KAWASAN BARAT**  
**KABUPATEN BANGKA**

- LEGENDA**
- JALAN LOKAL
  - JALAN KABUPATEN
  - JALAN PROVINSI
  - BATAS KECAMATAN
  - IBUKOTA PROVINSI
  - IBUKOTA KABUPATEN
  - IBUKOTA KECAMATAN

**UTARA**



SKALA  
 1 : 175.000

NOMOR HALAMAN : 89

NOMOR GAMBAR : 4.9

SUMBER : ANALISIS 2006

Perekonomian Mendo Barat bertumpu pada sektor yang mempunyai nilai PS positif yang meliputi sektor/subsektor unggul dan agak mundur, tetapi sektor agak mundur tidak memiliki daya saing, artinya kurang memiliki keunggulan komparatif atau lingkungannya kurang kondusif.

Kecamatan Mendo Barat, basis pembangunan wilayahnya akan dijadikan sebagai kecamatan yang berbasis agribisnis, tetapi sampai dengan tahun 2004 sektor pertanian tidak termasuk ke dalam kelompok unggul sebab pada tingkat kabupaten pertumbuhannya negatif  $-0,131449$  dan daya saingnya pada tingkat kabupaten juga lemah ( $-0,011715$ ).

Tabel IV.17 menunjukkan bahwa perekonomian Mendo Barat, Bakam, dan Puding Besar terkonsentrasi pada subsektor jasa penunjang komunikasi, sektor listrik, dan jasa-jasa. Khusus Kecamatan Mendo Barat perekonomiannya didukung juga oleh sub sektor industri karet. Sektor/sub sektor tersebut tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan di tingkat kabupaten serta memiliki daya saing dibandingkan dengan sektor/subsektor yang sama pada tingkat kabupaten.

Tabel IV.17.  
Lokasi Sektor/Sub Sektor Unggul Kawasan Barat Tahun 2004

KRITERIA	SEKTOR/SUBSEKTOR	BAKAM	P.BESAR	M.BARAT
UNGGUL	kimia, karet, plastik, m.bumi, batubara	0	0	1
X+;Y+	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	1	1	1
	Jasa penunjang komunikasi	1	1	1
	JASA-JASA	1	1	1

Sumber : Analisis 2006  
Ketr: 0 = tidak; 1 = ya

### 4.3. Analisis Pengembangan Kawasan Barat Kabupaten Bangka

Kabupaten Bangka membagi wilayahnya menjadi 2 wilayah pengembangan. Penentuan SWP ini menyiratkan adanya hirarki kecamatan. Dari

8 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka, kecamatan Sungailiat dan Belinyu merupakan kecamatan, yang urutan analisis Skalogram Gutmannnya berada di atas kecamatan yang lain. Kondisi seperti ini tidaklah menguntungkan bagi kecamatan-kecamatan di kawasan barat Kabupaten Bangka. Ketiga kecamatan di kawasan barat Kabupaten Bangka mengalami kesenjangan dalam aspek usaha ekonomi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan di Utara dan Selatan Bangka serta kesenjangan dalam ketersediaan prasarana wilayah. Dengan tidak ditetapkan kawasan barat sebagai wilayah pengembangan tersendiri, berarti pembangunan akan diarahkan pada pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan barat tetap dalam kondisi tertinggal.

Berdasarkan kondisi PDRB atas dasar harga berlaku, Indeks Williamson menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2002-2004. Hal ini menunjukkan peningkatan kesenjangan di Kabupaten Bangka yang dapat dilihat pada tabel IV.18, dimana pada tahun 2002 Indeks Williamson untuk PDRB ADHB adalah 0,1865 sedangkan pada tahun 2004 meningkat menjadi sebesar 0,2309.

Tabel IV.18.  
Indeks Williamson Kabupaten Bangka Tahun 2000-2004

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Williamson</b>
2000	0,2087
2001	0,1976
2002	0,1865
2003	0,2141
2004	0,2309

Sumber : Hasil analisis 2006

Isu kurangnya infrastruktur wilayah terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan ekonomi strategis masih merupakan isu strategis. Untuk mewujudkan pengembangan wilayah yang terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Bangka merumuskan kebijakannya dalam sistem transportasi darat, baik dalam

wilayah kabupaten maupun dengan wilayah lain dalam lingkup Pulau Bangka. Pengembangan sistem transportasi dilakukan dengan meningkatkan panjang jalan dari 345,39 km di tahun 2004 menjadi 555,15 di tahun 2008. Tahun 2006, panjang jalan di Kabupaten Bangka adalah 552,75 km. Ini berarti indeks aksesibilitasnya adalah 0,19 (standar minimal 0,05) dan indeks mobilitasnya adalah 2,4, (standar minimal 2).

Pemerintah Kabupaten Bangka membuat kebijakan yang memprioritaskan peningkatan kualitas jalan dan jembatan menuju sentra-sentra produksi dan kawasan terisolir. Infrastruktur jalan propinsi di kawasan barat adalah 58,99 km. Kebijakan ini belum sepenuhnya terlaksana karena masih terdapat desa-desa di sebelah barat kawasan ini yang satu dengan yang lain belum dihubungkan oleh jaringan jalan.

Desa-desa di Kecamatan Bakam untuk berhubungan dengan desa-desa sebelah barat Kecamatan Puding Besar dapat memanfaatkan jalur utama melewati desa Puding Besar atau melalui jalan-jalan yang lebih dekat di perkebunan sawit. Selanjutnya ke desa-desa di Kecamatan Mendo Barat sebelah barat belum memiliki infrastruktur jalan lokal karena kondisi geografis wilayah yang terdiri dari rawa-rawa.

Fasilitas sosial ekonomi dikawasan barat (Tabel III.12) terdiri dari fasilitas pendidikan, kesehatan, keagamaan dan lain-lain. Fasilitas industri di kawasan barat terdiri dari industri besar 3 unit, sedang 3 unit, dan rumah tangga yang mencapai 739 unit.

Kebijakan pengembangan kawasan barat Bangka dalam rencana pola pemanfaatan lahan dilakukan untuk mengembangkan kawasan yang luasnya

1.441,85 km<sup>2</sup> atau 144.185 ha. Kawasan barat memiliki hutan lindung seluas 238,8 ha. Pemanfaatan ruang Kecamatan Bakam bagi kawasan lindung adalah seluas 6.345,30 ha. (Tabel III.13). Dari jumlah tersebut 6.060,17 merupakan hutan konservasi dan selebihnya merupakan hutan lindung dan sempadan sungai. Kawasan sempadan pantai yang berada di Kecamatan Mendo Barat luasnya 265,20 ha, sedangkan kawasan sempadan sungai yang dilindungi luasnya mencapai 784,83 ha. Adanya kawasan sempadan sungai ini menjadi suatu penghalang terhubungnya desa-desa di sebelah barat Bangka khususnya yang berada di Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat melalui jalur transportasi darat.

Kawasan budidaya yang akan dikembangkan di kawasan barat Bangka meliputi pertanian lahan basah, kering, perkebunan, perikanan, peternakan. Pemanfaatan ruang untuk budidaya pertanian (Tabel III.13) di kawasan barat Bangka terdiri dari pemanfaatan hutan produksi seluas 29.248,92 ha yang sebagian besar berada di Kecamatan Puding Besar. Areal perkebunan seluas 83.755,62 ha sebagian besar berada di Kecamatan Bakam. Komoditas utama perkebunan di kawasan barat (Tabel III.4) terdiri dari perkebunan sawit yang luasnya mencapai 19.166,9 ha, perkebunan karet 12.960 ha, dan untuk lada pada tahun 2004 luasnya mencapai 6.210,25. Lahan basah yang ada di kawasan barat berjumlah 4.193 ha. Lahan basah ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai areal pertanian lahan basah. Lahan kering di kawasan barat luasnya mencapai 16.247,26 ha dan Kecamatan Mendo Barat merupakan kecamatan yang memiliki lahan kering paling luas, yaitu 6.868,82 ha. Lahan ini dapat dimanfaatkan untuk

pertanian lahan kering dan berbagai keperluan lainnya. Pemanfaatan lahan untuk sub sektor perikanan di kawasan barat paling luas berada di Kecamatan Puding Besar, yaitu 1.000 ha dan secara keseluruhan luas areal perikanan adalah 2.075 ha.

Pemanfaatan lahan bagi aktifitas non pertanian didominasi oleh lahan pemukiman, sementara untuk kawasan pariwisata, industri dan kawasan pertahanan dan keamanan negara belum dialokasikan. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya agar tidak terjadi konflik antar sektor. Sebagai satu-satunya kecamatan yang memiliki hutan konservasi, Bakam memiliki peluang untuk mengembangkan potensi wisata alamnya dengan memanfaatkan sumber daya hutan.

#### **4.4. Arahannya Pengembangan Kawasan Barat Kabupaten Bangka**

Arahannya pengembangan wilayah merupakan arahan terhadap pemanfaatan potensi wilayah dan permasalahan pengembangan sektor/subsektor. Berdasarkan analisis kebijakan di atas, Kabupaten Bangka memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dan diarahkan guna mengurangi kesenjangan di kawasan barat Kabupaten Bangka.

##### **4.4.1. Daya Dukung Kecamatan Dalam Pengembangan Kawasan Barat**

German Marshall Fund mengemukakan ketidakmampuan suatu kota untuk berkembang lebih disebabkan oleh ketimpangan (disparity) pendapatan antar penduduk dan antara pusat kota dengan pinggirannya.

Kecamatan Mendo Barat diarahkan sebagai kawasan agropolitan, pusat koleksi, dan distribusi hasil pertanian, serta kawasan wisata. Kondisi riil

pertumbuhan rata-rata tertinggi sektor-sektor ekonomi di Kecamatan Bakam (Tabel III.7) sejak tahun 2001 hingga 2004 di dominasi oleh sektor sekunder, yaitu sektor listrik, gas, dan air bersih dengan pertumbuhan rata-rata, yaitu 10,36 % dan industri pengolahan 9,07 %. Selanjutnya sektor-sektor tersier, yaitu keuangan, perdagangan, dan pengangkutan. Sektor pertanian meskipun didukung oleh perkebunan sawit 14.250,4 ha, karet 792 ha, dan lada 1.815 ha (Tabel III.4), pertumbuhan rata-ratanya masih di bawah sektor-sektor lain, yaitu 3,48 %.

Kondisi riil pertumbuhan rata-rata sektor-sektor ekonomi di Kecamatan Puding Besar (Tabel III.8) paling tinggi adalah sektor pertambangan dan pengalihan sebesar 12,33 %. Selanjutnya rata-rata pertumbuhan sektor-sektor ekonomi berturut-turut adalah sektor jasa 10,13 %, listrik 9,07 %, dan perdagangan 5,91 %. Tingkatan rata-rata pertumbuhan sektor pertanian berada di urutan ke-6 meskipun didukung oleh kebun sawit seluas 4.803,5 ha, karet 4.381 ha, dan lada 2.137 ha.(Tabel III.4).

Kondisi riil pertumbuhan rata-rata paling tinggi sektor-sektor ekonomi di Kecamatan Mendo Barat (Tabel III.9) berurutan adalah sektor jasa-jasa 10,4 %, listrik 9,07 %, dan bangunan 7,67 %. Sektor industri pengolahan tingkat pertumbuhan rata-ratanya adalah 7,01 % dan sektor paling rendah adalah sektor pertanian dimana tingkat pertumbuhan rata-ratanya hanya 3,49 %. Sektor pertanian di Mendo barat didukung oleh sub sektor perkebunan karet seluas 7.787 ha dan lada seluas 2.258,25 ha.

Pengembangan wilayah di Kabupaten Bangka menjadi hal sangat penting mengingat Kabupaten Bangka hanya memiliki satu kecamatan yang sangat

berkembang (Orde I), sedangkan 7 kecamatan yang lain berada dalam satu orde (Orde III). Tiga kecamatan di kawasan barat Bangka, yaitu Bakam memiliki interaksi wilayah relatif lemah dengan pusat pelayanannya (Belinyu,  $IG = 0,003$ ). Kondisi ini menjadi kurang tepat menetapkan Bakam sebagai bagian dari wilayah pengembangan Belinyu.

Menetapkan Mendo Barat sebagai bagian dari WP Sungailiat, dinilai kurang tepat karena  $IG$  Mendo Barat - Pangkal Pinang sangat besar (3,60) dibandingkan dengan  $IG$  Mendo Barat – Sungailiat (0,06). Jarak yang relatif sangat dekat menyebabkan aktifitas masyarakat Mendo Barat cenderung mengarah ke Pangkal Pinang.

Proses perkembangan sebagai tempat peristirahatan, lokasi transit, dan lokasi distribusi atau koleksi barang dan jasa di suatu wilayah yang subur merupakan teori tumbuhnya suatu kota (Ghalib, 2005 : 77). Untuk mendorong kemajuan wilayah, maka penetapan kawasan barat sebagai wilayah pengembangan tersendiri menjadi suatu yang sangat realistis. Tiga (3) kecamatan di kawasan ini memiliki interaksi yang relatif lebih kuat dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan di luar kawasan. Meskipun Mendo Barat dalam Skalogram Gutmann berada di urutan lebih tinggi, tetapi dari Indeks Sentralitas Terbobot tiga kecamatan ini berada dalam satu orde, yaitu orde III. Di samping itu jarak yang lebih dekat dengan Pangkal Pinang (15 km) menyebabkan perdagangan eceran di kecamatan ini relatif mengalami kesulitan untuk berkembang (H.W. Richardson dalam Ghalib, 2005 : 110). Ibukota Mendo Barat memiliki penduduk paling besar (5.716), jika dibandingkan dengan penduduk ibukota Puding Besar (4.109) dan Bakam (1.689).

Kabupaten Bangka hanya memiliki satu kota kecil (20.000 – 100.000 jiwa), yaitu Sungailiat dengan penduduk tahun 2004 berjumlah 17.147 jiwa. (Kamus Tata Ruang, 1997 :53). Menurut H.W.Richardson (Ghalib, 2005 : 110) penjualan perkapita pada kegiatan perdagangan eceran lebih tinggi di pusat kota dibandingkan dengan zona-zona kota lainnya dan akan meningkat di luar zona radius 20 mil sebagai refleksi dari pengaruh kota lainnya. Kebijakan arahan pengembangan bagi kegiatan budidaya baik produksi maupun permukiman dilakukan melalui pemanfaatan ruang untuk kegiatan-kegiatan budidaya baik produksi maupun permukiman secara optimal sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dan analisis kesesuaian lahan. Secara umum pengembangan kawasan budidaya diarahkan untuk mengakomodasi kegiatan sektor pertanian.

Upaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan kota-kota sekunder serta mendorong perkembangan ekonomi pedesaan merupakan rekomendasi yang diberikan oleh lembaga demografi Amerika Serikat atas tidak puasnyanya negara berkembang dengan tata ruang dan penyebaran penduduknya (Ghalib, 2005 : 102). Suatu wilayah harus menunjukkan spesifikasi (Ghalib, 2005 : 8) dan kawasan barat telah menunjukkan diri sebagai kawasan pertanian seperti yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dan ditunjukkan dalam analisis LQ dan SSA. (Tabel IV.6, IV.7, IV.8, IV.14, IV.15,IV.16).

Interaksi yang lebih tinggi antar kecamatan di kawasan barat Bangka dibandingkan dengan wilayah pusat pertumbuhannya, maka kebijakan menempatkan tiga kecamatan ini ke dalam 2 wilayah pengembangan yang

berbeda perlu dikaji ulang dan membagi Kabupaten Bangka hanya pada 2 wilayah pengembangan juga perlu mendapat perhatian.

Untuk mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan, kawasan barat Bangka perlu ditetapkan sebagai wilayah pengembangan tersendiri. Pemerintah Kabupaten Bangka berusaha menjadikan Kecamatan Puding Besar dan Bakam sebagai sentra pengembangan perkebunan sawit rakyat dan menjadikan Kecamatan Mendo Barat sebagai kecamatan yang berbasis agribisnis.

Sektor yang termasuk prioritas pertama untuk dikembangkan yang terdapat di Kecamatan Bakam dapat digolongkan kepada sektor primer. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bakam masih termasuk wilayah pedesaan. Jadi pengembangan sektor/sub sektor usaha di Bakam masih tergantung pada sumber daya alam.

Rondinelli (1985) dalam Hadi .ed. (2004) mengungkapkan dalam konsep pengembangan kawasan integrasi fungsional-spasial, stimulan pengembangan wilayah harus dimulai dari pendekatan pengembangan pertanian dibandingkan dengan pengembangan industri.

Kecamatan Mendo Barat yang akan dijadikan sebagai kecamatan yang berbasis agribisnis ternyata sektor pertaniannya hanya berada di prioritas kedua. Untuk menjadikannya sebagai sektor *leading*, perlu usaha-usaha yang lebih baik lagi, sehingga sektor ini memiliki daya saing melalui usaha-usaha meningkatkan kondisi lingkungan sehingga tercipta suasana yang kondusif. Usaha-usaha ini bertujuan agar sektor pertanian di Bakam dan Mendo Barat bisa menjadi sektor *leading* dan prioritas pertama dalam pengembangan ekonomi.

#### 4.4.2. Arahan Pengembangan Sarana Prasarana Wilayah

Kawasan Barat jika dilihat sebagai satu kesatuan wilayah, maka analisisnya merupakan gabungan dari tiga kecamatan yang ada di sana, dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bangka. Analisis Skalogram yang berdasarkan ketersediaan fasilitas menempatkan Puding Besar dan Bakam sebagai kecamatan terbelakang, sedangkan Mendo Barat berada di urutan kelima. Peningkatan jumlah fasilitas sesuai dengan potensi wilayah sangat penting dilakukan. Sebagai wilayah yang diproyeksikan guna lahannya untuk perkebunan sawit rakyat, Bakam dan Puding Besar membutuhkan penambahan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan fasilitas akan berpengaruh terhadap penduduk dan kemajuan wilayah. Hal ini akan berakibat meningkatnya wilayah pengaruh kecamatan Bakam dan Puding Besar dan menurunnya beban wilayah yang berhirarki lebih tinggi. Guna mempercepat laju pertumbuhan, maka kerangka pemikiran *trickle down effects* yang berkeyakinan bahwa pembangunan yang terpusat di satu tempat akan menghasilkan *efek menetes ke bawah* perlu dikaji lagi mengingat kesenjangan yang sangat besar antara nilai hirarki Sungailiat dan Belinyu dengan kecamatan yang dilayaninya.

Menurut John Freedman dan Cleyde Wever dalam Ghalib (2005 : 77) suatu wilayah dapat digolongkan sebagai kota berdasarkan kondisi sarana prasarana pelayanan umum. Budihardjo dan Djoko Sujarto (1999:14) mengungkapkan permasalahan kota di Indonesia tidak dapat dipecahkan dengan

pola berfikir dan bertindak secara tradisional dan konvensional, tetapi harus dengan pola berfikir yang kreatif, inovatif, dan sarat dengan gagasan segar.

Melihat kondisi potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh kawasan barat begitu besar, maka hitung-hitungan finansial dapat dilakukan untuk menjustifikasi pembangunan infrastruktur, komunikasi, fasilitas sosial ekonomi yang lebih baik dan tidak hanya berorientasi pada jumlah penduduk saja, tetapi berdasarkan potensi sumber daya. Infrastruktur sosial ekonomi perlu mendapat perhatian untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah (Hamid. ed., 200).

Strategi pengembangan prasarana wilayah sebaiknya didasarkan pada kondisi wilayah, potensi, dan kepentingan wilayah guna mendukung sistem kegiatan ekonomi dan permukiman. Pengembangan sistem prasarana wilayah diprioritaskan pada prasarana transportasi serta prasarana lainnya. Strategi pengembangan prasarana tersebut berupa pengembangan prasarana jalan, energi, telekomunikasi, dan pengairan guna mendukung sistem kegiatan. Pengembangan prasarana sosial ekonomi ditujukan guna memantapkan/membentuk sistem pusat-pusat permukiman wilayah. Kawasan barat Bangka terletak di jalur utama Pangkal Pinang – Mentok, dan masih membutuhkan peningkatan jalan di wilayah yang ada di sebelah barat. Pengembangan kawasan barat ini perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan prasarana wilayah.

Seperti uraian sebelumnya pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Kebijakan yang diberlakukan Pemerintah Kabupaten Bangka terhadap kecamatan-kecamatan di

kawasan barat Kabupaten Bangka adalah menjadikan Kecamatan Bakam dan Puding Besar sebagai sentra sawit rakyat sementara Mendo Barat sebagai daerah yang berbasis agribisnis.

#### **4.4.3. Arahan Pengembangan Sektor Usaha**

Pengembangan kawasan barat masih menekankan pada sektor pertanian dan peran kawasan ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah sebagai penyedia produk-produk pertanian. Menurut Tambunan (2003:199) penurunan peran sektor pertanian secara relatif dalam ekonomi cenderung berasosiasi dengan kombinasi dari tiga hal, yaitu pangsa PDRB awal sektor non pertanian yang relatif lebih tinggi daripada pangsa PDRB awal pertanian, laju pertumbuhan *output* pertanian yang relatif rendah, dan laju pertumbuhan output dari sektor non pertanian yang lebih tinggi.

Kawasan barat yang dilalui oleh jalur transportasi barat merupakan lokasi pengembangan potensi ekonomi basis yang memiliki daya saing (sektor *leading*). Sektor/sub sektor usaha yang dapat dikembangkan adalah potensi sumber daya wilayah yang dapat dipasarkan diluar kawasan guna meningkatkan perekonomian wilayah. Agar tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan, maka pengembangan sektor/sub sektor usaha yang mendukung sektor sekunder dapat dijadikan prioritas pertama. Sektor/sub sektor yang dikembangkan merupakan sektor/sub sektor yang memiliki kemampuan menjawab isu kesenjangan wilayah, hirarki pusat-pusat permukiman dan lingkup pelayanannya.

Pola berfikir yang kreatif, inovatif, dan sarat dengan gagasan segar (Budiharjdo dan Joko Sujarto, 1999 :14) akan memberikan keuntungan kepada

petani atau masyarakat. Keuntungan petani selama ini yang hanya berasal dari sisi produksi saja, sudah saatnya ditinggalkan sebab sisi perdagangan (*trading*), yaitu bagian terbesar keuntungan dari proses seluruh ekonomi harus dimiliki oleh petani bukan oleh orang-orang tertentu saja.

Tabel IV.19.  
Sektor *Leading* di Kawasan Barat Kabupaten Bangka 2004

No	Sektor/subsektor	Nilai LQ	Nilai DS
1	PERTANIAN		
	Kehutanan	1,73	0,0001
2	INDUSTRI PENGOLAHAN		
	kimia, karet, plastik, m.bumi, batubara	1,18	0,0001
	Barang galian bukan logam	1,03	0,0120
	barang logam, mesin & peralatannya	1,03	0,01081
3	BANGUNAN	1,03	0,01120
4	PERDAG,HOTEL DAN RESTORAN	1,004	0,0008
	Perdagangan Besar dan Eceran	1,02	0,00003
	Restoran	1,02	0,0001
5	ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI		
	Angkutan jalan raya	1,03	0,011
6	KEUANGAN,PERSEWAAN&JASA PERSHAAN		
	Lembaga Keuangan Bukan Bank	1,02	0,0083
	Jasa perusahaan	1,03	0,0089
7	JASA-JASA	1,02	0,0029
	SWASTA	1,01	0,0035
	Sosial kemasyarakatan	1,03	0,0007

Sumber : Analisis 2006

Kebijakan pengembangan wilayah harus menjadi acuan dalam pengembangan sektoral dan pada prinsipnya kondisi, potensi, dan permasalahan yang dihadapi oleh kecamatan-kecamatan di kawasan barat Kabupaten Bangka adalah sama. Kebijakan yang diputuskan untuk mengembangkan kawasan barat Kabupaten Bangka sebaiknya tetap mempertahankan serta mendorong kemajuan sub sektor industri pengolahan khususnya industri pengolahan karet yang ada di Mendo Barat guna menjamin keberadaannya. Kondisi ini harus diantisipasi dengan terus mendukung industri tersebut melalui penyediaan bahan baku, yaitu

memajukan sub sektor perkebunan karet rakyat. Kebijakan ini dapat mengantisipasi menurunnya luas lahan tanaman karet dari 34.730 ha pada tahun 2001 menjadi 29.493 ha pada tahun 2004 serta menurunnya ekspor karet dari 3.228 ton pada tahun 2002 menjadi 1.904 ton pada tahun 2005.

Dari program ini diharapkan sektor pertanian, industri pengolahan, jasa pengangkutan akan berkembang dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tabel IV.19 memberikan gambaran jika kawasan barat dipandang sebagai satu wilayah, maka akan muncul satu kekuatan baru. Jika dilihat per kecamatan kawasan barat sektor/sub sektor *leading*nya tidak merata, tetapi jika dilihat sebagai satu wilayah, maka muncul 14 sektor/sub sektor *leading* yang didominasi oleh sektor/sub sektor tersier (Perdagangan, Pengangkutan, Keuangan, dan Jasa).

Dari tabel IV.19 sektor primer yang menjadi sektor *leading* di kawasan barat adalah sub sektor kehutanan. Sektor sekunder bangunan dan industri pengolahan juga berkembang dan didominasi oleh industri pengolahan karet, barang galian, serta barang logam, mesin dan peralatannya. Sektor tersier yang menjadi sektor *leading* adalah sektor perdagangan dan jasa.

Tabel IV.20.  
Sektor Potensial di Kawasan Barat Kabupaten Bangka 2004

No	Sektor/Sub-Sektor	LQ	DS
1	PERTANIAN	1,53	-0,00759
	Tanaman Bahan Makanan	1,41	-0,00001
	Tanaman Perkebunan	1,78	-0,00000001
2	INDUSTRI PENGOLAHAN		
	makanan, minuman & tembakau	1,02	-0,00001
	Kayu, bambu, rotan & perabot RT	1,02	-0,00010
	Listrik	1,02	-0,00021
3	ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI		
	pos & telekomunikasi	1,02	-0,00010
	Sewa Bangunan	1,02	-0,00009

Lanjutan tabel IV.20

4	JASA-JASA		
	PEMERINTAHAN UMUM	1,03	-0,00002
	Adm Pemerintahan dan Pertahanan	1,03	-0,00002
	SWASTA	1,01	0,00355
	Perorangan dan Rumah Tangga	1,02	-0,00026

Sumber : Analisis 2006

Untuk melihat lebih rinci lokasi sektor *leading* yang ada di Kawasan Barat, dapat dilihat tabel IV.21, IV.22, dan IV.23 yang dianalisis dengan melihat kecamatan yang ada di kawasan barat sebagai satu wilayah.

Tabel IV.21.

Sektor *Leading* di Kecamatan Bakam (Kawasan Barat) 2004

NO	SEKTOR/SUB SEKTOR	LQ	DS
1	PERTANIAN		
	Kehutanan	1,29	0,000094

Sumber : Analisis 2006

Tabel IV.22.

Sektor *Leading* di Kecamatan Puding Besar (Kawasan Barat) 2004

No	SEKTOR/SUB SEKTOR	LQ	DS
1	PERTANIAN	1,05	0,014488
	Tanaman Perkebunan	1,14	0,000012
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN		
	Penggalian	1,13	0,289411
3	INDUSTRI PENGOLAHAN		
	makanan, minuman & tembakau	1,03	0,000097
	Kayu, bambu, rotan & perabot RT	1,03	0,000134
	barang galian bukan logam	1,05	0,026245
	barang logam, mesin & peralatannya	1,05	0,023079
6	PERDAG, HOTEL DAN RESTORAN	1,20	0,000113
	KOMUNIKASI	1,20	0,000800
	Jasa penunjang komunikasi	1,17	0,088235
9	JASA-JASA		
	Sosial kemasyarakatan	1,04	0,001242
	Perorangan dan Rumah Tangga	1,20	0,000356

Sumber : Analisis 2006

Tabel IV.23.

Sektor *Leading* di Kecamatan Mendo Barat (Kawasan Barat) 2004

No	SEKTOR/SUB SEKTOR	LQ	DS
1	INDUSTRI PENGOLAHAN	1,18	0,041701
	INDUSTRI NON MIGAS	1,18	0,041701
	makanan, minuman & tembakau	1,00	0,000021
	kimia, karet, plastik, m bumi dan m batubara	1,91	0,000000
	barang galian bukan logam	1,05	0,072421

Lanjutan tabel IV 23

	barang logam, mesin & peralatannya	1,05	0,066384
2	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	1,00	0,000057
	Listrik	1,00	0,000057
3	BANGUNAN	1,05	0,072000
4	PERDAG, HOTEL DAN RESTORAN		
	Perdagangan Besar dan Eceran	1,00	0,000008
	Hotel.	1,91	0,000000
5	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	1,09	0,051774
	PENGANGKUTAN	1,13	0,067395
	Angkutan jalan raya	1,05	0,068514
	Jasa penunjang angkutan	1,91	0,000000
	pos & telekomunikasi	1,00	0,000904
6	KEU, PERSEWAAN DAN JASA PERUSHAN	1,01	0,013335
	Bank	1,05	0,063363
	Lembaga Keuangan Bukan Bank	1,05	0,066328
	Jasa Perusahaan	1,05	0,069599
7	JASA-JASA	1,04	0,003526
	SWASTA	1,01	0,000864

Sumber : Analisis 2006

Tabel IV.24 lebih mengarahkan lokasi pengembangan sektor/sub sektor *leading* di kawasan barat Bangka. Sub sektor kehutanan dapat dikembangkan terus di Kecamatan Bakam dan Puding Besar, tetapi sub sektor ini memiliki keterbatasan sebab selama ini kecenderungannya adalah hanya sebatas memanfaatkan hasil hutan. Untuk mengembangkan sub sektor ini, maka perlu langkah-langkah yang bijaksana demi kelestarian lingkungan hidup.

Industri pengolahan yang telah berkembang adalah industri pengolahan karet di Mendo Barat, sedangkan sub sektor barang galian dan barang logam berkembang di Puding Besar dan Mendo Barat. Sesuai dengan pendapat H.W. Richardson bahwa perdagangan akan berkembang pada jarak 20 mil dari pusat kota, maka sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh di Puding Besar.

Angkutan jalan raya di Mendo Barat berperan untuk mendorong aktifitas ekonomi melalui kontribusinya dalam pendistribusian barang dan jasa. Agar sub

sektor ini dapat berkembang maka perlu diimbangi dengan peningkatan produksi sektor riil, mendorong pertumbuhan dinamika mobilitas penduduk dan penguatan aksesibilitas informasi. Lembaga keuangan bukan bank dan jasa perusahaan berkembang di Mendo Barat, begitu juga sektor jasa-jasa. Untuk jasa swasta dan sosial kemasyarakatan keduanya berkembang di Puding Besar dan Mendo Barat.

Tabel IV.24.  
Lokasi Sektor *Leading* Kawasan Barat Tahun 2004

No	Sektor/subsektor	Bakam	P.Besar	M.Barat
1	PERTANIAN	-	-	-
	Kehutanan	1	0	0
2	INDUSTRI PENGOLAHAN	-	-	-
	kimia, karet, plastik, m.bumi, batubara	0	0	1
	Barang galian bukan logam	0	1	1
	barang logam, mesin & peralatannya	0	1	1
3	BANGUNAN	0	0	1
4	PERDAG,HOTEL DAN RESTORAN	0	1	0
	Perdagangan Besar dan Eceran	0	0	1
	Restoran	0	0	0
5	ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	-	-	-
	Angkutan jalan raya	0	0	1
6	KEUANGAN,PSEWAAN&JASA PERSHAAN	-	-	-
	Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	1
	Jasa perusahaan	0	0	1
7	JASA-JASA	0	0	1
	SWASTA	0	0	1
	Sosial kemasyarakatan	0	1	0

Sumber : Analisis 2006  
Ketr. : 0 = tidak; 1 = ya.

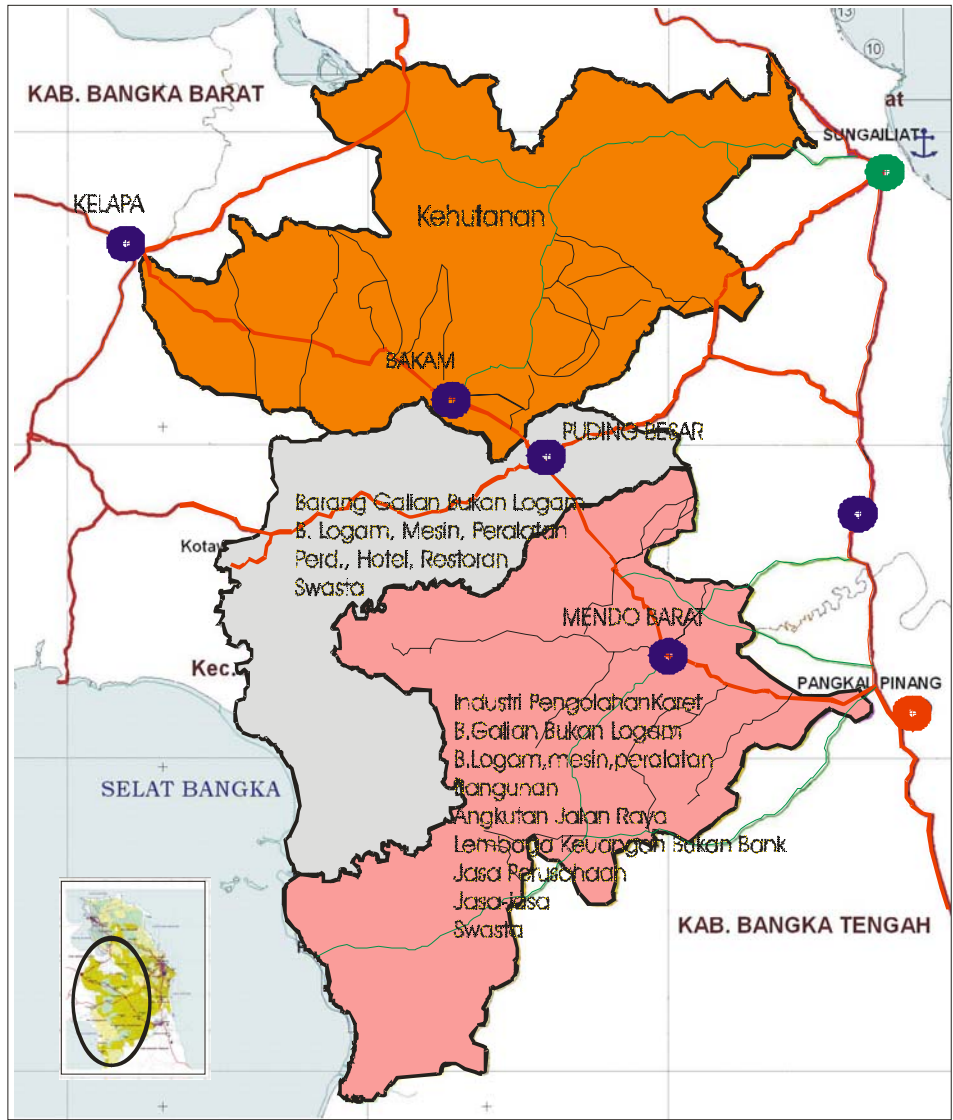
Berkembangnya sektor/subsektor tersier tidak terlepas dari faktor kedekatan jarak dengan Pangkal Pinang, dimana sebagai suatu kota sedang, mampu memberikan pengaruhnya pada wilayah-wilayah sekitarnya. Dari rencana pola pemanfaatan lahan, lahan yang disediakan untuk sub sektor perkebunan di kawasan barat Kabupaten Bangka adalah 53.759 ha. Dengan jumlah penduduk 56.938 jiwa (2004) dan jumlah kepala keluarga 14.404, maka kebijakan pengembangan sub sektor perkebunan karet guna mendukung sub sektor

pengolahan hasil karet menjadi sangat realistis. Meskipun jika dilihat secara kawasan sub sektor perkebunan bukanlah sektor *leading*, tetapi dalam pengembangan wilayah keterkaitan antar sektor menjadi sesuatu hal yang penting. Menurut Tarigan (2004:60) arahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian daerah adalah sebagai berikut :

1. Sejalan teori basis ekspor, perlu mendorong sektor/sub sektor yang produknya dijual keluar daerah dan memberikan *multiplier effects* terbesar.
2. Sejalan dengan teori interregional, sektor/sub sektor yang mampu menarik investasi dari luar merupakan sektor/sub sektor yang harus didorong pertumbuhannya.




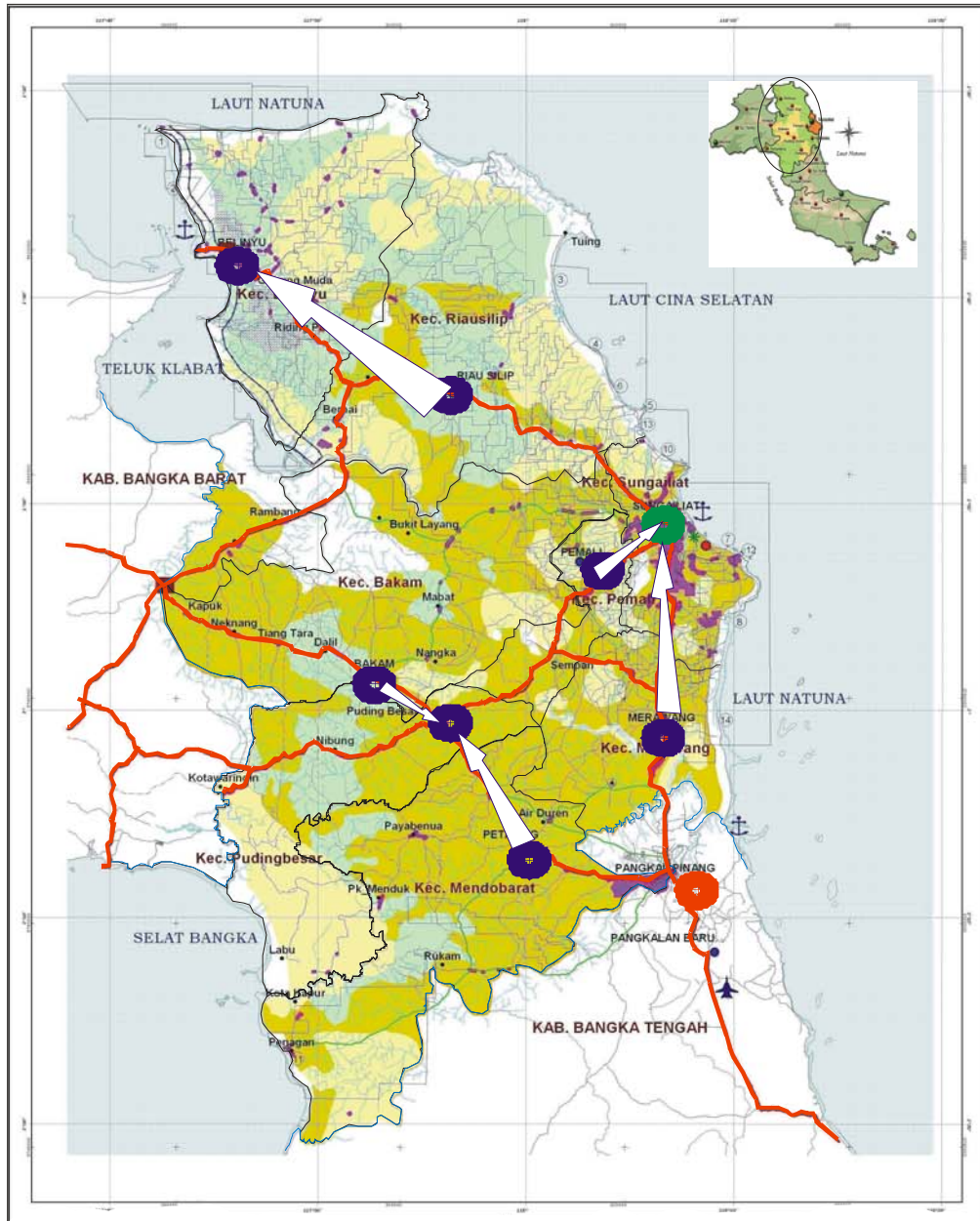
Gambar 4.15.  
Industri Pengolahan Getah Karet di Mendo Barat



  
 PROGRAM PASCA SARJANA  
 MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 SEMARANG 2006  
  
**TESIS**  
**ARAHAN PENGEMBANGAN**  
**KAWASAN BARAT**  
**KABUPATEN BANGKA**

**PETA SEKTOR/ SUB SEKTOR LEADING**  
**DI KAWASAN BARAT**  
**KABUPATEN BANGKA**  
  
**LEGENDA**  
 — BATA KECAMATAN  
 — JALAN LOKAL  
 — JALAN KABUPATEN  
 — JALAN PROVINSI  
 ● BUKOTA PROVINSI  
 ● BUKOTA KABUPATEN  
 ● BUKOTA KECAMATAN

**UTARA**  
  
 SKALA  
 1 : 175.000  
 NOMOR HALAMAN : 108  
 NOMOR GAMBAR : 4.11  
 SUMBER : ANALISIS 2006



PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG 2006

TESIS  
ARAHAN PENGEMBANGAN  
KAWASAN BARAT  
KABUPATEN BANGKA

- PETA  
SATUAN WILAYAH  
PENGEMBANGAN BARU  
KABUPATEN BANGKA  
LEGENDA
- BATAS KE CAMATAN
  - BATAS KAUPATEN
  - JALAN PROPINSI
  - JALAN KABUPATEN
  - PEMUKIMAN
  - IBUKOTA PROPINSI
  - IBUKOTA KABUPATEN
  - IBUKOTA KECAMATAN
  - ARAH INTERAKSI

UTARA

SKALA  
1 : 175.000

NOMOR HALAMAN : 109

NOMOR GAMBAR : 4.12

SUMBER :  
ANALISIS 2006

#### 4.5. Rumusan Hasil Kajian

Dari hasil kajian pembahasan terhadap Arahan Pengembangan Kawasan Barat Kabupaten Bangka didapatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka terhadap kecamatan di kawasan barat Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :
  - Membagi kecamatan yang ada di kawasan barat Bangka ke dalam dua wilayah pengembangan (WP), yaitu Bakam yang ditetapkan sebagai bagian dari WP Utara yang memanfaatkan pusat pertumbuhan Belinyu serta Puding Besar dan Mendo Barat ditetapkan sebagai bagian dari WP Selatan yang memanfaatkan pusat pertumbuhan Sungailiat.
  - Kebijakan Kabupaten Bangka terhadap kecamatan di kawasan barat adalah menjadikan Bakam dan Puding Besar sebagai sentra perkebunan kelapa sawit rakyat serta Mendo Barat sebagai daerah yang berbasis agribisnis.
2. Berdasarkan analisis Skalogram Gutmann dan Indeks Sentralitas Terbobot, Kabupaten Bangka memiliki satu kecamatan yang berorde I, tidak ada yang berorde II, dan 7 kecamatan yang lain berada dalam orde III, sementara Kecamatan Mendo Barat yang berada di kawasan barat Bangka berada pada urutan kelima dan dua kecamatan yang lain merupakan kecamatan yang urutannya terendah.
3. Analisis gravitasi dengan menggunakan model *Relly's Law of Retail Gravitation* menunjukkan pengaruh pusat pertumbuhan Belinyu sebagai

WP kawasan utara terhadap Bakam relatif sangat lemah, begitu juga pengaruh pusat pertumbuhan Sungailiat sebagai WP kawasan selatan Bangka terhadap kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat juga relatif lemah. Hal ini ditunjukkan oleh titik *breaking point* yang berada diluar wilayah pelayanan dan Indeks Gravitasi antar wilayah tersebut. Indeks gravitasi antara pusat pertumbuhan dengan wilayah pelayanannya lebih rendah jika dibandingkan dengan interaksi di antara tiga kecamatan yang terdapat di kawasan barat Bangka. Berdasarkan analisis ini Kecamatan Mendo Barat merupakan pusat pelayanan dari dua kecamatan lain di kawasan Barat.

4. Ketiga kecamatan di Kawasan Barat Bangka, interaksinya lebih kuat ke Pangkal Pinang jika dibandingkan dengan ke wilayah pusat pertumbuhannya masing-masing.
5. Dilihat sebagai suatu wilayah yang utuh, kawasan barat Kabupaten Bangka memiliki sektor-sektor *leading* yang cukup banyak terdiri dari sektor/sub sektor primer (kehutanan), sekunder (kimia, karet, plastik, minyak bumi, batu bara; barang galian bukan logam), dan tersier (Perdagangan, hotel, dan restoran; perdagangan besar dan eceran; restoran; angkutan jalan raya; lembaga keuangan bukan bank; jasa perusahaan; jasa-jasa; swasta; sosial kemasyarakatan).
6. Melihat prospek perekonomian berdasarkan sektor-sektor usaha PDRB kecamatan dalam kawasan barat, maka prospek pengembangannya :

- Sub sektor kehutanan tumbuh dan berkembang di kecamatan Bakam dan Puding Besar.
  - Industri pengolahan getah karet tumbuh dan berkembang di Kecamatan Mendo Barat.
  - Industri pengolahan barang galian bukan logam dan industri pengolahan barang logam, mesin dan peralatannya tumbuh dan berkembang di Puding Besar dan Mendo Barat.
  - Sektor bangunan tumbuh dan berkembang di Mendo Barat.
  - Sektor tersier perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh dan berkembang di Puding Besar.
  - Angkutan jalan raya, lembaga keuangan bukan bank, jasa perusahaan, dan sektor jasa tumbuh dan berkembang di Mendo Barat.
  - Sub sektor swasta dan sosial kemasyarakatan tumbuh dan berkembang di Puding Besar dan Mendo Barat.
  - Terdapat satu sub sektor yang tumbuh dan berkembang sebagai *leading sector*, tetapi lokasinya terdapat di kawasan barat, yaitu sub sektor restoran.
7. Mendo Barat merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Pangkal Pinang dan aktifitasnya telah mencirikan sebagai bagian dari aktifitas perkotaan. Meskipun didalam kebijakan Pemerintah Bangka kecamatan ini dijadikan sebagai daerah berbasis agribisnis, tetapi sektor pertanian dan sub sektornya bukan merupakan sektor *leading*.(Tabel 38).

8. Kecamatan Puding Besar yang diprioritaskan bagi pengembangan sawit rakyat, sektor pertaniannya merupakan sektor *leading*, dan hal ini ditunjang oleh sub sektor perkebunan. Kecamatan Bakam yang diprioritaskan pada sub sektor yang sama, belum mampu menjadikan sektor pertanian ataupun sub sektor perkebunannya menjadi sektor *leading*.
9. Puding Besar merupakan kecamatan yang berada di persimpangan Pangkal Pinang, Sungailiat, dan Mentok dan secara geografis memiliki letak ditengah-tengah Kabupaten Bangka dan riil sektor pertaniannya lebih baik daripada Bakam dan Mendo Barat (Tabel III.10).
10. Pengembangan sektoral ekonomi harus berorientasi pada pengembangan wilayah, sebab jika hal ini tidak dilakukan akan berakhir pada tidak optimalnya pembangunan sektor itu sendiri dan akhirnya akan terjadi kontraproduktif dengan pengembangan wilayah yang seyogyanya menjadi acuan bagi pembangunan sektoral. (Ambardi.ed.,2002 :47).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Memperhatikan pembahasan diatas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan Kabupaten Bangka menjadi dua wilayah pengembangan, dapat merugikan kemajuan kawasan barat, sebab kawasan ini mengalami kesenjangan wilayah dan interaksinya dengan wilayah pusat pertumbuhan relatif kecil. Untuk itu Kabupaten Bangka perlu menetapkan pusat pertumbuhan baru bagi kawasan barat guna mengejar ketertinggalannya dari kawasan utara dan selatan.
2. Dari tiga kecamatan yang terdapat di kawasan barat Bangka, Puding Besar merupakan kecamatan yang paling ideal dijadikan sebagai pusat pertumbuhan karena letaknya yang strategis, yaitu memiliki jarak yang cukup ideal dari kota Pangkal Pinang yang merupakan ibukota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sungailiat yang merupakan ibukota Kabupaten Bangka serta berada di persimpangan arah ke tiga kota utama di Pulau Bangka, yaitu Pangkal Pinang, Sungailiat, dan Mentok yang merupakan ibukota Kabupaten Bangka Barat.
3. Sektor/subsektor usaha yang dapat dikembangkan di Kawasan Barat sub sektor kehutanan di Bakam; sektor perdagangan dan subsektor sosial kemasyarakatan di Puding Besar; subsektor barang galian dan barang logam di Puding Besar dan Mendo Barat; sektor bangunan dan jasa-jasa,

subsektor industri pengolahan karet, perdagangan besar dan eceran, angkutan jalan raya, lembaga keuangan bukan bank, jasa perusahaan, dan swata di Mendo Barat.

4. Untuk menciptakan spesialisasi kegiatan usaha, maka kawasan barat Kabupaten Bangka dapat mengembangkan dan mendorong kemajuan industri pengolahan karet melalui pengembangan perkebunan karet rakyat mengingat prospek perdagangan karet dunia.
5. Meskipun sub sektor perkebunan secara wilayah belum merupakan sektor *leading*, namun potensi perkebunan kelapa sawit yang telah mencapai 19.000 perlu didukung mengingat prospek kebutuhan masa depan dengan menerapkan usaha pertanian terpadu..

## **5.2. Rekomendasi**

Memperhatikan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam mengembangkan wilayah di Kabupaten Bangka, maka perlu memperhatikan isu-isu global yang berkembang dan dalam mengembangkan sektor-sektor usaha penting mengaitkannya dengan isu-isu tersebut, sehingga pengembangan wilayah menjadi acuan dalam pengembangan sektoral. Hal ini berguna agar upaya mengeliminasi kesenjangan wilayah dapat terlaksana dengan baik dan mencapai keberhasilan.

2. Pemerintah Kabupaten Bangka perlu membagi wilayah ke dalam tiga wilayah pengembangan, yaitu (1). WP kawasan utara yang memanfaatkan pertumbuhan Belinyu dan melayani Belinyu dan Riau Silip; (2). WP kawasan selatan yang memanfaatkan pertumbuhan Sungailiat dan melayani Sungailiat, Pemali dan Merawang; (3). WP kawasan barat yang memanfaatkan pertumbuhan Puding Besar dan melayani Mendo Barat, Puding Besar dan Bakam. Pembagian ini bertujuan agar kelemahan dari pembangunan yang terpusat di satu wilayah dengan mengharapkan *trickle down effects* dapat dihindari. Pembangunan tidak lagi hanya sekedar mengejar pertumbuhan yang tinggi, tapi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari pembangunan
3. Pemerintah daerah perlu lebih fokus terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, terutama terhadap kebijakan menjadikan Kecamatan Bakam dan Puding Besar sebagai sentra perkebunan sawit rakyat serta menjadikan Mendo Barat sebagai kecamatan yang berbasis agribisnis, sebab berdasarkan analisis yang telah dilakukan sektor pertanian serta sub sektor yang ada di bawahnya masih menghadapi kendala daya saing dan keunggulan komparatif.
3. Konsep yang menerapkan pola pikir yang membuat terobosan dalam pengembangan wilayah dengan meninggalkan pola berfikir konvensional sudah selayaknya dilaksanakan. Pola pikir konvensional dalam pembangunan adalah pola berfikir yang dalam pelaksanaan pembangunan harus diselaraskan dengan jumlah penduduk dan jumlah produksi,

sedangkan konsep terobosan ke depan memandang bahwa suatu wilayah akan berkembang dan ekonomi akan meningkat seiring dengan tersedianya fasilitas infrastruktur dan pembangunan yang diarahkan pada pengembangan sektor-sektor sekunder serta berdasarkan potensi wilayah.

4. Mengingat kebijakan terhadap pengembangan kawasan barat Kabupaten Bangka adalah pengembangan sektor pertanian, maka pengembangan teknologi pertanian sebaiknya mendapat perhatian sehingga tercapai peningkatan produktifitas yang optimal di semua sub sektor yang mendukung sektor pertanian. Sub sektor industri pengolahan getah karet perlu didukung dengan pengembangan sub sektor perkebunan karet, begitu juga sub sektor perkebunan sebaiknya mendapat dukungan dari sub sektor industri pengolahan non migas serta membuat keterpaduan dengan pengembangan sub sektor peternakan.
5. Mengingat keterbatasan peneliti, maka disarankan kepada peneliti lain yang mempunyai ketertarikan terhadap pengembangan kawasan barat ini untuk meneliti lebih lanjut lagi dengan variabel yang lebih kompleks demi kesempurnaan kajian wilayah ini.

## Daftar Pustaka

### BUKU

- Abdullah, Piter. dkk. 2002. *Daya Saing Daerah : Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Yogyakarta : BPFPE.
- Ambardi, Urbanus M dan Socia Prihawantoro (ed.). 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*. Jakarta : BPPT.
- Alkadri, dkk. (Ed.). 2001. *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah: Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Teknologi*. Jakarta : BPPT
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Bingham, R and R.Mier (eds)1993. *Theories of Local Economic Development*. New York : Sage Publication.
- Branch, Melville C.1996. *Perencanaan Kota Komprehensif*. Terjemahan Bambang Hari Wibisono. Cvetakan ke-2. Yogyakarta : Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Budihardjo, Eko dan Djoko Sujarto. 2005. *Kota Berkelanjutan*. Bandung: Alumni.
- Budiharsono, Sugeng, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bona.S,Frans. 2005. *Peluang Bisnis dan Investasi di Berbagai Daerah Otonomi*. Jakarta: Restu Agung.
- Daldjoeni, N. 1997. *Geografi Baru, Organisasi Keruangan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit PT Alumni.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan dan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.
- Friedmann, John. 1987. *Planning In The Public Domain*. Princeton University Press, Princeton New Jersey

- Friedman dan Douglas, 1975, *Agropolitan Development: Towards a New Strategy for Regional Planning in Asia*
- Glasson, John.1990. *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta : Penerbit : LPFE – UI.
- Ghalib, Rusli. 2005. *Ekonomi Regional Bandung* : Pustaka Ramadhan.
- Hadi, Setia (ed.). 2004. *Pengembangan Agropolitan Sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan dan Wilayah Secara Berimbang*. Bogor : PPPPW – IPB dan P3T.
- Hakim, Abdul. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Hamid, dkk.(ed.). 2001. *Kawasan Perbatasan Kalimantan Permasalahan dan Konsep Pengembangan*. Jakarta: BPKTPW-BPPT.
- Ibrahim, Idi Subandy. 2004. *Dari Nalar Keterasingan Menuju Nalar Pencerahan*. Yogyakarta : Jalasutra.
- Jayadinata, Johara.T1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*.Jakarta : CIDES.
- Jhingan, M.L. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Terjemahan D. Guritno. Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Kodoatie,Robert J . 2005 . *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- McNeely, Jeffrey A. 1992. *Ekonomi dan Keanekaragaman Hayati*. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 2001. *Identifikasi Faktor-FaktorInovatif Bagi Pembangunan Masyarakat: Suplemen: tes, Inventori, Teori, dan Konstruksinya*, Yogyakarta: Rake Sarasih.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Penerbit Rake Sarasih
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Nicholson, Walter. 1992. *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions*. Sydney: DDryden Press.
- Nurzaman, Siti Sutriah. 2002. *Perencanaan Wilayah di Indonesia pada masa sekitar krisis*. Bandung : Penerbit ITB.
- Rahardjo, Pudjo dan Eppy Yuliani. 2004. “*Arahan Pengembangan Wilayah Sebagai Mengeliminasi Disparitas Antar Wilayah di Kabupaten Banyumas*”. Pondasi : Berkala Ilmiah Keteknikan. Volume 10. no. 1 Maret 2004.
- Reksohadiprodo, Sukanto dan A.R. Karseno. 1994. *Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Richardson, Harry W. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta : Penerbit : LPFE – UI.
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Rondinelli, D.1985. *Applied Methods of Regional Analysis*, Westview Press Colorado
- Soetomo, Sugiono. 2002. *Dari Urbanisasi ke Morfologi Kota*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Stohr. W. B. and D.R.F. Taylor (eds.). 1981. *Development From Above and Below*. John Willey and Sons. New York
- Sudarsono. 1988. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta : PT New Aqua Press.
- Sukiro, Sadono. 2004. *Makroekonomi*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Sumaatmadja, Nursid. 1988. *Studi Geografi : Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Bandung : Alumni.
- Sunu, Pramudya. 2001. *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 140001*, Jakarta : Grasindo.
- Suparmoko, M. 2002. *Penilaian Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Jakarta : LPPEM Wacana Mulia.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan*.. Yogyakarta : BPFE.

- Tambunan, Tulus T.H. 2004. *Perekonomian Indonesia: Beberapa permasalahan Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional*, Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjahyati, Budhy dan BS Kusbiantoro (ed).1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tjahyati, Budhy et al (ed.).2005. *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21*. Jakarta : LPFE UI.
- Todaro, Michael P. 1987. *Economic Development in the Third World*. New York dan London : Longman.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: MediaPressindo.
- Yunus, Hari Sabari. 2002. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

#### **ARTIKEL**

- Kompas 2006. ” Transmigrasi : Paradigma Kota Terpadu Mandiri Perlu Investasi.” Jakarta: 7 Juli 2006:18.
- \_\_\_\_\_. ”Perekonomian : Benahi Manajemen Pengantaran Produk.” Jakarta : 7 Juli 2006 : 21.
- Julianery, BE. 2006. ” Potret Perubahan Fungsi Kawasan Permukiman.” Kompas, 29 Juli, hal. 26.
- Mutis, Thoby. 2006. ”Menilik Contoh Kasus di Thailand.”Kompas, 14 Juli, hal 35.
- Roeroe, Freddy. 2006. ” Antara Pemikiran Terobosan dan Konvensional.” Kompas, 4 Agustus, hal. 33.
- Hartiningsih, Maria. 2006. ”Menanam Kembali Ekonomi ke Dalam Proses Sosial.” Kompas, 14 Juli, hal.33.

#### **TESIS**

- Bilivson. 2004. ”Struktur Ruang Sebagai Arah Pengembangan Ekonomi Wilayah Kabupaten Barito Selatan.” Tesis, MPPWK Univ. Diponegoro Semarang.

Chair, Miftahul. 2002. "Karakteristik dan Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Pemukiman di Kawasan Sekitar Aliran Sungai Martapura Banjarmasin". Tesis, PPMTPK, Undip Semarang.

Wahyudi, Haryono. 2004. "Kota Gombong Sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Kebumen." Tesis, MPPWK Univ.Diponegoro Semarang.

### **PERATURAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan.

### **TERBITAN TERBATAS**

Akil, Syarifuddin. 2002. *Konsep Pengembangan Wilayah di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Penataan Ruang Departemen Kimpraswil.

Ali, Eko Maulana. 2003. "Gerbang Meraih Permata." Sungailiat : Emas Bangka Production.

Brotosunaryo, PM. 2000. "Analisis Pengembangan Kota/Wilayah". *Tata Loka*, vol.5, April, hal. 67-71.

Hadi, Setia (ed.). 2004. *Pengembangan Agropolitan Sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan dan Wilayah Secara Berimbang*. Bogor : P4W-IPB DAN P3PT.

### **SURAT KABAR/MAJALAH**

*Kompas*, 25 Juli 2006. "Jangan Abaikan Potensi Karet Alam." hal. 17.

### **BUKU DATA/LAPORAN**

*Bangka Dalam Angka*. 2004. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka.